



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**Pemerintah
Kabupaten Kudus
Tahun 2023**



www.kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	21
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	52
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	57
2.1 Capaian Kinerja Makro	57
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	57
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	58
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	94
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	101
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	103
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANGUNAN	182
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	183
4.1 Urusan Pendidikan	183
4.2 Urusan Kesehatan	189
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	205
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	210
4.5 urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	214
4.6 Urusan Sosial	222
4.7 Program dan Kegiatan	230
BAB V PENUTUP	240

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuknya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini dapat terselesaikan.

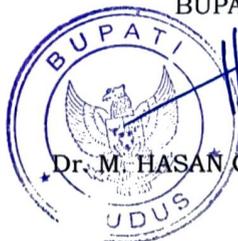
Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional bagi Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

LPPD merupakan laporan hasil kinerja Kepala Daerah yang disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian Indikator Kinerja *Outcome* dan *Output*. LPPD juga melaporkan capaian kinerja makro pembangunan daerah dan capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan meliputi Urusan Wajib berkaitan pelayanan dasar, Urusan Wajib tidak berkaitan pelayanan dasar dan Urusan Pilihan, sebagaimana ditentukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Selanjutnya LPPD menjadi bahan evaluasi dan pembinaan oleh Pemerintah dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa mendatang.

Pada kesempatan ini disampaikan pula permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kudus akan berkomitmen dan terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kudus, Maret 2024

BUPATI KUDUS



Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2023, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tahun keempat ini, merupakan wujud pemenuhan kewajiban konstitusional Bupati Kudus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 serta Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-undang pembentukan daerah;

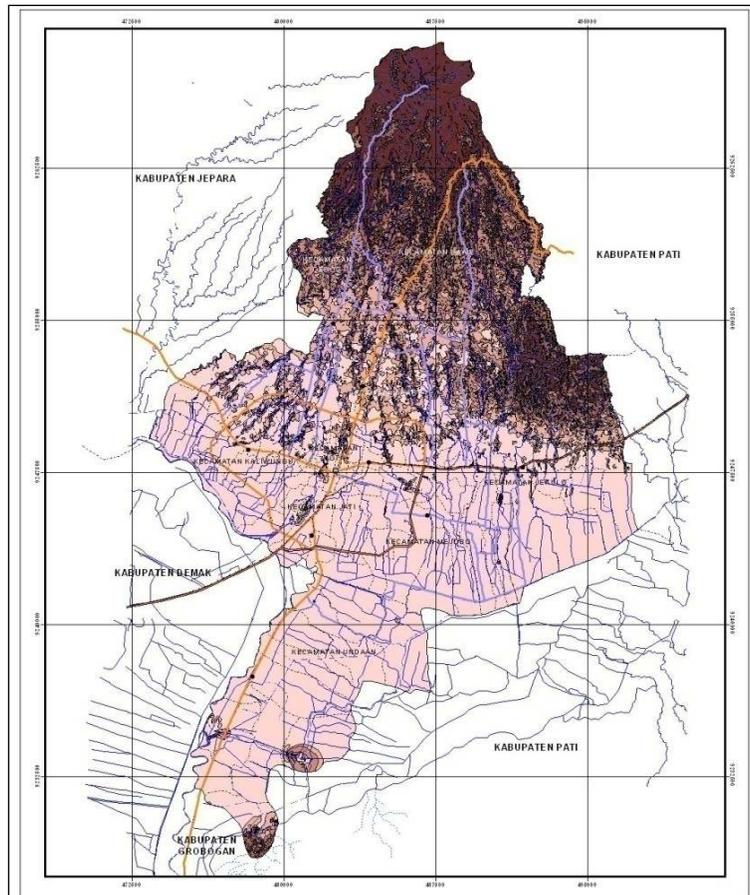
Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
 15. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 27);
- b. Data geografis wilayah;

Tanah di Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40°, berdasarkan tingkat kemiringan di Kabupaten Kudus, kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)°, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)°, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)° serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)°.



Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Gambar 1.1 Peta Kelerengn Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, yaitu sebagai berikut :

- a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sangat jarang atau tidak pernah terjadi adanya gerakan tanah. Pada zona ini mempunyai tebal tanah berkisar dari 0,5 – 4 m. Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan < 15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasiran dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.
- b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga jarang terjadi adanya gerakan tanah. Bahkan bila kondisi kelerengn diganggu tidak akan membentuk gerakan

tanah, karena tanah di daerah ini umumnya telah teguh. Gerakan tanah yang terjadi di jumpai di lereng-lereng sungai karena adanya gerusan aliran sungai.

Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar 0,3-5 m. Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai > 50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran kadang dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

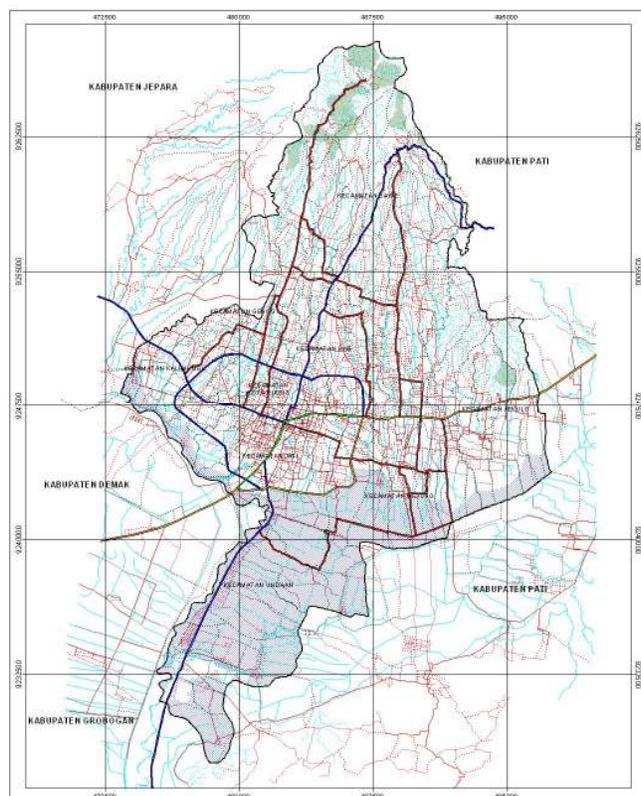
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga kadang-kadang terjadi adanya gerakan tanah, bila kondisi kelerengan diganggu. Karena tanah di daerah ini umumnya sebagian masih merupakan tanah lepas-lepas yang menumpang di batuan dasarnya. Gerakan tanah dijumpai di lereng-lereng yang terjal dan mengarah ke lembah sungai. Penyebab gerakan tanah di zona ini umumnya disebabkan oleh kondisi tanah yang belum teguh dan gerusan air sungai yang membentuk tebing terjal dan kelerengan tinggi. Tebal tanah berkisar antara 0,5-10 m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir-Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sering terjadi adanya gerakan tanah. Gerakan tanah lama maupun baru akan sering terjadi. Faktor penyebab gerakan tanah di daerah ini karena kondisi tanah lapuk yang menumpang di batuan segar, kelerengan terjal dan sebagian terjadi karena adanya penggundulan hutan. Tebal tanah berkisar 0,3 ->5m.

Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

Wilayah Kabupaten Kudus pada bagian utara merupakan wilayah dengan kelerengan 20% hingga lebih dari 45% yang didominasi jenis tanah latosol dan grumosol yang rawan longsor. Sedangkan wilayah bagian selatan relatif lebih datar, yang disusun oleh tanah alluvial yang bermanfaat bagi pertanian. Dengan kondisi ini menjadikan bagian selatan Kabupaten Kudus sebagai sentra pertanian yang subur. Wilayah pertanian ini rata-rata berada pada daerah cekungan yang merupakan pertemuan lembah Pegunungan Muria, Pegunungan Patiayam, dan Pegunungan Kendeng Utara, sehingga membuat daerah ini rawan terhadap bencana banjir. Wilayah Kabupaten Kudus yang rawan bencana banjir dan longsor seperti terlihat pada Gambar 1.2.



Sumber : RTRW Kabupaten Kudus 2012-2032

Gambar 1.2. Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Kudus

c. Jumlah penduduk;

Gambaran umum demografis meliputi gambaran tentang jumlah penduduk, rasio ketergantungan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2019	428.161	49.78	431.894	50,22	860.055
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079
2023	436.585	49,99	436.846	50,01	873.431

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

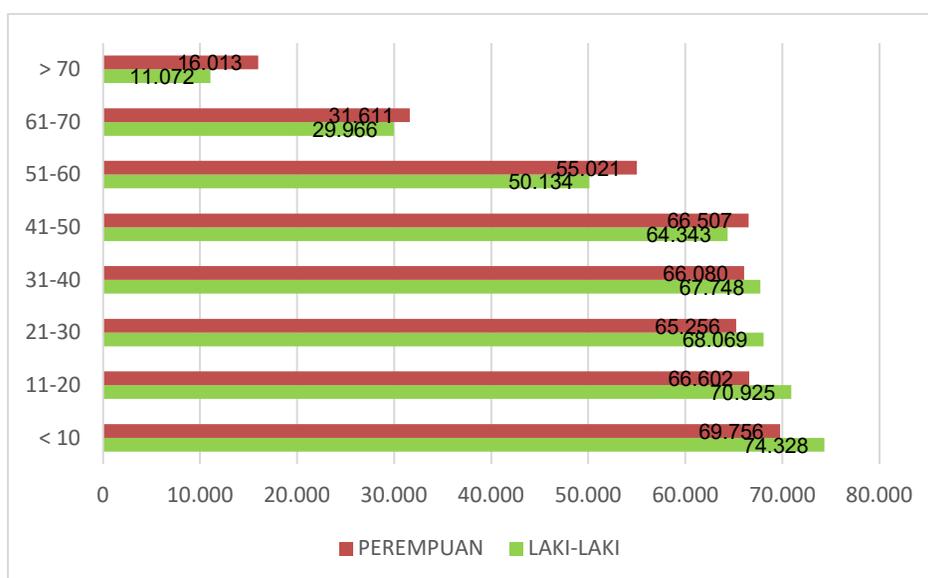
Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebanyak 433.802 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 434.277 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 873.431 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 436.585 orang atau sekitar 49,99% dan perempuan sebanyak 436.846 orang atau 50,01%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk laki-laki meningkat lebih banyak dibanding perempuan.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis
Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
≤ 10	74.328	69.756	144.084
11-20	70.925	66.602	137.527
21-30	68.069	65.256	133.325
31-40	67.748	66.080	133.828
41-50	64.343	66.507	130.850
51-60	50.134	55.021	105.155
61-70	29.966	31.611	61.577
> 70	11.072	16.013	27.085
Jumlah	436.585	436.846	873.431

Diolah dari : DKB Semester 2 Tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola *Aging Population* pada suatu daerah yang dapat berdampak pada *Dependency Ratio* (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus.



Grafik 1.1.
Jumlah Penduduk Per-usia Perjenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2023

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia > 10 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 144.084 jiwa terdiri perempuan 69.756 dan laki-laki 74.328 sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 11-20 tahun sebesar 137.527 jiwa terdiri dari perempuan 66.602 dan laki-laki 70.925.

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio*
di Kabupaten Kudus Tahun 2023

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2019	190.002	620.486	62.181	860.055	40,65
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40
2023	201.713	614.458	57.260	873.431	42,15

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 42,15.

Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

Tingkat pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak/Belum Sekolah	207.199	215.520	225.946	235.344	242.423
Tidak/Belum Tamat SD	63.716	64.338	62.373	59.661	57.637
Tamat SD/ sederajat	245.652	236.051	229.125	219.953	214.236
Tamat SLTP/ sederajat	144.957	146.140	144.005	140.876	139.680
Tamat SLTA/ sederajat	154.220	157.367	157.921	161.995	167.016
Akademi / Sarjana	44.311	46.553	47.835	50.250	52.439
Jumlah Penduduk	860.055	865.969	867.205	868.079	873.431

Sumber : DKB semester 2 Tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 adalah pada jenjang Tidak/Belum Sekolah yaitu 242.423 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/Sarjana mengalami peningkatan 2.189 orang atau naik 4,36 % dibandingkan tahun 2022.

d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan;

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan yang terbagi 123 desa dan 9 kelurahan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
1	Kec. Kaliwungu	1	Desa Bakalan Krapyak
		2	Desa Prambatan Kidul
		3	Desa Prambatan Lor
		4	Desa Garung Kidul
		5	Desa Setrokalangan
		6	Desa Banget
		7	Desa Blimbing Kidul
		8	Desa Sidorekso
		9	Desa Gamong
		10	Desa Kedungdowo
		11	Desa Garung Lor
		12	Desa Karangampel
		13	Desa Mijen
		14	Desa Kaliwungu
		15	Desa Papringan
2	KOTA	16	Kelurahan Purwosari
		17	Desa Janggalan
		18	Desa Demangan
		19	Kelurahan Sunggingan
		20	Kelurahan Panjunan
		21	Kelurahan Wergu Kulon
		22	Kelurahan Wergu Wetan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		23	Kelurahan Mlati Kidul
		24	Kelurahan Mlatinorowito
		25	Desa Mlati Lor
		26	Desa Nganguk
		27	Desa Kramat
		28	Desa Demaan
		29	Desa Langgardalem
		30	Desa Kauman
		31	Desa Damaran
		32	Kelurahan Kerjasan
		33	Kelurahan Kajeksan
		34	Desa Krandon
		35	Desa Singocandi
		36	Desa Glantengan
		37	Desa Kaliputu
		38	Desa Barongan
		39	Desa Burikan
		40	Desa Rendeng
3	Kec. Jati	41	Desa Jetiskapuan
		42	Desa Tanjungkarang
		43	Desa Jati Wetan
		44	Desa Pasuruhan Kidul
		45	Desa Pasuruhan Lor
		46	Desa Ploso
		47	Desa Jati Kulon
		48	Desa Getaspejaten
		49	Desa Loram Kulon
		50	Desa Loram Wetan
		51	Desa Jepangakis
		52	Desa Megawon
		53	Desa Ngembal Kulon
		54	Desa Tumpangkrasak
4	Kec. Undaan	55	Desa Wonosoco
		56	Desa Lambangan
		57	Desa Kalirejo
		58	Desa Medini
		59	Desa Sambung
		60	Desa Glagahwaru
		61	Desa Kutuk
		62	Desa Undaan Kidul
		63	Desa Undaan Tengah

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		64	Desa Karangrowo
		65	Desa Larikrejo
		66	Desa Undaan Lor
		67	Desa Wates
		68	Desa Ngemplak
		69	Desa Terangmas
		70	Desa Berugenjang
5	Kec. Mejobo	71	Desa Gulang
		72	Desa Jepang
		73	Desa Payaman
		74	Desa Kirig
		75	Desa Temulus
		76	Desa Kesambi
		77	Desa Jojo
		78	Desa Hadiwarno
		79	Desa Mejobo
		80	Desa Golantepus
		81	Desa Tenggeles
6	Kec. Jekulo	82	Desa Sadang
		83	Ds. Bulungcangkring
		84	Desa Bulung Kulon
		85	Desa Sidomulyo
		86	Desa Gondoharum
		87	Desa Terban
		88	Desa Pladen
		89	Desa Klaling
		90	Desa Jekulo
		91	Desa Hadipolo
		92	Desa Honggosoco
		93	Desa Tanjungrejo
		7	Kec. Bae
95	Desa Ngembalrejo		
96	Desa Karangbener		
97	Desa Gondangmanis		
98	Desa Pedawang		
99	Desa Bacin		
100	Desa Panjang		
101	Desa Peganjaran		
102	Desa Purworejo		
103	Desa Bae		

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
8	Kec. Gebog	104	Desa Gribig
		105	Desa Klumpit
		106	Desa Getasrabi
		107	Desa Padurenan
		108	Desa Karangmalang
		109	Desa Besito
		110	Desa Jurang
		111	Desa Gondosari
		112	Desa Kedungsari
		113	Desa Menawan
		114	Desa Rahtawu
9	Kec. Dawe	115	Desa Samirejo
		116	Desa Cendono
		117	Desa Margorejo
		118	Desa Rejosari
		119	Desa Kandangmas
		120	Desa Glagah Kulon
		121	Desa Tergo
		122	Desa Cranggung
		123	Desa Lau
		124	Desa Piji
		125	Desa Puyoh
		126	Desa Soco
		127	Desa Ternadi
		128	Desa Kajar
		129	Desa Kuwukan
		130	Desa Dukuhwaringi
		131	Desa Japan
		132	Desa Colo

e. Jumlah perangkat daerah, dan pegawai pemerintah;

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dengan :

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat DAerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus;

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B;

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.

Rincian jumlah perangkat daerah, unit kerja dan jumlah pegawai per unit kerja sebagaimana tabel 1.6.

Tabel 1.6
Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja dan pegawai

NO	OPD / UNIT KERJA	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	6
2	Bagian Hukum	11
3	Bagian Perekonomian	9
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9
5	Bagian Organisasi	11
6	Bagian Umum	29
7	Sekretariat DPRD	26
8	Badan Perenc. Pemb. Penelitian & Pengemb. daerah	30
9	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	67
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44
11	Inspektorat	43
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	32
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	135
14	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	41
15	Dinas Pertanian dan Pangan	86
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23
18	Dinas Perdagangan	111
19	Satuan Polisi Pamong Praja	47
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24

NO	OPD / UNIT KERJA	JUMLAH
22	Dinas Perhubungan	74
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	23
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25
26	Kecamatan Kota Kudus	20
27	Kelurahan Purwosari	8
28	Kelurahan Sunggingan	8
29	Kelurahan Panjunan	9
30	Kelurahan Wergu Wetan	11
31	Kelurahan Wergu Kulon	8
32	Kelurahan Mlati Kidul	8
33	Kelurahan Mlatinorowito	8
34	Kelurahan Kerjasan	8
35	Kelurahan Kajeksan	7
36	Kecamatan Jekulo	18
37	Kecamatan Gebog	19
38	Kecamatan Dawe	22
39	Kecamatan Kaliwungu	16
40	Kecamatan Jati	16
41	Kecamatan Undaan	16
42	Kecamatan Mejobo	20
43	Kecamatan Bae	16
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20
46	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	29
47	Bagian Administrasi Pembangunan	7
48	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8
49	Bagian Pemerintahan	8
50	Dinas Kesehatan	79
51	UPTD Puskesmas Bae	29
52	UPTD Puskesmas Dawe	48
53	UPTD Puskesmas Dersalam	27
54	UPTD Puskesmas Gondosari	28
55	UPTD Puskesmas Gribig	41
56	UPTD Puskesmas Jati	37
57	UPTD Puskesmas Jekulo	47
58	UPTD Puskesmas Jepang	36
59	UPTD Puskesmas Kaliwungu	45
60	UPTD Puskesmas Mejobo	43
61	UPTD Puskesmas Ngembal Kulon	30
62	UPTD Puskesmas Ngemplak	28
63	UPTD Puskesmas Purwosari	33
64	UPTD Puskesmas Rejosari	45
65	UPTD Puskesmas Rendeng	28
66	UPTD Puskesmas Sidorekso	30

NO	OPD / UNIT KERJA	JUMLAH
67	UPTD Puskesmas Tanjungrejo	40
68	UPTD Puskesmas Undaan	44
69	UPTD Puskesmas Wergu Wetan	30
70	RSUD Dr. LOEKMONO HADI	474
71	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	186
72	SMP 1 Kudus	36
73	SMP 2 Kudus	40
74	SMP 3 Kudus	34
75	SMP 4 Kudus	34
76	SMP 5 Kudus	42
77	SMP 1 Bae	34
78	SMP 2 Bae	33
79	SMP 3 Bae	30
80	SMP 4 Bae	28
81	SMP 1 Dawe	25
82	SMP 2 Dawe	32
83	SMP 3 Dawe	7
84	SMP 1 Gebog	37
85	SMP 2 Gebog	38
86	SMP 1 Jati	44
87	SMP 2 Jati	34
88	SMP 1 Jekulo	32
89	SMP 2 Jekulo	37
90	SMP 3 Jekulo	31
91	SMP 1 Kaliwungu	35
92	SMP 2 Kaliwungu	35
93	SMP 1 Mejobo	38
94	SMP 2 Mejobo	39
95	SMP 1 Undaan	26
96	SMP 2 Undaan	33
97	Korwil Kecamatan Bae	245
98	Korwil Kecamatan Dawe	412
99	Korwil Kecamatan Gebog	355
100	Korwil Kecamatan Jati	286
101	Korwil Kecamatan Jekulo	416
102	Korwil Kecamatan Kaliwungu	297
103	Korwil Kecamatan Kota	268
104	Korwil Kecamatan Mejobo	313
105	Korwil Kecamatan Undaan	251
	Jumlah	6.484

f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Sedangkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana tabel 1.7. berikut ini.

Tabel 1.7
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.236.981.707.370	2.276.162.193.662	101,75
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	473.691.698.000	502.330.185.468	106,05
Pajak Daerah	174.288.764.000	183.825.346.945	105,47
Retribusi Daerah	31.303.382.000	28.747.093.038	91,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.971.340.000	9.971.341.235	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	258.128.212.000	279.786.404.250	108,39
Pendapatan Transfer	1.760.590.009.370	1.772.596.008.194	100,68
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.555.772.702.570	1.584.707.611.484	101,86
Dana Bagi Hasil (DBH)	322.139.145.847	344.830.065.539	107,04
Dana Alokasi Umum (DAU)	773.667.161.000	783.691.043.815	101,30
Dana Alokasi Khusus (DAK)	309.953.161.723	306.173.268.130	98,78
Dana Insentif Daerah (DID)	13.267.148.000	13.267.148.000	100,00
Dana Desa	136.746.086.000	136.746.086.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	204.817.306.800	187.888.396.710	91,73
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.414.306.800	175.714.575.710	91,32
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.403.000.000	12.173.821.000	98,15
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
Pendapatan Hibah	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
BELANJA	2.625.194.437.466	2.384.900.384.445	90,85
Belanja Operasi	1.902.446.306.036	1.683.683.519.535	88,50
Belanja Modal	437.274.666.807	418.666.691.470	95,74
Belanja Tak Terduga	5.233.453.623	2.366.476.700	45,22
Belanja Transfer	280.240.011.000	280.183.696.740	99,98
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	390.912.730.096	390.912.730.096	100,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	390.912.730.096	390.912.730.096	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
Pembiayaan Netto	388.212.730.096	389.676.730.096	100,38

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 24 Januari 2024)

Tabel 1.8
Realisasi Belanja per Urusan

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1.608.699.164.847	1.444.860.757.037	89,82
	1.	Pendidikan	677.606.287.407	582.373.331.659	86,55
	2.	Kesehatan	615.289.851.901	557.276.606.575	82,17
	3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	188.561.172.428	184.045.921.265	94,75
	4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.568.280.007	25.189.875.096	94,97
	5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19.837.551.709	18.705.979.107	90,53
	6.	Sosial	79.836.021.395	77.269.043.335	95,88
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		220.768.214.050	209.048.935.091	94,69
	7.	Tenaga Kerja	17.618.772.643	14.947.991.289	66,44
	8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	657.104.477	500.920.109	77,03
	9.	Pangan	452.495.246	424.321.770	99,37
	10.	Pertanahan	549.998.650	342.478.300	65,04
	11.	Lingkungan Hidup	14.545.405.216	14.191.210.437	95,39
	12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.340.245.568	8.860.086.720	93,33
	13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.326.806.114	15.423.408.521	85
	14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.939.173.940	6.751.875.650	38,77
	15.	Perhubungan	65.212.684.254	62.629.292.667	93,99
	16.	Komunikasi & Informatika	35.471.295.739	34.291.621.804	96,18
	17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3.832.471.112	3.614.842.056	82,26
	18.	Penanaman Modal	5.203.173.652	4.754.560.889	85,67
	19.	Kepemudaan dan Olahraga	18.841.125.169	18.773.435.642	98,16
	20.	Statistik	136.036.000	97.469.310	85,02
	21.	Persandian	52.033.010	32.829.667	41,78
	22.	Kebudayaan	18.890.556.254	17.998.445.173	94,39
	23.	Perpustakaan	5.367.149.666	5.100.168.730	99,61
	24.	Kearsipan	331.687.340	313.976.357	91,72
C	Urusan Pilihan		90.193.544.604	81.471.010.531	90,33
	25.	Kelautan dan Perikanan	194.999.080	178.952.639	96,62
	26.	Pariwisata	5.400.360.800	5.187.173.179	91,79
	27.	Pertanian	29.765.769.220	28.443.591.704	93,79
	28.	Kehutanan	15.000.000	15.000.000	96
	29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.950.000	1.480.000	100
	30.	Perdagangan	26.524.128.269	23.085.157.462	77,71
	31.	Perindustrian	28.288.338.235	24.556.656.547	14,82
	32.	Transmigrasi	2.999.000	2.999.000	100

NO	URUSAN	ANGGARAN DAN REALISASI		
		Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
D	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	705.533.513.965	649.519.681.786	92,06
	33. Administrasi Pemerintahan	155.480.618.953	134.910.197.036	94,44
	34. Pengawasan	10.112.047.715	9.278.158.579	92,54
	35. Perencanaan	11.759.447.635	10.191.689.035	92,5
	36. Keuangan	316.872.862.372	309.838.598.646	95,45
	37. Kepegawaian	15.659.612.856	13.635.713.485	87,8
	38. Pendidikan dan Pelatihan	1.690.717.000	1.469.518.805	68,51
	39. Penelitian dan Pengembangan	831.600.000	494.075.113	95,72
	40. Sekretariat DPRD	95.182.188.176	75.935.587.850	77,69
	41. Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	69.198.188.411	65.718.408.073	95,59
	42. Kesatuan Bangsa dan Politik	28.746.230.847	28.047.735.164	95,13
	JUMLAH BELANJA	2.625.194.437.466	2.384.900.384.445	90,85

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 24 Januari 2024)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintahan daerah yaitu;

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2023, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 76,71 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2023 sebesar 9.34 dan harapan lama sekolah tahun 2023 sebesar 13.26. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain :

- Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat

menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, disamping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia antara lain semakin lemahnya pemahaman terhadap budaya bangsa, nilai-nilai “ke-Bhineka Tunggal Ika-an” dan nasionalisme, serta semakin tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang bisa berdampak pada kondusifitas Kabupaten Kudus. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

- Kesehatan
Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi pada tahun 2023 yaitu 7,82 per 1000 kelahiran hidup dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi yaitu 100,42 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Tata kelola pemerintahan.

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP dimana kondisi pada tahun 2023 sebesar 72,05, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

2. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman.

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan pada tahun 2023. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

3. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha.

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,41% (66 060 jiwa) pada tahun 2022 menjadi 7,24% (65.160 jiwa) pada tahun 2023. Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 5%. Angka kemiskinan

dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di Kudus pada tahun 2023 sebesar 3,25 %.

4. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*).

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di wilayah Kudus. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama *stakeholders*, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

b. Visi, Misi Bupati

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut : *Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera*

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah nomenklatur programnya mengacu pada regulasi dimaksud, Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Program-program daerah terinci sebagai berikut:

- Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
 - c) Program pendidikan non formal.
 - 2) Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program Pelayanan Kesehatan BLUD
 - c) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - d) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - e) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 - f) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- g) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan
 - c) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - d) Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - e) Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - f) Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
 - c) Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum.
 - d) Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e) Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 6) Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Kesra Setda dan Kecamatan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.

- b) Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial.
 - c) Program penanggulangan bencana daerah
 - d) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin.
- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 1) Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 - c) Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan.
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 3) Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan ketahanan pangan.
 - 4) Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan.
 - 5) Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - a) Program pengendalian dan konservasi lingkungan hidup.
 - b) Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup.
 - c) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

- 6) Admini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil strasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program pelayanan pendaftaran penduduk
 - c) Program pelayanan pencatatan sipil
 - d) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program peningkatan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Program fasilitasi pemerintahan desa.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana.
- 9) Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c) Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ.
 - d) d) Program peningkatan pengelola parkir dan terminal.
- 10) Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat DPRD
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi publik.
 - c) Program pengembangan teknologi dan sistem informasi.
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kecamatan

Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

- 12) Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
 - c) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - d) Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.
 - e) Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha.
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kecamatan dan Kelurahan
 - a) Program kepemudaan.
 - b) Program peningkatan kualitas dan sarana prasarana olahraga.
- 14) Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
- 15) Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Program pengelolaan persandian
- 16) Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
- 17) Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi Perpustakaan.
- 18) Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan.

- Urusan Pilihan
 - 1) Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
 - 2) Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program peningkatan dan pengembangan pariwisata.
 - 3) Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan
 - c) Program peningkatan produksi sarana prasarana peternakan.
 - 4) Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program pengelolaan taman hutan raya
 - 5) Energi dan sumber daya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Program pelayanan perizinan pemanfaatan energy dan sumber daya mineral
 - 6) Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program Pembinaan PKL dan asongan
 - c) Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen
 - d) Program peningkatan pengelolaan pasar
 - 7) Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
 - 8) Transmigrasi. dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi

- Fungsi penunjang urusan pemerintahan
 - 1) Administrasi Pemerintahan, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program fasilitasi tata pemerintahan
 - c) Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
 - d) Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi.
 - e) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
 - f) Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan
 - g) Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
 - h) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - i) Program peningkatan kesejahteraan rakyat
 - j) Program penyelenggaraan kehumasan
 - k) Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
 - l) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - 2) Pengawasan, dilaksanakan oleh Inspektorat
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - b) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
 - 3) Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum
 - b) Program perencanaan pembangunan daerah.
 - c) Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya
 - d) Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.

- 4) Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program peningkatan pendapatan daerah
 - c) Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah.
 - d) Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah.
 - e) Program pengelolaan perbendaharaan daerah.
 - f) Program pengelolaan aset daerah.
 - 5) Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Umum.
 - b) Program penyelenggaraan administrasi aparatur.
 - c) Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur.
 - 6) Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur.
- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
- Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 1) Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan, dilaksanakan:

 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
 - 2) Kesehatan
 - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman :
 1. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri Rumah Tangga
 2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Setra Makanan Jajanan
 4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota
 2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/ Kota
 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):
 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/ Kota
 - d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - e) Program Penataan Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - f) Program Penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - g) Program Penyelenggaraan Jalan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - h) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - a) Program pengembangan perumahan
 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

3. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- b) Program Kawasan Permukiman
 1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha
 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha
- c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - c) Program Penanggulangan Bencana
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- 6) Sosial
 - a) Program Pemberdayaan Sosial

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- b) Program Rehabilitasi Sosial
 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza Di Luar Panti Sosial
 - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 1) Tenaga kerja
 - a) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c) Program Penempatan Tenaga Kerja
 1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 3. Pelindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Program Hubungan Industrial
 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Program Perlindungan Perempuan
 - 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - c) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - d) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - e) Program Perlindungan Khusus Anak
 - Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 3) Pangan
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pertanian
 - a) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Penatagunaan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Lingkungan Hidup
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Penyimpanan Sementara Limbah B3

- e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - i) Program Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Sampah
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Program Pendaftaran Penduduk
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b) Program Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil
 - c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Program Penataan Desa
Penyelenggaraan Penataan Desa
 - b) Program Peningkatan Kerjasama Desa
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - c) Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Program Pengendalian Penduduk
 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/ Kota
 - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota
 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 9) Perhubungan.
 - a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
 7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota
 8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota
- 10) Komunikasi dan Informatika
- a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pngelolaan Aplikasi Informatika
 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - c) Program Pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- 12) Penanaman Modal
- a) Program Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota

- b) Program Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota
 - c) Program Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota
 - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota
 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota
 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- 14) Statistik
 - a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota
 - 15) Persandian
 - a) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 16) Kebudayaan
 - a) Program Pengembangan Kebudayaan
 - 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/ Kota
 - b) Program Pembinaan Sejarah
 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
 - c) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota
 - 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota
 - d) Program Pengelolaan Permuseuman
 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - 17) Perpustakaan
 - a) Program Pembinaan Perpustakaan
 - 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 18) Kearsipan
 - a) Program Pengelolaan Arsip
 - 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota
 - 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota
- Urusan Pilihan
- 1) Kelautan dan Perikanan
 - a) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- b) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 2) Pariwisata
 - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b) Program Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- 3) Pertanian
 - c) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 1. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kab/Kota
 - 2. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - d) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota
 - 2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kab/Kota
 - 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - e) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota

- f) Program Penyuluhan Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 4) Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kab/Kota
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Perdagangan
 - a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - 1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - 2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota
 - c) Program Pengembangan Ekspor
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 7) Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembagunan Industri
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- 8) Transmigrasi
 - a) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- fungsi penunjang urusan pemerintahan
 - 1) Sekretariat Daerah
 - a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Administrasi Tata Pemerintahan
 - 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - b) Program Perekonomian dan Pembangunan
 - 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - 2) Sekretariat DPRD
 - a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 7. Fasilitasi Tugas DPRD
 - 3) Perencanaan
 - a) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Keuangan
 - a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5) Kepegawaian
 - a) Program Kepegawaian Daerah
 1. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
 2. Mutasi dan Promosi ASN
 3. Pengembangan Kompetensi ASN
 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 1. Pengembangan Kompetensi Teknis
 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 7) Penelitian dan Pengembangan
 - a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 8) Pengawasan
 - a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 2. Pendampingan dan Asistensi
- 9) Kewilayahan (Kecamatan)
 - a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 10) Pemerintahan Umum (kesbangpol)
 - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

- c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

11) Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Peningkatan Pelayanan BLUD
10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
12. Penataan Organisasi
13. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
15. Layanan Administrasi DPRD

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan hak atas pelayanan dasar sesuai dengan jenis dan mutu layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya adalah pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Bentuk pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh Pemerintah selanjutnya diberikan batasan-batasan minimal khusus melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang substansinya merupakan pelayanan dasar minimal yang harus diberikan oleh Pemerintah kepada warga masyarakat. Urusan dimaksud meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketertarikan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan SPM sangatlah penting untuk diterapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-hak dasar yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar sesuai SPM serta menyediakan alokasi anggaran yang mencukupi untuk penerapannya.

Guna percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kudus memacu pelaksanaannya dengan menyusun Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten

Kudus, disamping membentuk Tim Penerapan melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/40/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus. Dengan dibentuknya Tim dimaksudkan untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam berkoordinasi dan konsolidasi internal guna penyelenggaraan pelayanan dasar yang lebih baik dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemenuhan SPM di Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan secara optimal dan terkoordinir berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dasar penerapan standar pelayanan minimal

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan landasan dalam penyelenggaraan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus;

9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/40/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.

c. Kebijakan umum

Standar Pelayanan Minimal memiliki tujuan yang sangat ideal dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara atas pelayanan dasar pada urusan wajib pemerintah daerah. Namun demikian penyediaan pelayanan dasar dengan memperhatikan standar pelayanan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kudus tidak semata-mata berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, melainkan bahwa hal tersebut merupakan pula wujud kebijakan visi dan misi Kepala Daerah sebagai top manager Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Perlu dikemukakan bahwa dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, telah ditetapkan indikator-indikator yang terkait dengan upaya peningkatan pelayanan dasar baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki komitmen yang serius agar setiap warga dapat memperoleh jaminan kualitas dari hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pencapaian pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan dasar sebagai berikut :

- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp.182.847.480.475,- dengan serapan realisasi mencapai 94.73 %.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.6,533,373,898,- dengan serapan realisasi mencapai 94,15%.

- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pekerjaan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp.7,122,479,000,- dengan serapan realisasi mencapai 97.64%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Perumahan Rakyat dialokasikan anggaran sebesar Rp.15,823,500,- dengan serapan realisasi mencapai 98.35 %.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp.6,626,708,475,- dengan serapan realisasi mencapai 89.99 %.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp.1,040,950,550,- dengan serapan realisasi mencapai 83.76 %.

d. Arah Kebijakan Penerapan SPM

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menuangkan rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan beberapa penyesuaian pada nomenklatur program dan kegiatan.

Langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menegaskan komitmen untuk segera melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut :

- Mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi terkait dengan urusan wajib dan pilihan untuk segera melakukan penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM dengan target tahunan yang disesuaikan dengan ketentuan tenggang tahun pencapaiannya ;
- Melakukan pengintegrasian Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM pada masing-masing bidang ke dalam dokumen perencanaan dan kegiatan dengan melibatkan TAPD
- Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib yang menjadi prioritas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus.

Sedangkan rencana arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kudus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 diprioritaskan sebagaimana tabel berikut:

TABEL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2018-2023

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023
<p>Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing, dengan prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan; 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan; 3. Penguatan ekonomi kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur; 6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	<p>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi kreatif; 2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa; 3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	<p>Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia; 2. Tata Kelola Pemerintah; 3. Kehidupan yang tertib, aman, nyaman; 4. Daya Saing Ekonomi dan kesempatan berusaha; 5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. 	<p>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi; 2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah; 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	<p>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Penguatan Daya Saing Daerah; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,89	76,71	1,081
2	Angka Kemiskinan	7,41	7,24	-2,294
3	Angka Pengangguran	3,21	3,25	1,246
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,21	2,19	-0,095
5	Pendapatan Per Kapita	132.340.000	138.700.000	4.806
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,379	0,350	-7.652

Sumber data : BPS Kabupaten Kudus

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan		Pendidikan PAUD			
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	310	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	370	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidika	484	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2.097	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	2.097	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1187	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	357	Orang	Disdikpora
			Pendidikan Dasar			
		1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	397	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	73.127	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.395	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.478	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	506	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	776	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1563	Orang	Disdikpora
		9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	365	Orang	Disdikpora
		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	336	Orang	Disdikpora
		11	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	204	Orang	Disdikpora
			Pendidikan Menengah Pertama			
		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	27	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	69.443	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.555	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.212	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	215	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	266	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	716	Orang	Disdikpora
		9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	42	Orang	Disdikpora
		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	184	Orang	Disdikpora
Pendidikan Kesetaraan						
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	230	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	230	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	152	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat	0	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
			pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	18	Orang	Disdikpora
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	8	Unit	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	18	Unit	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.381		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	3.141	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.381		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan,persalinan sesuai standar	3.208	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.306		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3.208	Orang	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68.881		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3176		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	126.115		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3.214	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	575.509		Dinas Kesehatan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.241	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	94.958		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.241	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	236.225		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.241	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.329		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.241	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.166		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.285	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.366		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.535	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	19.874		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.295	Orang	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	610,16	Ha	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	17.702	M	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Nihil	Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada wilayah pantai	M	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak ada	Jumlah	Dinas PUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	Tidak ada	Ha	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Tidak ada	Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak ada	Jumlah	Dinas PUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	90,28	%	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	90,28	%	Dinas PUPR
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	90,02	%	Dinas PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	1 Dok	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	1 Dok	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaran SPAM	Tidak ada	BUMD/UPTD	Dinas PUPR
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Izin	Dinas PUPR
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada	Kerja sama	Dinas PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2.056	Rumah	Dinas PUPR
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1.356	Rumah	Dinas PUPR
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3.812	Rumah	Dinas PUPR
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1.336	Rumah	Dinas PUPR
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1.336	Rumah	Dinas PUPR
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1.356	Rumah	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	31,18	%	Dinas PUPR
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	15,66	%	Dinas PUPR
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	23,55	%	Dinas PUPR
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	87,90	%	Dinas PUPR
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	54,96	%	Dinas PUPR
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	9,54	%	Dinas PUPR
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	87,90	%	Dinas PUPR
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	16,11	%	Dinas PUPR
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota						
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	%	Dinas PUPR
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	683	Izin	Dinas PUPR
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	1	Bangunan	Dinas PUPR
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	0	Bangunan	Dinas PUPR
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota	3.714	Bangunan	Dinas PUPR
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat	152	Bangunan	Dinas PUPR
Rasio kemantapan jalan						
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/ kota	639.262	M	Dinas PUPR
		2	Panjang jalan yang dibangun	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		3	Panjang jembatan yg dibangun	Tidak ada	M	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan	26.592,90	M	Dinas PUPR
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	44,8	M	Dinas PUPR
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	61.214,83	M	Dinas PUPR
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		8	Panjang jalan yang dipelihara	11.109,00	M	Dinas PUPR
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	197	M	Dinas PUPR
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli				
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota	0	Orang	Dinas PUPR
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota	177	Orang	Dinas PUPR
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	177	Orang	Dinas PUPR
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kabupaten/kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	66	Badan Usaha	Dinas PUPR
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/ kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	izin	Dinas PUPR
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Pengawasan	Dinas PUPR
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Kecelakaan Konstruksi	Dinas PUPR
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Pengawasan	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten				
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	22.433,00	Unit	Dinas PKPLH
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	32	Unit	Dinas PKPLH
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	128	Orang	Dinas PKPLH
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1	Unit	Dinas PKPLH
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Unit	Dinas PKPLH

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	Unit	Dinas PKPLH
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	99	Unit	Dinas PKPLH
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3	Orang	Dinas PKPLH
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	NIHIL	Ha	Dinas PKPLH
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten				
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	RT	Dinas PKPLH
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	NIHIL	Ha	Dinas PKPLH
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani				
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha	145,40	Ha	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	409	Unit	Dinas PKPLH
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	136,814	Ha	Dinas PKPLH

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
		1	Jumlah rumah di kab/kota	247.595	Rumah	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit PK RTLH	409	Rumah	Dinas PKPLH
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	6.365	Rumah	Dinas PKPLH
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	7.428	Rumah	Dinas PKPLH
		5	Rasio rumah dan KK	1,18	%	Dinas PKPLH
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	881		Dinas PKPLH
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	23	Perumahan	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	6.137	Rumah	Dinas PKPLH
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	6.137	Rumah	Dinas PKPLH
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi(on site / off site)	6.137	Rumah	Dinas PKPLH
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	12	Perumahan	Dinas PKPLH
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	6.137	Rumah	Dinas PKPLH
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	20	Pengembang	Dinas PKPLH
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	20	Pengembang	Dinas PKPLH
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Nihil	Pengembang	Dinas PKPLH
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	510	Jumlah	Satpol PP
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4.244	Orang	Satpol PP
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	44	Perda& Perkada	Satpol PP
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Orang	Satpol PP
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	10	SOP	Satpol PP
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	1	Ada	Satpol PP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	%	BPBD
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	%	BPBD
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	%	BPBD
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	%	BPBD
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	%	BPBD
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	BPBD
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	%	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota	88	Layanan	Satpol PP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Nihil	Pos	Satpol PP
		3	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Nihil	Orang	Satpol PP
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Nihil	Pos	Satpol PP
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3	Sarpras	Satpol PP
		6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	31	Orang	Satpol PP
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Nihil	Orang	Satpol PP
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	1	Keg	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
		1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	4	layanan	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM	37	orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	1	tim	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dijangkau	1121	orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	1 unit mobil rescue	unit	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	792	Orang	DinsosP3A P2KB
		7	Jumlah Rumah Singgah/ Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar	1	unit	DinsosP3A P2KB
		8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang	53	Orang	DinsosP3A P2KB
		9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu	64	Orang	DinsosP3A P2KB
		10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter	1 kursi roda 2 kruk	unit	DinsosP3A P2KB
		11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia	1	Paket	DinsosP3A P2KB
		12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan	5	Orang	DinsosP3A P2KB
		13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah	-		DinsosP3A P2KB
		14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	1 orang Peksos 9 orang TKSK 77 orang PKH 23 orang Tagana	Orang	DinsosP3A P2KB
		15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	198	Orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	198 keluarga		DinsosP3A P2KB
		17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	10	orang	DinsosP3A P2KB
		18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20	orang	DinsosP3A P2KB
		19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	5	orang	DinsosP3A P2KB
		20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Direunifikasi dg Keluarga	5	Orang	DinsosP3A P2KB
		21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dirujuk	27	Orang	DinsosP3A P2KB
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				
		1	Jumlah korban bencana yg mendapatkan makanan	3.239	Orang	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	80	Orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	132 desa/kel	Penampungan	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	20	Paket	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	100	Orang	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	110 org : 1 orang Peksos 9 orang TKSK 23 orang Tagana 77 orang PKH	Orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
7	Tenaga Kerja	Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	ada	Ada/Tidak	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	99,91	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	5	Perusahaan	Disnaker perinkop UKM
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	78,31	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,33	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	17,07	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Jumah penganggur yang dilatih	2.175	orang	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		8	Persentase penyerapan lulusan	64,01	%	Disnaker perinkop UKM
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	100	%	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	93,95	%	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	4	Pelatihan	Disnaker perinkop UKM
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Data tingkat produktivitas total	0,97	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	65,78	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Konfederasi SPISB : 1 Federasi SPISB : 6 SPISB di perusahaan : 70 SP/SB diluar perusahaan : 107 Anggota SP/SB di Perusahaan: 79.482	SP/SB	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,73	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Jumlah Mogok Kerja	0	Mogok	Disnaker perinkop UKM
		8	Jumlah Penutupa Perusahaan	0	Perusahaan	Disnaker perinkop UKM
		9	Jumlah Perselisihan Kepentingan	0	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan	13	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah Perselisihan PHK	54	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		12	Jumlah Pekerja / Buruh yang Ter-PHK	41	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		13	Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite	1	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan	1	LKS	Disnaker perinkop UKM
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	69,23	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kab dalam 1 (satu) daerah kab				
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab	3.095	Lowongan Kerja	Disnaker perinkop UKM
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3.831	Orang	Disnaker perinkop UKM
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab	26	BKK	Disnaker perinkop UKM
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota	94	Orang	Disnaker perinkop UKM
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	8	Orang	Disnaker perinkop UKM
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab	0	Lembaga	Disnaker perinkop UKM
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab	264	Perjanjian	Disnaker perinkop UKM
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2.904	orang	Disnaker perinkop UKM
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	281	Orang	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	281	Orang	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Fasilitas Kepulangan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Pendidikan & Pelatihan Kerja	93,95	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan Keluarganya	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		14	Jumlah Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Yang Dibentuk (layanan TKI / PMI)	50,00	%	Disnaker perinkop UKM
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
		1	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab Yang Telah Dilatih PUG	34 OPD 27 Desa	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Program PUG di Pemda yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kab	24	Prog/ Keg	DinsosP3A P2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				
		1	Jumlah Media Massa Yang Pernah Berkerjasama Untuk Melakukan "KIE" Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	5	Media Massa	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Telah Memiliki SPM	13	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		3	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani	100	%	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Pelatihan	6	lembaga	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan/ Fasilitas Oleh Pemkab/Kota (APBD Kab)	2	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak				
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	3	organisa si	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	4	Orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemkab	2 JPPA dan forum anak	Lemba ga	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	tdk ada	Kebijakan/Program	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%	DinsosP3A P2KB
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan				
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	18	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		2	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.250	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	18	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	10	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan oleh Bupati	100	%	Dinas PUPR
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	%	Dinas PUPR
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	tidak ada		Dinas PUPR
		4	Dokumen Izin membuka tanah	tidak ada		Dinas PUPR
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kab	tidak ada		Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten				
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :			Dinas PKPLH
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)	52,67		Dinas PKPLH
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,92		Dinas PKPLH
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	35,72		Dinas PKPLH
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten				
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	84,63	%	Dinas PKPLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten				
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	96,55	%	Dinas PKPLH
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	0,0032	%	Dinas PKPLH
		3	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten	0	%	Dinas PKPLH
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	%	Dinas PKPLH		
5	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	100,00	%	Dinas PKPLH		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik				
		1	Penerbitan akta perkawinan	100	%	Dinas Dukcapil
		2	Penerbitan akta perceraian	100	%	Dinas Dukcapil
		3	Penerbitan akta kematian	100	%	Dinas Dukcapil
	4	Penyajian data kependudukan	150	%	Dinas Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	Desa	Dinas PMD

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Desa	Dinas PMD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	Lemba ga	Dinas PMD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	Desa	Dinas PMD
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	113	Desa	Dinas PMD
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4	Desa	Dinas PMD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5719	Lemba ga	Dinas PMD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	113	Desa	Dinas PMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR				
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Ada/ Tidak	DinsosP3A P2KB
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20-25	Nilai Tengah	DinsosP3A P2KB
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	242	orang	DinsosP3A P2KB
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	4,78	%	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	7	Stakeholder	DinsosP3A P2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	%	DinsosP3A P2KB
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,19	%	DinsosP3A P2KB
		3	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	21	kampung KB	DinsosP3A P2KB
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	39,54	%	DinsosP3A P2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
		1	Persentase kesertaan KB di kab dgn kesertaan rendah	43,94	%	DinsosP3A P2KB
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	59,17	%	DinsosP3A P2KB
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kota				
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	200	%	Dishub
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	0,68	%	Dishub
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	78,30	%	Dishub
		V/C Ratio di Jalan kota				
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten aatau kota	91,93	%	Dinas Perhubungan
19	Komunikasi dan Informatika	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Ada/ Tidak	Dinas Kominfo
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi				
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	5,58	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	93,94	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	%	Dinas Kominfo
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	69,64	%	Dinas Kominfo
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	12,82	%	Dinas Kominfo
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	64,44	%	Dinas Kominfo
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	36,75	%	Dinas Kominfo
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	%	Dinas Kominfo
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	%	Dinas Kominfo
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	%	Dinas Kominfo
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	75,7	%	Dinas Kominfo
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Ada/tidak	Dinas Kominfo
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kabupaten				
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabuapten/ kota	100	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84,31	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,82	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	77,85	%	Disnaker perinkop UKM
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	60,13	%	Disnaker perinkop UKM
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota	60,13	%	Disnaker perinkop UKM
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	60,13	%	Disnaker perinkop UKM
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/ kota	92,41	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota	60,13	%	Disnaker perinkop UKM
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha				
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3,52	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	79,42	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	2,57	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,77	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	4,16	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	5,49	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	4,51	%	Disnaker perinkop UKM
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten				
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	3,034	Ada/ Tidak	Dinas PMPTSP
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PMPTSP
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Jumlah Laporan	Dinas PMPTSP
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	1	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	3024 perizinan 156 non perizinan	Jumlah Konsultasi	Dinas PMPTSP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	14.459	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP
		9	Laporan realisasi penanaman modal	1.693.083.360.000	(Rupiah)	Dinas PMPTSP
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kabupaten/kota	22		Dinas PMPTSP
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	282	Perusahaan	Dinas PMPTSP
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	19	Ada/Tidak	Dinas PMPTSP
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	262	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Orang	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	101	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	60	Orang	Disdikpora
		Peningkatan Prestasi Olahraga				
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	130	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	8	Event	Disdikpora
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		1	Tersedianya buku profil daerah	ada	Ada/tidak	Dinas Kominfo
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	6	Jumlah Survey	Dinas Kominfo
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	10	Jml kompilasi	Dinas Kominfo
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	Jumlah Survey	Dinas Kominfo
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	2	Jumlah Kompilasi	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100	%	Dinas Kominfo
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	%	Dinas Kominfo
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	0	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen	81,11	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	6,67	%	Dinas Kominfo
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS)	84,85	%	Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya				
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	110	Obyek	Disbudpar
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	4	Obyek	Disbudpar
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1	Obyek	Disbudpar
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Orang	Disbudpar
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	26	Cagar Budaya	Disbudpar
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	296	Cagar Budaya	Disbudpar

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	0	Cagar Budaya	Disbudpar
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	3	Cagar Budaya	Disbudpar
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	103	Cagar Budaya	Disbudpar
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	520	Koleksi	Disbudpar
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	79.859	Orang	Disbudpar
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			Disbudpar
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Tim	Disbudpar
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	1	Tim	Disbudpar
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Tim	Disbudpar
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	41	Orang	Disbudpar
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	2	Orang	Disbudpar
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	12	Unit	Disbudpar
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	24	Kegiatan	Disbudpar
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	182,05		Dinas Arpus
			Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	14,15	%	Dinas Arpus
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,06	%	Dinas Arpus
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,66	%	Dinas Arpus

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	160	kali	Dinas Arpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1	Naskah Kuno	Dinas Arpus
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	Dinas Arpus
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	116 buku	Budaya Etnis	Dinas Arpus
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	%	Dinas Arpus
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	%	Dinas Arpus
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	19,33	%	Dinas Arpus
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	24,16	%	Dinas Arpus
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2.155	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	10.740	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinss Arpus
Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)				
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	560	orang	Dispertan pangan
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	%	Dispertan pangan
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan	0	Izin	Dispertan pangan
		4	Jml pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	170	Pembudidaya	Dispertan pangan
		5	Jml benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	117.669.750	Benih	Dispertan pangan
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	75		Disbudpar
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	715		Disbudpar
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota	672	TDUP	Disbudpar
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11	orang	Disbudpar
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	14	Kegiatan	Disbudpar
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota	0	keg	Disbudpar
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	95	Industri	Disbudpar
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	11,08		Disbudpar

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	63,58		Disbudpar
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	30	Lokasi	Disbudpar
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	97	Unit	
		2	Prasaran pertanian yang digunakan	97		
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	160	dok	
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100	%	
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	60,63	%	
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dok	Dinas PUPR
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	11		Dinas PUPR
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	2,513		Dinas PUPR
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		Dinas PUPR
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota				
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/tidak	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			Dinas Perdagangan
			a. Pusat perbelanjaan	0	%	
			b. Toko swalayan	100	%	
		2	presentas epenerbitan TDG	91,67	%	Dinas Perdagangan
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	10,38		Dinas Perdagangan
		4a	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
		4b	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota	0,00	%	Dinas Perdagangan
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	%	Dinas Perdagangan
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	9,00	%	Dinas Perdagangan
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	60,30	%	Dinas Perdagangan
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	0,00	Pengaduan	Dinas Perdagangan
		2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	0,00	Konsumen	Dinas Perdagangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk				
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	21595,477 / 22368		Dinas Perdagangan
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	6,56	%	Dinas Perdagangan
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	%	Dinas Perdagangan
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota				
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	0,00	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	50	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait				

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri kecil yang diterbitkan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di ka/kota	100		Disnaker perinkop UKM
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Kawasan	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Permukiman	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,57	%	Disdikpora
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,96	%	Disdikpora
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,48	%	Disdikpora
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92,8	%	Disdikpora
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,6		Dinas Kesehatan
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100,00	%	Dinas Kesehatan
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,07	%	Dinas Kesehatan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%	Dinas Kesehatan
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,94	%	Dinas Kesehatan
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,68	%	Dinas Kesehatan
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	%	Dinas Kesehatan
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,05	%	Dinas Kesehatan
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92,84	%	Dinas Kesehatan
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,24	%	Dinas Kesehatan
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,35	%	Dinas Kesehatan
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	92,33	%	Dinas Kesehatan
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	106,77	%	Dinas Kesehatan
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	%	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100	%	Dinas PUPR
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	tidak ada wilayah pantai	%	Dinas PUPR
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	90,28	%	Dinas PUPR

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	98,60	%	Dinas PUPR
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	Dinas PUPR
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	%	Dinas PMPTSP
		25	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	94,69	%	Dinas PUPR
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	43,49	%	Dinas PUPR
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	%	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	%	Dinas PKPLH
		28	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Nihil	%	Dinas PKPLH
		29	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	94,09	%	Dinas PKPLH
		30	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,57	%	Dinas PKPLH
		31	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00	%	Dinas PKPLH
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	%	Satpol PP
		33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	%	Satpol PP
		34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	84.995	Orang	BPBD
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	73.170	Orang	BPBD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	87.596	Orang	BPBD
		37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	BPBD
		38	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,75	Menit	Satpol PP
6	Sosial	39	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	96,20	.%	Dinsos P3AP2KB
		40	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	%	Dinsos P3AP2KB
7	Tenaga Kerja	41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	94,74	%	Disnaker Perinkop UKM
		42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	70,11	%	Disnaker Perinkop UKM
		43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	15092934 564,43		Disnaker Perinkop UKM
		44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	91,64	%	Disnaker Perinkop UKM
		45	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	70,40	%	Disnaker Perinkop UKM
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100,00	%	Dinsos P3AP2KB
		47	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100	%	Dinsos P3AP2KB
		48	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Per 100.000	Dinsos P3AP2KB
9	Pangan	49	Persentase cadangan pangan	201,12	%	Dispertan Pangan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
10	Pertanahan	50	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	%	Dinas PUPR
		51	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	60,93	%	Dinas PUPR
		52	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100,00	%	Dinas PUPR
		53	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,00	%	Dinas PUPR
		54	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0,00	%	Dinas PUPR
		55	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%	Dinas PUPR
11	Lingkungan Hidup	56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	60,80	%	Dinas PKPLH
		57	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	84,63	%	Dinas PKPLH
		58	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	17,72	%	Dinas PKPLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	59	Perekaman KTP Elektronik	99,66	%	Dinas Dukcapil
		60	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	74,74	%	Dinas Dukcapil
		61	Kepemilikan akta kelahiran	99,96	%	Dinas Dukcapil
		62	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	33,33	%	Dinas Dukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63	Persentase pengentasan desa tertinggal	tdk ada desa tertinggal	%	Dinas PMD
		64	Persentase peningkatan status desa mandiri	85,71	%	Dinas PMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,11		Dinsos P3AP2KB
		66	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,49	%	Dinsos P3AP2KB

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		%	Dinsos P3AP2KB
15	Perhubungan	68	Rasio konektivitas kabupaten	0,68		Dishub
		69	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,59		Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	70	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		71	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	66,67	%	Dinas Kominfo
		72	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab	100	%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	73	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	71,52	%	Disnaker Perinkop UKM
		74	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100	%	Disnaker Perinkop UKM
18	Penanaman Modal	75	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	14,67	%	Dinas BMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	76	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,99	%	Disdikpora
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	73,10	%	Disdikpora
		78	Peningkatan prestasi olahraga	3	Medali	Disdikpora
20	Statistik	79	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	%	Dinas Kominfo
		80	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	%	Dinas Kominfo
21	Persandian	81	Tingkat keamanan informasi pemerintah	50,23		Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	82	Terlestarikannya Cagar Budaya	78,31	%	Disbudpar
23	Perpustakaan	83	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51,19	%	Dinas Arpus
		84	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	64,63	%	Dinas Arpus

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
24	Kearsipan	85	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	59,5	%	Dinas Arpus
		86	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	33,3	%	Dinas Arpus
Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	87	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	2763.59	Ton	Dispertan Pangan
26	Pariwisata	88	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1.572,73	%	Disbudpar
		89	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	77,00	%	Disbudpar
		90	Tingkat Hunian akomodasi	27,45	%	Disbudpar
		91	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7,48	%	Disbudpar
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,24	%	Disbudpar
27	Pertanian	93	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,6	ton	Dispertan Pangan
		94	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0	%	Dispertan Pangan
28	Kehutanan			Tidak Perlu Diisi		
29	ESDM	95	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	0,00	%	
30	Perdagangan	96	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	100	%	Dinas Perdagangan
		97	Persentase kinerja realisasi pupuk	16010	%	Dinas Perdagangan
		98	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	6,56	%	Dinas Perdagangan
31	Perindustrian	99	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0,43	%	Disnaker Perinkop UKM

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	96,12	%	Disnaker Perinkop UKM
		101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	%	Disnaker Perinkop UKM
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	%	Disnaker Perinkop UKM
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0,00	%	Disnaker Perinkop UKM
		104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		Disnaker Perinkop UKM
32	Transmigrasi					

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,84	%	BPPKAD
		2	Persentase PAD	22,07	%	BPPKAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3	Level	Inspektorat
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3	Level	Inspektorat
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	15,49	%	BPPKAD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Inspektorat
					WTP	
					WTP	
					WTP	
34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00	%	Bagian PBJ
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	70,96	%	Bagian PBJ
		9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	46,13	%	Bagian PBJ
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	233,52		Bagian PBJ
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	51,76	%	BKPSDM
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,33	%	BKPSDM
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00	%	BKPSDM
36	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-6,24	%	BPPKAD
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-16,91	%	BPPKAD
		15	Assets management	4,00	Jumlah	BPPKAD
				KIB A s/d KIB E	ya	
				Permendagri No. 47 Tahun 2021	ya	
				Rekon 1 th sekali	ya	
				Rekapitulasi Barang ke Neraca	ya	
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	12,59	%	BPPKAD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
37	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	114,55	,%	Dinas Kominfo
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	37,50	%	Dinas Kominfo

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Harapan Lama Sekolah	14,90
2.	Rata-rata lama sekolah	9,20
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	88,00
4.	Angka Harapan Hidup	76,54
5.	Angka Kematian Ibu	52,78
6.	Angka Kematian Bayi	6,9
7.	Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita	11.413,19

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	90
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	83,00
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87
13.	Indeks Rasa Aman	0,53
14.	Indeks Toleransi	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	144,87
16.	Angka Kemiskinan	5,9
17.	Angka Pengangguran	2,90
18.	Nilai Investasi	9,19 T
19.	Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	83,73
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,77

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Harapan lama sekolah	14,90	13,26	88,99
2.	Rata-rata lama sekolah	9,20	9,34	101,52
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	88,00%	90,40%	102,73%
4.	Angka Harapan Hidup	76,54	76,86	100,42
5.	Angka Kematian Ibu	52,78	82,67	43,37
6.	Angka Kematian Bayi	6,9	7,82	86,67
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	11.413,19	12.088,00	105,91
8	Indeks Reformasi Birokrasi	90	71,36	79,29
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	83,00	72,05	86,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Masih dalam proses	

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	89,33	105,09
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87	4,23	147,39
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,98	15,09
14.	Indeks Toleransi	100%	100%	100%
15.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	144,87	138,70	95,74
16.	Angka Kemiskinan	5,9	7,24	77,29
17.	Angka Pengangguran	2,90	3,25	87,29
18.	Nilai Investasi	9,19 T	11,80 T	128,4
18..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	83,73	85,43	102,03
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,77	60,80	89.72

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun dalam sebelumnya

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun					
		2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harapan Lama Sekolah	14,67	13,24	90,32	14,90	13,26	88,99
2.	Rata-rata lama sekolah	9,01	9,06	100,55	9,20	9,34	101,52
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,77%	87,87%	100,11	88,00%	90,40%	102,73
4.	Angka Harapan Hidup	76,52	76,78	100,30	76,54	76,86	100,42
5.	Angka Kematian Ibu	52,78	88,24	32,82	52,78	82,67	43,37
6.	Angka Kematian Bayi	7,1	5,96	116,06	6,9	7,82	86,67
7.	Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita	11.271,84	11.609,00	102,99	11.413,19	12.088,00	105,91
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	85	69,21	81,42	90	71,36	79,29
9.	Nilai Akutabititas Kinerja	81,00	71,13	87,81	83,00	72,05	86,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	88,31	105,76	85	89,33	105,09

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kerja Tahun					
		2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,68	3,38	126,12	2,87	4,23	147,39
13.	Indeks Rasa Aman	0,53	0,86	162,26	0,53	0,98	184,91
14.	Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	139,78	126,95	90,82	144,87	138,70	95,74
16.	Angka Kemiskinan	6,1	7,41	82,32	5,9	7,24	77,29
17.	Angka Pengangguran	3,05	3,21	95,02	2,90	3,25	87,93
18.	Nilai Investasi	8,79 T	10,30 T	117,18	9,19 T	11,80 T	128,4
19.	Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	82,72%	84,86	102,59	83,73	85,43	102,03
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,56	54,88	82,45	67,77	60,80	89,72

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1.	Harapan Lama Sekolah	94,63	93,17	91,69	90,32	14,90	13,26	88,99	14,90	88,99
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	102,94	100,69	100,55	9,20	9,34	101,52	9,20	101,52
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	103,80	98,39	100,11%	88,00	90,40%	102,73%	88,00%	102,73%
4.	Angka Harapan Hidup	100,03	100,14	100,35	100,30	76,54	76,86	100,42	76,54	100,42
5.	Angka Kematian Ibu	89	28,67	-54,68	32,82	52,78	82,67	43,37	52,78	43,37
6.	Angka Kematian Bayi	95	89,86	107,53	116,06	6,9	7,82	86,67	6,9	86,67
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita	104,33	101,55	101,27	102,99	11.413,19	12.088,00	105,91	11.413,19	105,91
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	90,89	85,46	81,42	90	71,36	79,29	90	79,29
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	94,13	95,08	92,60	87,81	83,00	72,05	86,81	83,00	86,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses		WTP	Masih dalam proses
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	105,87	104,67	105,76	85	89,33	105,09	85	105,09

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	131,06	98,83	126,12	2,87	4,23	147,39	2,87	147,39
13.	Indeks Rasa Aman	161,54	103,77	83,02	162,26	0,53	0,98	184,91	0,53	184,91
14.	Indeks Toleransi	100 %	91,67	91,67	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	99,59	96,77	94,51	90,82	144,87	126,95	95,74	144,87	95,74
16.	Angka Kemiskinan	99,70	86,67	81,71	82,32	5,9	7,24	77,29	5,90	77,29
17.	Angka Pengangguran	85,49	29,84	80,32	95,02	2,90	3,25	87,93	2,90	87,93
18.	Nilai Investasi	77,25	42,12	472,90	117,18	9,19 T	11,80 T	128,4	9,19 T	128,4
19.	Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	101,26	103,06	102,30	102,59	83,73	85,43	102,03	83,73	102,03
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	100,84	96,05	82,45	67,77	60,80	89,72	67,77	89,72

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang dicapai

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	Proporsi lama sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang
		Rata-rata lama sekolah	Partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Harapan lama sekolah	94,63	93,17	91,69	90,32	14,90	13,26	88,99	14,90	88,99
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	102,94	100,69	100,55	9,20	9,34	101,52	9,20	101,52
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	103,80	98,39	100,12	88,00	90,40	102,73	88,00%	102,73
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	98,90	99,97	96,92	97,00			97,74		97,74

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 97,74%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,74% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 97,00%.

Perhitungan Capaian s/d 2023 akhir RPJMD Tahun 2023

$$\% \text{ Capaian Akhir RPJMD Tahun 2023} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi 2023}}{\text{Realisasi 2023}} \times 100\%$$

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 :

1. Harapan lama sekolah $\frac{14,90 - 13,26}{13,26} \times 100\% = -12,37\%$
2. Rata-rata lama sekolah $\frac{9,20 - 9,34}{9,34} \times 100\% = 1,50\%$
3. Persentase (%) akses dan mutu pendidikan $\frac{88,00 - 90,40}{87,87} \times 100\% = 2,65\%$

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Harapan lama sekolah tahun 2023 sebesar 88,99%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,33% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 90,32%, Realisasi Tahun 2023 sebesar 13,26 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 13,25 mengalami kenaikan sebesar 0,01

Meningkatnya dari Realisasi Tahun 2023 sebesar 13,26 dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 13,25 menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,26 tahun atau setara dengan D-2. Faktor yang mendukung realisasi ini adalah tersedianya lembaga pendidikan hingga kepedesaan meningkat sehingga akses masyarakat untuk bersekolah hingga perguruan tinggi.

Program yang mendukung Realisasi Harapan Lama Sekolah adalah Program Peningkatan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus sebesar Tahun 2023 mengalami peningkatan sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan menjadi 13,26 dibandingkan 12,85 (Jawa Tengah), maknanya penduduk di Kabupaten Kudus telah mengenyam pendidikan rata – rata di jalur perguruan tinggi.

- b. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus adalah 9,34 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk sekolah sampai kelas 3 SMP.

Meningkat dari target yaitu 9,20 dengan realisasi sebesar 9,34. Faktor yang mempengaruhi angka ini adalah partisipasi sekolah dimana tingkat atau fokus tertinggi yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat juga ijazah dari jenjang dari jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat.

Program yang mendukung realisasi rata-rata lama sekolah adalah program peningkatan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah dasar, Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia dini, dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (8,01)

Peningkatan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Efektifitas tersebut karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat secara optimal sehingga berpengaruh pada tingkat kelulusan peserta didik menjadi 100% yang berimbas pada capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah.

- c. Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) akses dan mutu pendidikan tahun 2023 sebesar 100,73%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,61% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,12%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 90,40 % apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 87,87% mengalami kenaikan sebesar 2,53%.

Persentase Akses dari Mutu

Dari Target tahun lalu 2023 sebesar 88,00, Realisasi sebesar 90,40. Realisasi tersebut dipengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Presentase Sekolah atau lembaga terakreditasi A pada jenjang pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan masyarakat.

Faktor yang mendukung APM adalah kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dari jenjang PAUD hingga SMP Meningkatkan.

- Angka Kelulusan adalah kelulusan tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional melainkan oleh sekolah sehingga sekolah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk meluluskan siswa meski tetap berpedoman pada ketentuan nasional.
- Sekolah Atau Lembaga yang terakreditasi yang meningkat dipengaruhi jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat. Program yang mendukung realisasi Presentase Akses dan Mutu adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Meningkatkan kualitas pendidikan berindikator persentase akses dan mutu pendidikan daerah semakin menurun karena ada penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar, akreditasi jenjang PAUD dan Dikmas yang perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Ketiga indikator tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
4. Program Pengembangan kapasitas kepemudaan

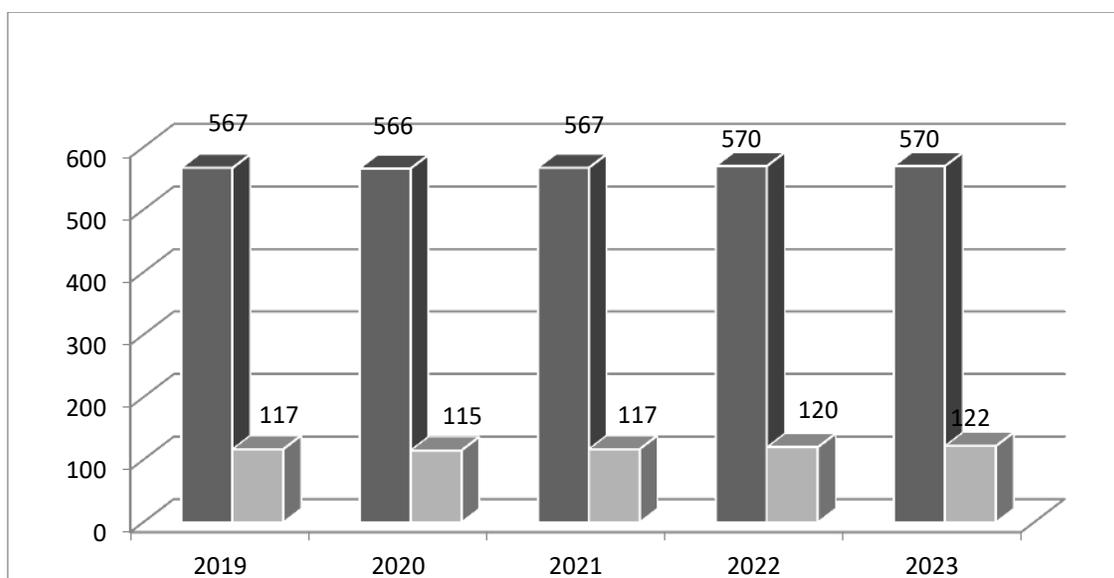
Penurunan target tersebut disebabkan karena faktor :

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar.
- b. Akreditasi jenjang PAUD.
- c. Pendidikan Masyarakat perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan adalah 97,74% atau Sangat tinggi

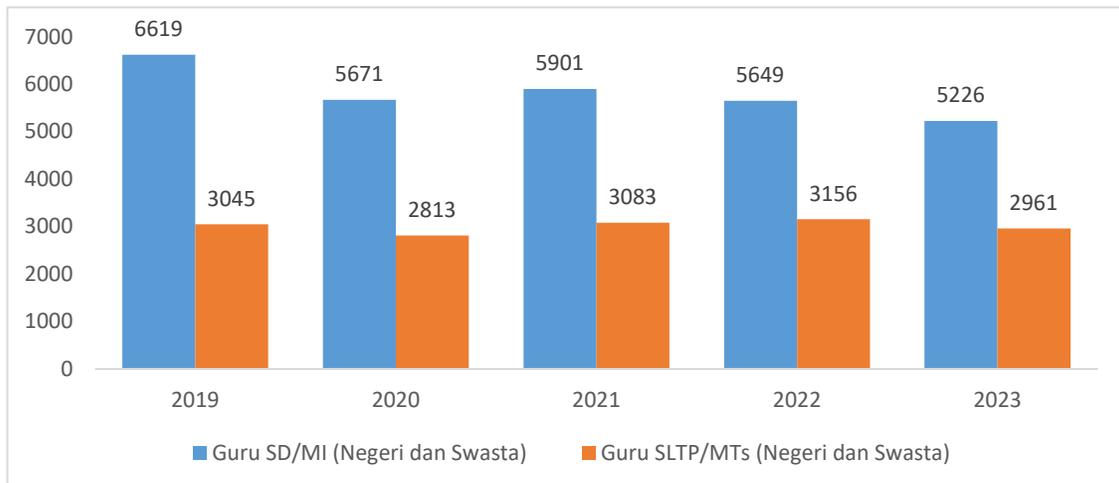
Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam dunia Pendidikan dapat dilihat dari Penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, berikut jumlah sekolah tingkat dasar, guru dan murid di Kabupaten Kudus:

Grafik 3.1.
Banyaknya Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



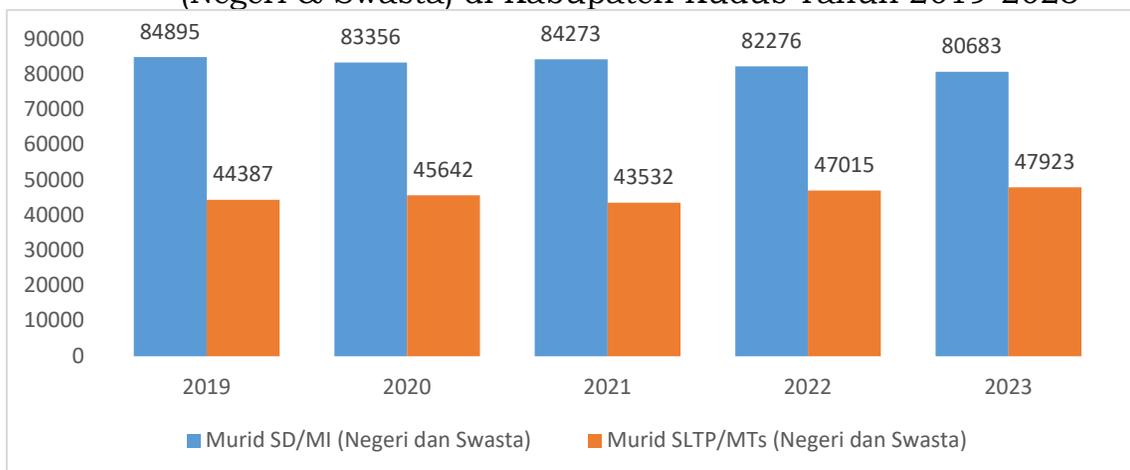
Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Grafik 2.2
Banyaknya Guru untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs
Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Grafik 2.3
Banyaknya Murid untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Penduduk yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta selama periode tahun 2023 – 2024 secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di setiap jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pendidikan dasar yaitu SD (Negeri dan Swasta) di tahun ajaran 2023/2024 jumlah murid yang bersekolah mengalami penurunan 1.593 murid. Untuk pendidikan SLTP (Negeri dan Swasta) juga mengalami kenaikan jumlah murid sebesar 908 murid.

Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Pada tahun ajaran 2023/2024, tersedia jumlah SD sebanyak 424 unit dan MI sebanyak 146 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 52 dan 68 unit.

Jumlah universitas / perguruan tinggi pada tahun akademik 2023/2024 tercatat ada 8 buah, yaitu Universitas Muria Kudus (UMK) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus, Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), AKBID Mardi Rahayu, AKBID Penda, Akper Krida Husada dan Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus.

**Penghargaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kudus Tahun 2023**

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
1.	Anugrah Merdeka Belajar Kategori Pemerintah Daerah Transformatif Sub Kategori Program Indonesia Pintar	Kemdikbudristek RI	2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	Terbaik I Apresiasi GTK GTK Inovatif Pada Satuan PAUD Tingkat Provinsi	Pos Paud Sidomakmur Dawe	2023	Siti Rohmatun	
3	Terbaik II Apresiasi GTK GTK Inovatif Pada Satuan PAUD Tingkat Provinsi	TPA Bintang Kecil Gebog	2023	Tika Budi Kartika	
4.	Juara I Porseni IGTKI PGRI Tari Kreasi Baru Tingkat Provinsi	IGTKI PGRI Kabupaten Kudus	2023	Tim Tari Kreasi Baru	

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
5.	Juara 2 Porseni IGTKI PGRI Alat Peraga Tingkat Provinsi	TK Pertiwi Kluwukan Dawe	2023	Miftah Faris	
6.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Matematika Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	SMP Keluarga Kudus	2023	Celine Jovita P.	
7.	Juara I Menyanyi Solo Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional	SMP 1 Kudus	2023	Grisalda Jeth Jan'ma Gayatri	
8.	Juara I Mendongeng Putra Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Jawa Tengah	SD 6 Cendono Dawe Kudus	2023	M. El Fito Cahya Jatmika	
9.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Matematika Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	SMP Keluarga Kudus	2023	Feivel Yonathan Susanto	
10.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	SMP 4 Bae Kudus	2023	SMP 4 Bae Kudus	
11.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	SMP 3 Bae, SMP 4 Bae, dan SMP IT Al Islam Kudus	2023	SMP 3 Bae, SMP 4 Bae, dan SMP IT Al Islam Kudus	

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur
		Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000
		Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Angka Harapan Hidup	100,03	100,14	100,35	100,31	76,54	76,86	100,42	76,54	100,42
2.	Angka Kematian Ibu	89	28,67	-54,68	32,82	52,78	82,67	43,37	52,78	43,37
3.	Angka Kematian Bayi	95	89,86	107,53	116,06	6,9	7,82	86,67	6,9	86,67
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,68	72,89	51,07	83,06			76,86		76,86

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, LKj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 76,81%. Angka tersebut kurang sebesar 6,25% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 83,067%

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Angka Harapan Hidup } \frac{76,86}{76,54} \times 100\% = 100,42\%$$

- | | |
|------------------------|--|
| 2. Angka Kematian Ibu | $\frac{52,78 - (82,67-52,78)}{52,78} \times 100\% = 43,37\%$ |
| 3. Angka Kematian Bayi | $\frac{6,90 - (7,82-6,90)}{6,90} \times 100\% = 86,67\%$ |

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 100,42%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,11% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,31%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 76,84 dipengaruhi oleh:

1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja 97,77 %
2. Cakupan pelayanan pengendalian penyakit dengan capaian kinerja 92,80%
3. Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan dengan capaian kinerja 96,73%

apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 76,76 telah mengalami penurunan sebesar 0,07

Faktor pendukung keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat serta terlibat langsung pada gerakan hidup bersih dan sehat pada setiap lini kehidupan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya sosialisasi upaya promotif dan preventif dari tenaga kesehatan dengan optimalisasi pemanfaatan media sosial sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat meningkat
4. Peningkatan system rujukan pada kasus kegawatdaruratan lebih terkoordinasi dengan baik
5. Kemampuan deteksi dini kasus serta pengambilan keputusan yang tepat meningkat
6. Kapasitas SDM Kesehatan meningkat
7. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar meningkat status akreditasinya sehingga kualitas pelayanan meningkat
8. Sarana prasarana penunjang kesehatan terpenuhi sesuai standar

Program/kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :

- 1) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan.

- 2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular, dengan senantiasa melibatkan lintas sektoral dan lintas program
- 3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Ibu Tahun 2023 sebesar 43,37%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 32,82% terjadi peningkatan karena dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 10,55%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 82,67 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 88,24 Permasalahan/penyebab penurunan pada pencapaian target Angka Kematian Ibu pada Tahun 2023 masih belum optimal karena (11) sebelas kasus kematian terbanyak penyebabnya karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu perdarahan 6 kasus , Pre eklamsia / eklamsia 1 kasus, efusi pleura 1 serta penyakit penyerta yaitu 2 kasus kanker payudara dan 1 kanker rektum.

Berbagai upaya telah dilakukan meliputi meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi baru lahir berupa peningkatan jumlah kunjungan ANC dari 4 kali menjadi 6 kali yaitu 1 kali pada kehamilan trimester pertama, 2 kali pada kehamilan trimester kedua dan 3 kali pada kehamilan trimester ke tiga, kontak dengan dokter spesialis kandungan minimal 2 kali serta pemeriksaan triple eliminasi yaitu pemeriksaan hepatitis B, HIV dan sifilis, persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir berupa penguatan antenatal, persalinan dan post natal sesuai standar.

Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2023 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% sedangkan di Kabupaten Kudus turun menjadi 22,88%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu

tua, Terlalu banyak, dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti efusi pleura akibat peradangan pada paru . Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan.

Upaya yang telah ditempuh adalah penerapan konsep safe motherhood yaitu penguatan “Keluarga Berencana”, memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan, penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :

- 1) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada iu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN,
- 2) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
- 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.
- 4) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

Berdasarkan analisis program kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Analisa kegagalan /faktor pendukung kegagalan pencapaian target berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten tahun 2023 penyebab kematian terbanyak akibat penyulit kehamilan dan persalinan yaitu 7 kasus dari 11 kasus kematian ibu yaitu 63,63%, penyakit penyerta sebanyak 4 kasus yaitu 36,36 % karena penyakit penyerta yaitu efusi pleura dan kanker.

Strategi yang digunakan untuk menutunkan angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Penguatan puskesmas dan jaringannya
2. Penguatan manajemen program
3. Peningkatan peran serta masyarakat
4. Penguatan kerjasama dan kemitraan melalui forum komunikasi masyarakat
5. Penguatan akselerasi dan inovasi dengan cara optimalisasi aplikasi Si BULAN dalam rangka percepatan system rujukan kasus kegawatdaruratan maternal neonatal
6. Audit Kematian Ibu
7. Peningkatan upaya protif dan preventif faktor penyebab kematian langsung maupun tidak langsung

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Bayi tahun 2023 sebesar 86,67%. Angka tersebut menurun sebesar 29,39 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 116,06%. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus kematian bayi di Kabupaten Kudus sejumlah 104 bayi dari total kelahiran hidup dalam 1 (satu) tahun sejumlah 13.306 bayi x 1.000 kelahiran hidup.

Realisasi Tahun 2023 sebesar 7,82 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 5,96 mengalami kenaikan sebesar 1,86

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi sebanyak 104 kasus:

1. Asfiksia sebanyak 20% yaitu kasus kegagalan bayi baru lahir untuk bernafas secara spontan dan teratur
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 26% karena belum kematangan organ yang disebabkan persalinan sebelum waktunya atau premature.
3. Kelainan kongenital sebanyak 11% karena kegagalan pertumbuhan (proses embryogenesis) saat hamil yang menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan.
4. Terkonfirmasi covid 19 dan lainnya sebanyak 43%

Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi

pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi dengan sosialisasi dan penempelan stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) di rumah ibu hamil.

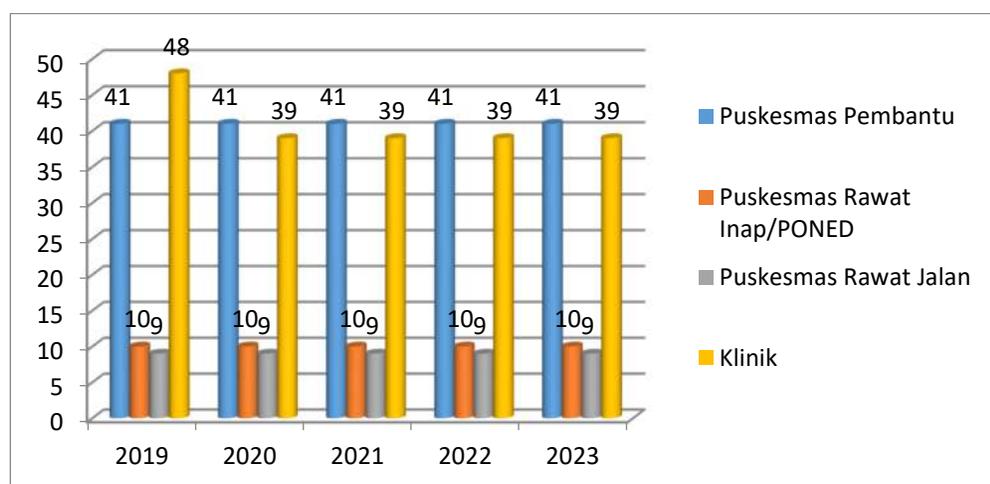
Upaya penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 dilaksanakan melalui:

1. Pelaksanaan program kunjungan neonatal yang optimal.
2. Memberikan asuhan bayi baru lahir melalui pemberian pelayanan.
3. Deteksi dini tanda bahaya.
4. Menjaga kehangatan dan pemberian ASI.
5. Mencegah infeksi dan pendarahan dengan memberikan vitamin K injeksi untuk menurunkan resiko kesakitan dan kematian.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 76,86% atau Tinggi

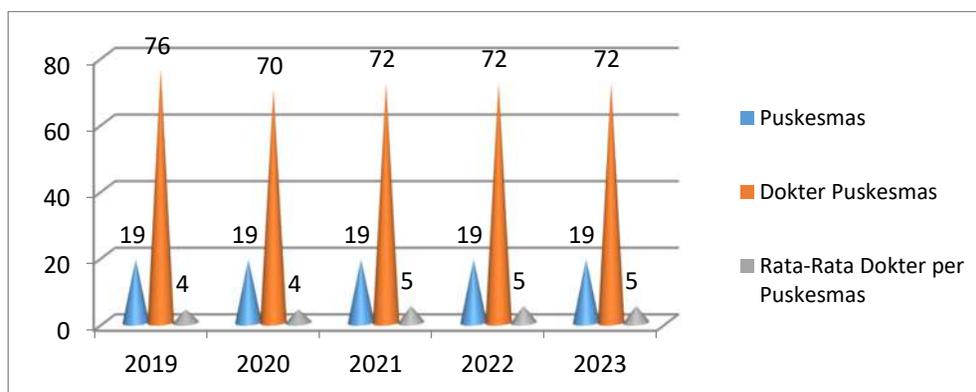
Sarana dan prasarana Kesehatan di Kabupaten Kudus

Grafik 2.4
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat
Di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber data : DKK Tahun 2023

Grafik 2.5
Banyaknya Puskesmas dan Rata-Rata Dokter Tiap Puskesmas di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023



Sumber data : DKK Tahun 2023

Pada tahun 2023 sarana kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan sarana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga pedesaan jumlahnya mencapai 19 buah. Upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka dilaksanakan akreditasi dengan status sebagai berikut :

- Status akreditasi madya sejumlah 13 Puskesmas
- Status akreditasi utama sejumlah 4 Puskesmas
- Status akreditasi dasar sejumlah 2 Puskesmas

Sarana kesehatan lainnya, yang membantu kinerja Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pembangunan di bidang Kesehatan tidak lepas dari jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus saat ini sudah terakreditasi dengan Status Paripurna.

3. Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	Total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga (dalam ribu rupiah perorang pertahun)

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran Kemampuan Konsumsi Masyarakat
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	104,33	101,55	101,27	102,99	11.413,19	12.088,00	105,91	11.413,19	105,91
2.	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	104,33	101,56	101,27	102,99			105,91		105,91

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 105,91%. Angka tersebut meningkat sebesar 2,92% dari capaian kinerja sasaran tahun 2022 sebesar 102,99%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 juga turun sebesar 2,92%.dari 102,99%.

Perhitungan Capaian s/d 2023 akhir RPJMD Tahun 2023

$$\% \text{ Capaian Akhir RPJMD Tahun 2023} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi 2023}}{\text{Realisasi 2023}} \times 100\%$$

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita} \quad \frac{11.413,19 - 12.088,00}{12.088,00} \times 100\% = 5,58\%$$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita tahun 2023 sebesar 105,91%. Angka tersebut naik sebesar 2,92% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102,99%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 12.088,00 sama dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 11.609,00.

Realisasi sebesar 12.088,00 adalah dari Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Angka-angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Faktor yang mendukung keberhasilan kemampuan konsumsi masyarakat

Masih diterapkannya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat akibat pandemic covid19 pada tahun 2023, kecenderungan tingkat konsumsi masyarakat per kapita justru terjadi peningkatan. Salah satu factor yang mempengaruhi adalah, dengan terbatasnya pergerakan masyarakat, maka keinginan untuk melakukan aktivitas konsumtif dalam rumah justru semakin meningkat, apalagi didukung dengan semakin mudahnya layanan belanja via online.

Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
4. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Faktor penyebab keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat pada tahun 2023 mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena faktor terjaganya stabilitas harga-harga barang terutama kebutuhan pokok serta kondusifitas wilayah yang cenderung stabil. Meskipun terjadi penurunan produktivitas masyarakat ditinjau dari segi lapangan usaha, namun untuk pengeluaran konsumsi masyarakat masih dapat dipertahankan dengan menjaga ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok dan terjaminnya stabilitas harga barang.

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan antara lain adalah monitoring ketersediaan barang dan harga barang secara rutin oleh tim pengendalian inflasi daerah.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 105,91 % atau Sangat Tinggi.

4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Realisasi Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN & RB
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Penerapan SPBE dari Kementerian PAN & RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	90,89	85,47	81,42	90	71,36	79,29	90	79,29
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,13	95,08	92,60	87,81	83	72,05	86,81	83	86,81
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA		WTP	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	105,87	104,67	105,76	85	89,33	105,09	85	105,09
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	131,06	98,83	126,12	2,87	4,23	147,39	2,87	147,39
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	102,32	104,58	95,39	100,28			104,05		104,05

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bagian Organisasi, BPPKAD, Dinas Kominfo Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 104,05%. Angka tersebut melampaui sebesar 3,77% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 100,28%.

Perhitungan Capaian s/d 2023 akhir RPJMD Tahun 2023

1. Indeks Reformasi Birokrasi $\frac{90,00 - 71,36}{71,36} \times 100\% = -26,12\%$
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja $\frac{83,00 - 72,05}{72,05} \times 100\% = -16,85\%$
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) WTP x 100% = WTP
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) $\frac{85,00 - 89,33}{88,31} \times 100\% = 4,85\%$
5. Indeks Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) $\frac{2,87 - 4,23}{3,38} \times 100\% = 132,15\%$

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 79,29% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,13% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 81,42%

Tahun 2023 Kabupaten Kudus untuk Hasil Evaluasi RB dengan Nilai 71.36 dengan predikat Nilai BB pada tanggal 6 Februari 2024 dari KemenPAN RB. Untuk Catatan dan Rekomendasi dari Komponen RB General sebagai berikut :

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
1.	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	1 Terdapat Output atas Rencana Aksi yang belum relevandan cukup sebagai ukuran keberhasilan Rencana Aksi	1 Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran
			2 Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	2 Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2.	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General		

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan		Rekomendasi
3.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	1	baik	1 Agar Perkada tentang SOTK mempedomani model penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi yang telah ditetapkan oleh MenpanRB sesuai surat MenpanRB Nomor B/467/KT.01 /2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tindak lanjut mekanisme penyederhanaan struktur organisasi saat ini agar berkoordinasi dengan KemenpanRB
4.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	1	segera ditetapkan menjadi peraturan	1 segera ditetapkan menjadi peraturan
5.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	Sasaran tidak berorientasi hasil	1 Menyusun Cascading berjenjang sesuai denganpermenpan RB 89 tahun 2021 tentang penjenjangan
			2	Indikator tidak berorientasi pada hasil	2 Sosialisasi SPIP-T dan MR
			3	Target tidak SMART 4.	
			4	Pengendalian yang ada belum efektif	
			5	Keterjadian risiko tidak dipantau	
			6	Risiko kecurangan belum dikelola	
6.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1	Cukup	1 Terlampir pada LHE ZI Unit Kerja

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan		Rekomendasi
7.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Sangat Baik	1 Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah
8.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
9.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip		Penjelasan terkait hasil tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
10	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah diselesaikan	1	Belum menyampaikan Renaksi, Waktu tindak lanjut masih lama	1 Perlu Menyusun Renaksi dan Mempercepat Laju Tindak Lanjut
11	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan			
12	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	1	Pelaksanaan Reformasi Hukum cukup.	1 Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.
13	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Kudus masih berada pada predikat Cukup. - Penerapan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN)berkelanjutan Terkait penyebarluasan data, walidata Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan sosialisasi hasil- hasil kegiatan statistik kepada publik melalui Portal Satu Data Kabupaten Kudus yang terintegrasi 	1 Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menyusun suatu kebijakan /kaidah baku/ petunjuk teknis tentang penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, Keterbandingan dan Konsistensi yang berlaku untuk seluruh produsen data.

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
			dengan Portal Satu Data Indonesia. - Penerapan Aspek Relevansi Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Aksesibilitas, telah dilakukan oleh produsen data, namun masih berdasarkan kepentingannya masing-masing	
14	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	1 Baik	1 Selamat dan tingkatkan prestasi yang sudah diraih.
15	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit		1 Agar menetapkan SKJ JPT dan JA;
				2 Agar melaksanakan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara berkala;
				3 Agar melaksanakan pemetaan talenta Instansi setiap level jabatan;
				4 Agar menyusun rencana suksesi sebagai hasil dari pemetaan talenta yang disesuaikan dengan pola karier Instansi, jabatan target, dan kompetensi teknis pegawai;
				5 Agar mengelola profil individu pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja termasuk analisis kesenjangan dan area pengembangan dengan memanfaatkan sistem informasi dan diperbarui secara berkala atau real time;

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				6 Agar menyusun dan melaksanakan strategi/program pengembangan kompetensi dan kinerja jangka menengah sesuai dengan kebutuhan individu pegawai dan organisasi baik dalam bentuk klasikal maupun non-klasikal;
				7 Agar menetapkan kebijakan internal terkait pola karier Instansi serta tata cara promosi mutasi pegawai yang mengacu pada manajemen talenta;
				8 Agar melaksanakan penilaian dan pengayaan kinerja secara periodik sesuai dengan perencanaan kinerja secara berjenjang disertai dialog kinerja sebagai media analisis permasalahan kinerja pegawai
				9 Agar menyusun analisis permasalahan kinerja pegawai dan strategi untuk mengatasi permasalahan.
16	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik		
17	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		
18	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
19	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator		

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
		Kinerja Utama Makro		
20	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Non Makro		
21	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK		
22	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi		
23	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlikak	Cukup Sehat	
24	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	Waspada	<p>Rekomendasi 1 : Perbaiki mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.</p> <p>Rekomendasi 2 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/penge lolaan gratifikasi di instansi. (2) Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/ gratifikasi. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi.

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				<p>(4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/ gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.;</p> <p>Rekomendasi 3 : Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan</p> <p>Rekomendasi 4 : Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan</p>

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.</p> <p>(4) Mengintensifkan penggunaan vendor management system.</p> <p>(5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.</p> <p>(6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;</p>
				<p>Rekomendasi 5 Mempertahankan, menginovasikan, danmemonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.;</p>
				<p>Rekomendasi 6 : Mempertahankan, menginovasikan, danmemonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/ kegiatan.;</p>

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				<p>Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.;</p>
				<p>Rekomendasi 8 : Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.;</p>
				<p>Rekomendasi 9 : Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan (3) Evaluasi dan memotret sudut Pandan pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan</p>

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
25	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat		Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten
26	Koefisien	Koefisien		

Untuk Catatan dan Rekomendasi dari Komponen RB Tematik sebagai berikut :

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
27	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	Penetapan sasaran belum sepenuhnya Menjawab permasalahan utama pada tema terkait	Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait
			Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
28	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
29	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)		
30	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)		
31	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
			dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
32	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)		
33	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)		
34	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)		
35	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)		
36	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)		
37	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)		
38	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)		
39	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)		
40	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)		
41	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)		

- b. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 sebesar 86,81% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,00% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 87,81%

Tahun 2023 Kabupaten Kudus mendapatkan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan predikat Nilai BB pada tanggal 27 November 2022 dari KemenPAN RB. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah di melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun RPD Tahun 2024-2026 dan telah menyelesaikan penyusunan Renstra seluruh perangkat daerah (PD) yang mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Perencanaan level Pemda yang tertuang dalam RPD maupun renstra PD yang mengacu pada RPD juga telah memenuhi kriteria baik, yaitu kinerja yang lebih berorientasi hasil, tepat level pengampu, dan penetapan target telah menyesuaikan kondisi capaian periode sebelumnya;
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja pada dengan memperhatikan prinsip logis, salah satunya ditemukan pada DPMPTSP terkait kinerja peningkatan nilai realisasi investasi;
3. Pengembangan aplikasi e-sakip terintegrasi sehingga target kinerja organisasi dapat terbagi hingga pada target individu;
4. Penyesuaian pedoman evaluasi AKIP PD yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021

- c. Angka capaian kinerja IKU Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) tahun 2023 Masih dalam proses dari BPK.

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang lebih efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Hasil Evaluasi dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai dengan Tahun 2023 sudah 11 (sebelas) kali dengan hasil WTP.

- d. Angka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 105,09% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,67% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 105,76%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 89,33 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 88,31

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat sebanyak 4 kali dengan hasil rata-rata pencapaian 89,33% dengan katagori Baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh:

- Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
 - Telah dilaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka partisipasi masyarakat untuk perbaikan layanan publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
 - Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik yang dilaksanakan serentak mulai triwulan 1 s.d triwulan IV;
 - Dilaksanakan evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dengan nilai 96,11 berkategori Zona hijau kategori kualitas tertinggi.
- e. Angka capaian kinerja IKU Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 sebesar 147,39%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 21,27% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 126,12%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 4,23 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 3,38.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kanteknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja T ata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPB yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Untuk memetakan kondisi implementasi e-government secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi SPBE di instansi pusat maupun daerah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi ini berisikan nilai indeks SPBE, nilai indeks domain dan aspek, kekuatan dan kelemahan, rekomendasi serta nilai dari masing-masing indikator yang diharapkan memberi gambaran terhadap penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada implementasi kebijakan, tata kelola serta layanan SPBE. Berdasarkan evaluasi KEMENPANRB, indeks SPBE Kabupaten Kudus pada tahun 2023 mencapai nilai sebesar 4,23 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 3,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

Nama Indeks	Nilai				
	2019	2020	2021	2022	2023
SPBE	2,73	3,08	2,53	3,38	4,23
Domain Kebijakan SPBE	2,53	3,12	2,30	3,90	4,60
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,29	3,43	2,30	3,90	4,60
Domain Tata Kelola SPBE	2,7	2,90	1,90	3,00	4,40
Perencanaan Strategi SPBE	2,14	2,43	1,75	2,75	4,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,00	2,50	3,50	5,00
Penyelenggara SPBE	2,5	3,00	1,00	2,50	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00	2,36	2,73
Penerapan Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00	2,75	3,00
Audit TIK	2,33	2,33	1,00	1,33	2,00
Domain Layanan SPBE	3,09	3,39	3,49	3,82	4,57
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	3,43	3,70	3,70	4,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,5	3,33	3,17	4,00	4,67

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Kebijakan Internal pada indikator Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus

- Kelemahan

Pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Perencanaan Strategis SPBE pada indikator Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Perencanaan Strategis SPBE Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencanan dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Penyelenggara SPBE pada indikator Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Pada aspek Penyelenggara SPBE, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Penerapan Manajemen SPBE pada indikator Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen

Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya Indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Audit TIK pada indikator Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi

SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kab. Kudus masih belum memiliki aturan terkait Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dimana tidak ditemukan regulasi yang mengatur secara komprehensif berdasar bukti dukung yang disampaikan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan

Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kab. Kudus sudah memiliki Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur terkait Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang baru sampai tahap transaksi aplikasi layanan ini bisa dikembangkan ke araha kolaborasi dan integrasi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kab. Kudus adalah dengan adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik pada indikator Layanan Pengaduan

Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab. Kudus
- **Kelemahan**
Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Kab. Kudus tidak memiliki kelemahan

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 104,65% atau Sangat tinggi.

5. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama

Realisasi Sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%
		Indeks Toleransi	Nilai Rata-rata presentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik social yang tertangani

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Toleransi Umat Beragama Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Indeks rasa aman	161,54	103,77	83,02	162,26	0,53	0,98	184,91	0,53	184,91
2.	Indeks Toleransi	100 %	91,67	91,67	100%	100%	100%	100	100	100
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	130,77	97,72	87,35	131,13			142,45		142,45

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2022 dan LKjIP Satpl PP Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 142,45%. Angka tersebut melebihi sebesar 11.32% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 131,13%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

- Indeks Rasa aman $\frac{0,53 - 0,98}{0,53} \times 100\% = 45,92\%$
- Indeks Toleransi $\frac{100 - 100}{100} \times 100\% = 100,00\%$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks rasa aman tahun 2022 sebesar 184,91%. Angka tersebut melebihi sebesar 22,65% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 162,26%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 0,98 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 0,86 mengalami peningkatan sebesar 0,12.

Perhitungan Indeks Rasa Aman Tahun 2023

- Capaian Penegakan Perda = 100%
- Capaian Penanganan Kebakaran = 100%
- Capaian Penanganan Pelanggaran Tibuntrabmas = 92,55%

Indeks rasa aman =

$$\frac{\text{Capaian Penegakan Perda} + \text{Capaian Penanganan Kebakaran} + \text{Capaian Penanganan Pelanggaran Tibuntrabmas}}{3} \\ = \frac{(100\% + 100\% + 92,55\%)}{3} = 0,98$$

Analisis terkait indeks rasa aman

Faktor yang mendukung tidak tercapainya indeks rasa aman :

- Karena kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang berdampak pada terjadinya PHK.
- Berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat cenderung mengambil jalan pintas pada kegiatan-kegiatan informal yang melanggar.

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program yang diprioritaskan pada Pengamanan Perayaan Hari Raya dan Tahun Baru, Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba/Minuman Keras dan Prostitusi, fasilitasi Forkopinda, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Pembinaan kepada Ormas/LSM dan Parpol.

Kinerja di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disamping dengan upaya menurunkan tindak kriminalitas dan konflik di daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, didukung pula dengan adanya upaya perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana, rekrutmen Pol PP sampai pada rasio 72,00 per 10.000 penduduk, terbangunnya desa tangguh bencana sebanyak 21 desa rawan bencana serta penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah sampai 100%.

Penurunan angka konflik di daerah mempunyai arti yang positif karena menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban daerah semakin kondusif.

Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan kondusifitas keamanan daerah di masa datang adalah:

1. Optimalisasi deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan daerah.
 2. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembaharuan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara.
 3. Optimalisasi koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gangguan Narkoba (P4GN).
 4. Pemantapan pendidikan politik bagi masyarakat.
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Toleransi pada tahun 2023 dapat dipertahankan sebesar 100% sama dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%.

Pencapaian indeks toleransi tahun 2023 di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh :

1. Prosentase potensi konflik SARA yang tertangani 100%
Pada tahun 2023 terdata ada 5 potensi konflik SARA, kelimanya terkait pendirian rumah ibadah, faktor pendorong tertanganinya adalah adanya kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh agama, umat penghayat dan suku-suku yang ada di Kabupaten Kudus, melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan dalam rapat-rapat koordinasi maupun rapat fasilitasi bermasalahan;
2. Ada 3 (tiga) potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang terdata, dan ketiganya juga telah tertangani. Terkait potensi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh jaringan intelijen baik dari Korem, Kodim, Polres dan Kejaksaan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
3. Untuk potensi konflik sosial, terdata 22 potensi dari berbagai bidang, penanganan potensi-potensi ini didukung oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKPD) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS)

Perhitungan Indeks Toleransi :

$$\begin{aligned} \text{Indeks toleransi} &= \frac{\% \text{ potensi konflik sosial} + \% \text{ potensi gangguan keamanan} + \% \text{ konflik sara}}{3} \\ &= \frac{100+100+100}{3} = 100\% \end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian Indeks Toleransi di Kabupaten Kudus adalah :

1. Peran aktif lembaga-lembaga kemasyarakatan/ Organisasi Kemasyarakatan baik yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan/inisiatif dari masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi yang peduli terhadap toleransi.
Contoh : FKUB, FPBI, MUI, Dewan Gereja Indonesia dll
2. Tersedianya regulasi yang mengatur toleransi umat beragama salah satunya yang mengatur tentang SOP Pendirian Rumah Ibadah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebebasan beragama dan penganut kepercayaan.
4. Meningkatnya kehadiran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang bernuansa SARA melalui sosialisasi dan mediasi-mediasi penyelesaian permasalahan intoleransi.

Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 142,45% atau **Sangat Tinggi**.

6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pendapatan dan	PDRB Perkapita	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
	kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran perkapita perbulan (dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk dikali 100%
		Angka Pengangguran	Jumlah angkatan kerjayang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	99,59	96,77	94,51	90,11	11.413,19	12.088,00	105,91	11.413,19	105,91
2.	Angka Kemiskinan	99,70	86,67	81,71	82,32	5,90	7,24	77,29	5,90	77,29
3.	Angka Pengangguran	85,49	29,84	80,32	95,02	2,90	3,25	87,93	2,90	87,93
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,93	71,09	85,51	89,15			90,38		90,38

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda, Dinsos P3AP2 KB dan Dinas Perinkop UKM Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 86,99%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,52% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 89,51%.

1. PDRB Per Kapita (Juta rupiah) $\frac{138,70}{144,87} \times 100\% = 95,74\%$
2. Angka Kemiskinan $\frac{5,90 - (7,41-5,90)}{5,90} \times 100\% = 77,29\%$
3. Angka Pengangguran $\frac{2,90 - (3,21-2,90)}{2,90} \times 100\% = 87,93\%$

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU PDRB Per Kapita (juta rupiah) tahun 2023 sebesar 95,74%. Angka tersebut peningkatan sebesar

5,63% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 90,11%.

Realisasi sebesar 138,70 juta rupiah adalah dari:

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu Angka PDRB perkapita Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 126,95 Juta rupiah diperoleh dari perhitungan jumlah PDRB Kabupaten Kudus menurut harga berlaku sebesar 108.214,90 juta rupiah dibagi oleh jumlah penduduk sebesar 857.415 jiwa.

Faktor yang mendukung keberhasilan PDRB Per Kapita

Pada tahun 2023, jumlah PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebesar -1,98 persen sesuai dengan harga konstan. Sedangkan jika dihitung dengan harga berlaku PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sekitar -1,2 persen. Meski demikian tingkat PRDB per Kapita Kabupaten Kudus mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen atau sekitar 7 Juta per penduduk. Faktor mempengaruhi tingkat PDRB di kabupaten Kudus disebabkan oleh adanya perlambatan jumlah penduduk. Selain itu, mulai bergairahnya dunia perekonomian daerah, memberikan angin bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan omzet usaha mereka sehingga diterima oleh pasar dengan Pasar Kudus.

Program yang mendukung untuk meningkatkan PDRB per kapita saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah melakukan banyak hal antara lain:

1. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan
 2. Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
 3. Program peningkatan dan pengelolaan pasar
 4. Program kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 5. Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
 6. Program peningkatan dan pengembangan KUKM
- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan tahun 2022 sebesar 77,29%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,03% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 82,32%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 7,24 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 7,41 mengalami kenaikan sebesar 0,17 (angka yang tidak diharapkan).

Untuk mengukur kemiskinan, Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk Tahun 2022 batas garis kemiskinan adalah sebesar 482.806 rupiah ber jiwa.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 kembali menurun dari kondisi tahun sebesar 7,41 persen menjadi 7,24 persen. Salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah SDIT dan lainnya

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk meningkatkan pelatihan dan sekaligus tambah DPRB.

Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
3. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Pengangguran tahun 2023 sebesar 87,93. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,38 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 89,31%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 3,25 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 3,21 naik sebesar 0,04. Kenaikan angka tersebut dari tahun sebelumnya dikarenakan ada dampak ekonomi global berpengaruh terhadap perusahaan yg berorientasi ekspor sehingga banyak perusahaan yang tidak melakukan penambahan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, jumlah Angkatan kerja Tahun 2023 juga menurun.

Realisasi tahun 2023 sebesar 3,25 adalah dari Perhitungan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\begin{aligned}
 \text{TPT} &= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Anggaran KerJa}} \times 100\% \\
 &= \frac{15.870}{488500} \times 100\% \\
 &= 3,25
 \end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi angka pengangguran adalah :

- Tidak terserapnya lulusan Perguruan Tinggi karena kurangnya informasi pasar kerja dan kurangnya keterampilan dan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
- Dampak ekonomi global berpengaruh terhadap perusahaan yg berorientasi ekspor sehingga banyak perusahaan yang tidak melakukan penambahan tenaga kerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran adalah:

- Menyiapkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi di BLK.
 - Link and Match dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga terjadi peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa
 - Penyebarluasan informasi lowongan kerja
 - Pembinaan lembaga pelatihan kerja swastapembinaan BKK (Bursa Kerja Khusus) sebagai unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah dan tinggi
 - Memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja pada alumninya.
 - Terjadi Peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa;
 - Fasilitasi kemudahan perijinan usaha sehingga banyak tumbuh usaha-usaha baru yang akan menambah lapangan kerja baru
- Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.;
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten /Kota
- d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus mencapai 65.160 jiwa berkurang sebanyak 900 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 66.060 jiwa.

Garis kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari 482.806 pada tahun 2022 menjadi 482.806 pada tahun 2023. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 Kabupaten/kota Garis Kemiskinan sedang, yaitu garis kemiskinan di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Sedangkan capaian Angka pengangguran pada tahun 2023 sebesar 3,25%.

Permasalahan/penyebab kegagalan

Belum tercapainya target realisasi kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 dengan Penurunan angka Kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi pada semua sektor.

Musibah pandemi Covid-19, menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti kegiatan pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan hiburan dan pariwisata, serta penyelenggaraan pendidikan secara daring dari rumah telah menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor formal maupun informal. Hal ini menyebabkan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran meningkat.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan capaian kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 adalah dengan menekan tingkat penyebaran Covid-19 secara komprehensif dengan pencegahan penularan dan percepatan penanganan penyembuhan pasien Covid19 sehingga Pemerintah daerah dapat membuka kembali pembatasan aktivitas masyarakat pada berbagai sektor dengan norma kehidupan yang baru. Selain itu, untuk menjaga tingkat pendapatan masyarakat tingkat bawah agar tidak semakin turun dan mengurangi jumlah masyarakat miskin, Pemerintah Daerah tetap mempertahankan program bantuan masyarakat langsung untuk masyarakat terdampak covid-19 dan mengembangkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan ketrampilan kerja.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga melaksanakan program-program perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja,

pembangunan kawasan transmigrasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pendampingan Wira Usaha (PWU) dan penyelenggaraan Job Fair.

Disisi lain juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus memiliki peranan yang signifikan dalam rangka ikut memecahkan masalah pengangguran di Kabupaten Kudus.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Apabila dibanding dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57%, Kabupaten Kudus lebih baik yaitu sebesar 2,36% dan di banding Tingkat Nasional sebesar 5,86% Kabupaten Kudus masih tetap lebih baik.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 90,38% atau Tinggi.

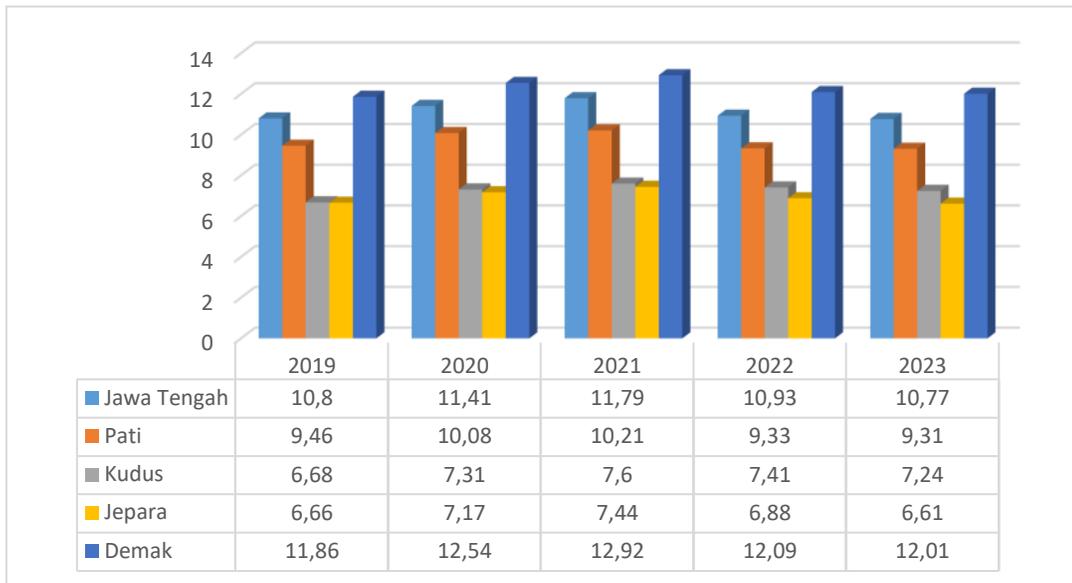
Tabel 2.13
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	58.000	64.240	67.060	66.060	65.160
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,68	7,31	7,60	7,41	7,24
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	406.470	429.666	450.922	482.806	520.830
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,01	1,23	0,90	0,99
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18	0,27	0,19	0,22

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Grafik 2.6.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2019-2023



Sumber : SIPD - BPS Kudus Tahun 2023

7. Meningkatnya daya saing investasi daerah

Realisasi Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai Investasi	Investasi tahun $n \times 1.05$ ($n+1$) dalam jutaan rupiah

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Nilai Investasi	77,25	42,12	472,90	117,18	9,19 T	11,80 T	128,40	9,19 T	128,40
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	77,25	42,12	472,90	117,18			128,40		128,40

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan DPMTSP Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 128,40%. Angka tersebut meningkat sebesar 11,22% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 117,18%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Nilai Investasi} \quad \frac{9,19 \text{ T} - 11,80 \text{ T}}{11,80 \text{ T}} \times 100\% = 22,12\%$$

2) Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Nilai Investasi tahun 2023 sebesar 128,40%. Angka tersebut meningkat sebesar 11,22% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 117,18%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 11,80 T apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 10,30 T mengalami peningkatan sebesar 1,5 T

Upaya-upaya yang ditempuh melalui :

- a. Fasilitasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPMPSTSP bersinergi dengan Perangkat Daerah Teknis semakin meningkat, dengan pelaksanaan pelayanan terpadu melalui sistem OSS-RBA.
- b. Mengikuti event promosi Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan event promosi lain di luar kota
- c. Menyelenggarakan Sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada pelaku usaha yang dilakukan di MPP maupun kunjungan ke perusahaan

Hal ini didukung oleh program dan kegiatan dalam anggaran APBD Tahun 2022 yaitu :

- a. Program Promosi Penanaman Modal
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 128,40% atau Sangat Tinggi

8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah

Realisasi Sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	Presentase jalan, Jembatan, drainase. Irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	101,26	103,06	102,30	102,59	83,73	85,43	102,03	83,73%	102,03
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,26	103,06	102,30	102,59			102,03		102,03

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKJIP Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 102,03%. Angka tersebut turun sebesar 0,56% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 102,59%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Persentase (\%)} \text{ infrastruktur dalam kondisi mantap} \quad \frac{83,73-85,43}{85,43} \times 100\% = -1,99\%$$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2023 sebesar 102,03%. Angka tersebut penurunan sebesar 0,56% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102,59%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 85,43 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 84,86

Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Tahun 2023 di Kabupaten Kudus tercapai sebesar 85,43% dipengaruhi oleh :

- Prosentase Jalan dalam kondisi mantap	94,69%
- Prosentase Jembatan dalam kondisi mantap dan sedang	91,29%
- Prosentase Luas Irigasi dalam kondisi baik	65,45%
- Prosentase Panjang saluran Drainase perkotaan dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	90,28%
Jumlah	341,71%

Realisasi Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap adalah:

$$341,71\% : 4 = 85,43\%$$

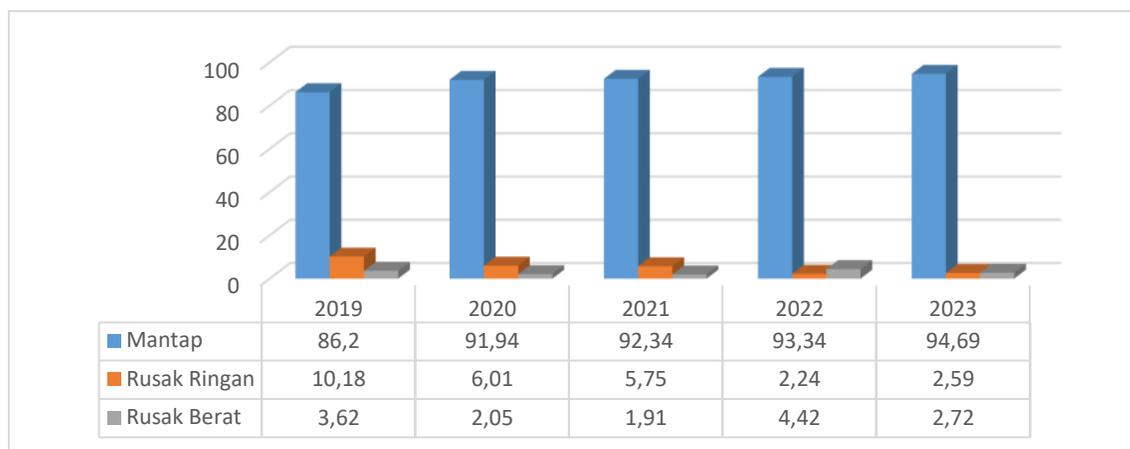
Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jalan di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.16
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kudus
Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2023

No.	Kondisi Jalan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Mantap	86,20	91,94	92,34	93,34	94,69
2	Rusak ringan	10,18	6,01	5,75	2,24	2,59
3	Rusak berat	3,62	2,05	1,91	4,42	2,72

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Grafik 2.7.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Di Kabupaten Kudus terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiganya adalah jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dengan panjang 639.261,70 km. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga jalan Daendels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7,20 persen dan ketiga jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36 persen.

Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jembatan Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.17
Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2023

NO.	KONDISI JEMBATAN	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Baik	unit	208	312	312	181	185
		%	58,43	87,64	87,64	42,59	43,53
2.	Sedang	unit	106	9	9	206	203
		%	29,78	2,53	2,53	48,47	47,76
3.	Rusak	unit	42	35	35	38	37
		%	11,80	9,83	9,83	8,94	8,71
<i>JUMLAH</i>		<i>unit</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>425</i>	<i>425</i>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2023

NO	KONDISI DAERAH IRIGASI	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	Ha	8.882,90	9.022,40	9.049,40	9.268,40	9.294,00
		%	86,28	87,64	87,90	90,02	90,28
2	Rusak Ringan	Ha	799,00	799,00	513,00	640,00	637,00
		%	7,76	7,76	4,98	6,22	6,19
3	Rusak Sedang	Ha	513,00	513,00	733,00	387,00	363,50
		%	4,98	4,98	7,12	3,76	3,53
4	Rusak Berat	Ha	100,50		-	-	-
		%	0,98		-	-	-
	Jumlah Total	Ha	10.295,40	10.434,78	10.295,40	10.295,40	10.295,40
	Jumlah Pembulatan	Ha	10.295	10.435	10.295	10.295	10.295
		%	100		100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Saluran drainase tahun 2018 ada Perubahan Data base Drainase menyesuaikan SK Jalan Kabupaten dengan Panjang saluran 584.280 meter dengan kondisi baik, saluran drainase Tahun 2018 sebanyak 243.349 meter dengan kondisi sedang 108.557 meter, sedangkan kondisi rusak sebanyak 232.374 meter. Untuk Tahun 2022 Paniaang Saluran Drainase ada perubahan yaitu menjadi 592.692,25 meter dengan kondisi baik 44,28 % (262.437,75 m), Kondisi sedang 20,72% (122.810,00 m) sedangkan kondisi rusak 35,00% (207.444,50 m). Prosentase Drainase Kondisi mantap tahun 2021 adalah sebesar 64,00 % sedangkan Tahun 2022 adalah sebesar 65,00 % persentase ada peningkatan.

Tabel 2.19
Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,23	63,03	64,00	65,00	65,45

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah:

1. Upaya penanganan Kondisi Infrastruktur rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Kudus
2. Penyusunan perencanaan rehabilitasi infrastruktur untuk tahun yang akan datang sesuai dengan skala prioritas.
3. Koordinasi lintas sektor terkait dengan pemanfaatan infrastruktur yang berdampak pada beban dan kapasitas yang dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya insfratraktur:

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

3. Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Jembatan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan Kinerja Urusan pekerjaan Umum lainnya dapat dilihat melalui cakupan air minum perkotaan dan perdesaan serta sanitasi. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sampai tahun 2023 adalah sebesar 98,68 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi.

Tabel 2.20
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase penduduk berakses air minum	95,37	97,03	98,00	98,25	98,68
2	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2022-2024. RTRW Kabupaten Kudus baru saja ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian pelaksanaan penataan ruang sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Kinerja Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Kudus sampai pada 2021 telah tersusun 6 (enam) RDTR Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR Kawasan Strategis Kabupaten. Selain penyusunan rencana rinci, pada tahun 2017 hingga tahun 2022 telah dilaksanakan Revisi Dokumen RTRW Kabupaten Kudus. Cakupan pelayanan ketaatan penataan ruang di Kabupaten Kudus selalu 100% setiap tahunnya.

Hasil cakupan penataan ruang Kabupaten Kudus konstan dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Cakupan Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100	98,60

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sedangkan Urusan pertanahan dan penataan Ruang Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kudus. Capaian persentase luas tanah bersertifikat di tahun 2021 yaitu 80,00 % sedangkan target di tahun 2022 persentase luas tanah bersertifikat 73,19 % capaian 80,78 % target terlampaui sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Database Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah daratan Kabupaten Kudus	ha	42.515,64	42.515,70	42.516,00	42.516,00	42.516,00
2	Luas tanah Bersertifikat HGB	ha	776,22	740,5199	714,00	750	702,440
3	Persentase luas tanah Bersertifikat HGB	ha	1,83	1,74	2,00	2,20	1,65
4	Luas tanah Bersertifikat HP	ha	2.296,87	3.606,9167	5.417,00	5.610,00	5.919,427
5	Persentase luas tanah Bersertifikat HP	ha	5,40	8,48	13,00	16,33	13,92
6	Luas tanah Bersertifikat HM	ha	28.662,38	27.401,2264	27.812,00	27.914,00	27.735,655
7	Persentase luas tanah Bersertifikat HM	ha	67,42	64,45	65,00	81,28	65,24
8	Luas tanah Bersertifikat HW	ha	41,82	62,0062	84,00	70	106,536
9	Persentase luas tanah Bersertifikat HW	ha	0,10	0,15	0,2	0,20	0,25
10	Total Luas tanah Bersertifikat	ha	31.777,29	31.810,6697	34.027	34.344,00	34.483
11	Persentase luas tanah Bersertifikat	ha	74,74	74,80	80,00	80,78	81,11

Sumber data : BPN Kabupaten Kudus, Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2023

Faktor pendorong dari naiknya indeks kualitas Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan daerah ini dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penyelenggaraan Jalan.
8. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
10. Program Penatagunaan Tanah.
11. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun permasalahan pada peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan daerah adalah :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.
2. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.
3. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama).
4. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.

Strategi untuk peningkatan insfrastruktur dalam kondisi mantap yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi Jawa Tengah untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Kudus, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus

(DAK) Dana Bantuan Keuangan Provinsi maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksanaan (sumber daya manusia agar lebih professional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Solusi :

Adapun solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang masih perlu penanganan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Perlunya pendekatan persuasif yang lebih intensif kepada masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 102,03% atau Sangat tinggi

9.Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Realisasi Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rata-rata indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan dibagi 3

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	100,84	96,05	82,45	67,77	60,80	89,72	67,77	89,72
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,22	100,84	96,05	82,45			89,72		89,72

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 89,72%. Angka tersebut meningkat sebesar 7,27% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2022 sebesar 82,45%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)} \quad \frac{67,77 - 60,80}{60,80} \times 100\% = -11,46\%$$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 sebesar 89,72%. Angka tersebut meningkat sebesar 7,27% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 82,45%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 60,80 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 54,88 mengalami peningkatan sebesar 5,92 dan angka tersebut sama dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 89,72%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2023 dipengaruhi oleh :

1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 47,00 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 37,60%
2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 79,47 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 40,50%
3. Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 58,90 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 21,90%

Sehingga dari faktor diatas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indeks	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air	52,67	37,60%	19,80%
2.	Indeks Kualitas Udara	81,92	40,50%	33,18%
3.	Indeks Tutupan Lahan	35,72	21,90%	7,82%

Dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & (\text{Bobot x IKA}) + (\text{Bobot x IKU}) + (\text{Bobot x ITL}) = \text{Realisasi} \\ & (37,60\% \times 52,67) + (40,50\% \times 81,92) + (21,90\% \times 35,72) = 60,80 \end{aligned}$$

Faktor yang tidak mempengaruhi IKLH tidak memenuhi target karena yang mana pada penentuan target 2023 mengacu pada target RPJMD 2018-2023 dimana IKLH 2023 perhitungannya berpedoman pada Permen LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK, sedangkan pada realisasi 2023 perhitungan IKLH berpedoman pada PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yg mulai berlaku tgl 19 Desember 2021 yang sangat berbeda dalam perhitungan IKLH.

Upaya dan usaha untuk meningkatkan capaian IKLH :

A. Indeks Kualitas Air

1. Perlu upaya pemisahan saluran pembuangan air hujan dengan limbah domestik skala kabupaten dengan pembangunan IPAL komunal terpusat agar tidak ada limbah domestik yang masuk ke air sungai (Kewenangan Dinas PUPR)
2. Perlunya pembangunan IPAL komunal pada kawasan permukiman (Kewenangan Dinas PUPR)
3. Perlunya sosialisasi dan pembinaan ke semua pelaku usaha terutama skala UMKM untuk mempunyai IPAL dalam pengelolaan air limbah industri dan domestik. (Kewenangan Dinas Nakerinkop dan UKM dan Dinas PKPLH)
4. Perlunya fasilitasi pembangunan Instalasi pengolahan air limbah pada industri skala UMKM (Kewenangan Dinas Nakerinkop dan UKM atau Pemerintah Desa)
5. Perlunya perbaikan kondisi vegetasi pada daerah hulu sungai dan daerah sempadan sungai (Kewenangan BPDAS-KLHK).
6. Perlunya sosialisasi kepada petani baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir dalam penggunaan pupuk kimia, agar tidak mencemari air sungai (Kewenangan Dinas Pertanian)
7. Perlunya pengawasan intensif pada kualitas air limbah yang dibuang oleh pelaku usaha ke sungai sebagai badan air penerima (Kewenangan Dinas PKPLH)
8. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan pada seluruh Daerah Aliran Sungai (Kewenangan Dinas Kesehatan)

9. Perlunya penguangan eco enzym pada air sungai secara berkala (Kewenangan Dinas PKPLH)
10. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pada Daerah Aliran Sungai agar tidak membuang sampah pada sungai (Dinas PKPLH, Pemdes, Dinas PMD, BBWS Pemali Juwana)
11. Perlunya memperbanyak jumlah titik sampling uji kualitas air permukaan dan air sungai (Kewenangan Dinas PKPLH)
12. Perlunya mewujudkan laboratorium lingkungan yang telah ada agar terakreditasi dan teregister di KLHK (Kewenangan Dinas PKPLH)

B. Indeks Kualitas Udara

1. Perlunya memperbanyak penghijauan turus jalan, (Kewenangan Dinas PKPLH)
2. Perlunya penambahan ruang terbuka hijau (Kewenangan Dinas PKPLH, Pemdes)
3. Perlu adanya kawasan bebas rokok (Kewenangan Dinas Kesehatan)
4. Perlunya memperbanyak jalur sepeda (Kewenangan Dinas Perhubungan)
5. Perlunya pengintensifan pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha penghasil emisi udara (Kewenangan Dinas PKPLH)
6. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha sektor industri penghasil emisi udara terutama skala UMKM untuk mengelola sesuai ketentuan yang berlaku (Dinas Nakerinkop dan UKM)
7. memperbanyak jumlah titik sampling uji kualitas udara di Kabupaten Kudus (Kewenangan Dinas PKPLH)

C. Indeks Kualitas Lahan

1. Perlunya penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus (Kewenangan Dinas PKPLH, Pemdes)
2. Perlunya koordinasi ke perusahaan/swasta/masyarakat untuk berperan serta menyediakan RTH publik dalam bentuk perjanjian atau kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
3. Perlunya koordinasi ke Kementerian LHK terkait approve tutupan lahan.

Analisa /Faktor pendukung keberhasilan
 Dari capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 89,72% diatas, sebagaimana formula penghitungan, pencapaian IKU IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24
 Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023			% Capaian Tahun 2020	% Capaian Tahun 2021	Target akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian				
1	Indeks Kualitas Air	50,85	52,67	103,58%	100,02%	97,07%	86,03%	103,58%
2	Indeks Kualitas Udara	93,92	81,92	87,22%	100,07%	86,86%	84,78%	87,22%
3	Indeks Tutupan Lahan	60,85	35,72	58,70%	102,27%	99,67%	40,37%	58,70%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Kudus

Tabel 3.22
 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	46	46	47,22	47	43,75	52,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,07	89,07	90,34	79,47	79,63	81,92
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50	58,08	58,51	58,9	28,22	35,72
IKLH	60,52	63,69	64,67	62,76	54,88	60,80

Indeks kualitas air

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 64,67, selanjutnya mengalami penurunan dengan capaian paling rendah pada tahun 2022 sebesar 54,88.

Pada tahun 2023 indeks kualitas lingkungan hidup mengalami perbaikan dengan naik sebesar 60,80. Hal ini diikuti komponen IKA, IKU dan IKL yang juga berfluktuasi capaiannya, dimana pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan tahun 2021-2022 secara umum menurun, sedangkan pada tahun 2023 capaian ketiga komponen penyusun IKLH mengalami kenaikan, dimana khusus IKA mengalami capaian tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 52,67.

Permasalahan :

Dengan adanya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, terhadap baku mutu referensi yang tidak sama dengan baku mutu kualitas ambien, sehingga perhitungan menggunakan baku mutu referensi yaitu angka 40 untuk NO₂ dan angka 20 untuk SO₂.

Solusi

Perlunya sosialisasi kepada pemilik persetujuan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi lebih ketat lagi terhadap ambang batas NO₂ dan SO₂.

Efektifitas dan Efisiensi

Dari uraian program dan kegiatan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efektif dan efisien, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencapai sasaran tersebut dan anggaran yang digunakan juga lebih sedikit dari target pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 89,72% atau kategori tinggi.

Dalam rangka untuk mencapai 9 sasaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 2.612.456.474.406,- untuk 124 program. Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung 20 IKU sebesar Rp. 2.381.965.814.078,-

Hasil Analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan Lama Sekolah • Rata-rata lama sekolah • Persentase (%) akses dan mutu pendidikan 	Pengelolaan Pendidikan	63,93%	63,93%	187.977.135.475	178.194.496.915	94,80 %	5,20 %
			Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	96,96%	96,96%	956.679.580	924.029.694	96,59 %	9,94 %
			Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	92,00%	92,00%	16.884.445.589	16.837.365.588	99,72 %	0,28 %
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00%	100,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00 %	0,00 %
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup • Angka Kematian Ibu • Angka Kematian Bayi 	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00%	100,00%	91.779.943.318	83.130.064.048	90,58 %	8,31 %
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	92,00%	92,00%	1.084.895.700	1.024.756.200	94,46 %	5,54 %
			Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	92,00%	92,00%	642.126.010	454.710.050	70,81 %	29,19 %
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	100,00%	1.426.072.000	1.180.143.710	82,75 %	17,25 %
			Pemberdayaan Sosial	85,00%	85,00%	240.971.500	219.186.587	90,96 %	9,04 %
			Rehabilitasi Sosial	100,00%	100,00%	2.313.972.420	2.099.116.240	90,71 %	3,85 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	75,00%	75,00%	69.879.943.985	68.102.753.719	97,46 %	7,38 %
			Penangan bencana	100,00%	100,00%	219.687.730	160.289.500	72,96 %	27,04 %
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100,00%	100,00%	18.000.000	7.363.850	40,91 %	59,09 %
			Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	29,00%	29,00%	180.610.688	131.850.800	73,00 %	27,00 %
			Perlindungan perempuan	100,00%	100,00%	26.996.849	16.134.900	59,77 %	0,23 %
			Pengelolaan sistem data gender dan anak	89,00%	89,00%	7.499.850	4.207.000	56,09 %	44,38 %
			Pemenuhan Hak Anak (PHA)	3,00 Peringkat	3,00 Peringkat	407.497.360	328.728.210	80,67 %	47,34 %
			Perlindungan khusus anak	100,00%	100,00%	34.499.730	19.999.199	57,97 %	42,03 %
			Pengendalian penduduk	1,00%	1,00%	288.935.740	122.081.540	42,25 %	30,24 %
			Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	72,00%	72,00%	3.088.838.200	2.255.306.305	73,01 %	27,30 %
			Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	14,50%	14,50%	4.561.400.000	4.374.487.805	95,90 %	49,28 %
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	• Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100,00%	100,00%	12.499.605	8.760.000	70,08 %	29,92 %
			Peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100,00%	100,00%	354.999.340	339.889.400	95,74 %	9,98 %
			Penanganan kerawanan pangan	100,00%	100,00%	49.999.376	45.077.700	90,16 %	9,84 %
			Pengawasan Keamanan Pangan	90,00%	90,00%	34.996.865	30.594.670	87,42 %	18,13 %
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	100,00%	100,00%	149.999.270	145.568.339	97,05 %	3,25 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100,00%	100,00%	44.999.810	33.384.300	74,19 %	25,86 %
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00%	100,00%	9.999.900	9.999.900	100,00 %	-3,88 %
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00%	100,00%	12.594.583.760	12.462.736.054	98,95 %	2,23 %
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	100,00%	544.744.580	534.699.000	98,16 %	12,29 %
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00%	100,00%	194.000.000	180.556.640	93,07 %	9,30 %
			Penyuluhan Pertanian	100,00%	100,00%	128.499.750	116.917.600	90,99 %	10,20 %
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Reformasi Birokrasi • Nilai Akutabilitas Kinerja • Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) 	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90 Nilai	71,36 Nilai				
				83 Nilai	72,05 Nilai				
				WTP	WTP				
		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Indek Kepuasan Masyarakat 		2,87 Indeks	4,23 Indeks				
				85,00 Indeks	89,33 Indeks				
			Pendaftaran penduduk	100,00%	100,00%	2.779.538.260	2.656.033.826	95,56 %	4,10 %
			Pelayanan pencatatan sipil	100,00%	100,00%	782.089.028	771.785.398	98,68 %	1,28 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100,00%	100,00%	815.575.750	798.216.644	97,87 %	2,13 %
			Pengembangan Kebudayaan	62,00%	62,00%	3.834.967.160	3.627.695.540	94,60 %	4,43 %
			Program Pembinaan Sejarah	1,00 tema	1,00 tema	6.068.150	6.062.300	99,90 %	0,10 %
			Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	20,00%	20,00%	105.667.633	105.652.400	99,99 %	2,90 %
			Pengelolaan Permuseuman	100,00%	100,00%	2.527.981.578	2.501.001.290	98,93 %	1,07 %
			Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	10,00%	10,00%	2.392.248.725	2.319.733.322	96,97 %	3,03 %
			Pemasaran Pariwisata	14,00%	14,00%	2.613.112.075	2.541.879.157	97,27 %	1,49 %
			Pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif	2,00%	2,00%	395.000.000	333.660.700	84,47 %	15,53 %
			Penataan desa	123 desa	123 desa	6.462.244.900	6.268.898.631	97,01 %	6,37 %
			Peningkatan kerjasama desa	2,00 produk hukum kawasan perdesaan	2,00 produk hukum kawasan perdesaan	99.999.960	98.158.000	98,16 %	4,81 %
			Administrasi pemerintahan desa	15,00%	15,00%	3.698.663.450	3.359.177.727	90,82 %	7,49 %
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100,00%	100,00%	604.989.230	574.295.481	94,93 %	5,07 %
			Kepegawaian Daerah	100,00%	100,00%	4.561.224.486	3.672.066.735	80,51 %	20,64 %
			Pengembangan sumber daya manusia	8,08%	8,08%	1.690.717.000	1.471.828.805	87,05 %	2,73 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100,00%	100,00%	2.880.133.635	2.379.401.962	82,61 %	17,39 %
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	686.521.000	584.130.549	85,09 %	14,91 %
			Penelitian dan pengembangan daerah	100,00%	100,00%	831.600.000	494.075.113	59,41 %	40,59 %
			Pengelolaan keuangan daerah	100,00%	100,00%	287.340.987.313	284.195.201.415	98,91 %	-0,11 %
			Pengelolaan barang milik daerah	90,00%	90,00%	6.768.711.714	5.385.365.757	79,56 %	31,54 %
			Pengelolaan pendapatan daerah	100,00%	100,00%	1.887.666.495	1.769.801.715	93,76 %	12,23 %
			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00%	100,00%	39.033.526.000	23.961.877.857	61,39 %	28,61 %
			Penyelenggaraan pengawasan	76,00%	76,00%	429.349.240	322.851.180	75,20 %	24,80 %
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	50,00%	50,00%	693.266.750	576.907.583	83,22 %	16,78 %
			Informasi dan komunikasi publik	100,00%	100,00%	11.545.474.358	11.375.357.937	98,53 %	1,47 %
			Aplikasi informaika	2,75 indeks	2,75 indeks	2.153.691.545	1.955.764.720	90,81 %	5,32 %
			Penyelenggaraan statistik sektoral	100,00%	100,00%	136.036.000	97.469.310	71,65 %	28,35 %
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	24,00%	24,00%	52.033.010	32.829.667	63,09 %	36,91 %
			Penanggulangan Bencana	100,00%	100,00%	1.957.799.595	1.830.346.097	93,49 %	6,51 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	• Indeks Rasa Aman	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	85,00%	85,00%	3.718.789.880	3.196.501.754	85,96 %	22,75 %
			Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	86,00%	86,00%	950.152.000	935.090.646	98,41 %	34,87 %
		• Indeks Toleransi	Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00%	100,00%	2.719.576.780	2.495.816.085	91,77 %	8,23 %
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta kebudayaan politik	100,00%	100,00%	20.981.523.500	20.757.872.398	98,93 %	1,07 %
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100,00%	100,00%	247.138.930	225.356.000	91,19 %	8,81 %
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100,00%	100,00%	436.464.243	413.860.328	94,82 %	5,18 %
			Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100,00%	100,00%	431.802.240	421.312.500	97,57 %	2,43 %
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	• PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	95,00%	95,00%	6.534.741.100	6.488.078.380	99,29 %	32,64 %
		• Angka Kemiskinan	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00%	100,00%	246.575.894	222.264.900	90,14 %	4,86 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
		• Angka Pengangguran	Pengembangan ekspor	1.657.570.000.000	1.657.570.000.000	273.788.295	107.275.223	39,18 %	28,70 %
			Standarisasi dan perlindungan konsumen	95,00%	95,00%	71.421.830	45.470.700	63,66 %	32,65 %
			Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70,00%	70,00%	326.432.000	311.284.994	95,36 %	4,64 %
			Perencanaan tenaga kerja	2,00%	2,00%	9.883.200	9.700.800	98,15 %	1,85 %
			Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	85,00%	85,00%	8.063.709.110	6.114.288.677	75,82 %	27,35 %
			Penempatan tenaga kerja	50,00%	50,00%	49.901.120	47.123.660	94,43 %	20,77 %
			Hubungan industrial	100,00%	100,00%	59.357.847	57.294.350	96,52 %	3,48 %
			Pendidikan dan latihan perkoperasian	89,00%	89,00%	226.940.340	215.338.000	94,89 %	5,28 %
			Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	4,00%	4,00%	2.815.559.007	2.761.480.160	98,08 %	9,67 %
			Pengembangan UMKM	6,00%	6,00%	789.971.765	638.023.896	80,77 %	19,73 %
			Perencanaan dan pembangunan industri	0,40%	0,40%	28.288.338.235	24.556.656.547	86,81 %	20,69 %
			Pembangunan kawasan transmigrasi	25,00%	25,00%	2.999.000	2.999.000	100,00 %	0,00 %
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	100,00%	100,00%	63.449.475	57.599.430	90,78 %	9,22 %
			Promosi penanaman modal	10,00%	10,00%	152.448.765	143.448.090	94,10 %	2,07 %
			Pelayanan penanaman modal	60,00%	60,00%	137.678.982	128.514.900	93,34 %	52,49 %
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	3,50 Trilyun	3,50 Trilyun	368.868.800	281.422.656	76,29 %	27,97 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100,00%	100,00%	84.541.170	81.897.715	96,87 %	3,13 %
			Pengelolaan energi baru terbarukan	100,00%	100,00%	1.950.000	1.480.000	75,90 %	24,10 %
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	85,00%	85,00%	9.536.723.000	8.762.439.377	96,25%	3,75%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100,00%	100,00%	6.262.636.000	6.130.079.000	82,13%	17,87%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100,00%	100,00%	1.109.843.000	1.061.862.000	95,68 %	4,32 %
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66,00%	66,00%	12.811.230.875	12.508.710.060	97,64 %	1,53 %
			Penataan bangunan gedung	60,00%	60,00%	2.079.308.165	1.916.681.450	92,18 %	0,51 %
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	60,00%	60,00%	36.801.360	600.000	1,63 %	98,37 %
			Penyelenggaraan jalan	89,00%	89,00%	142.303.662.032	140.167.702.402	98,50 %	4,67 %
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50,00%	50,00%	81.130.100	20.248.000	24,96 %	75,04 %
			Penyelenggaraan penataan ruang	100,00%	100,00%	550.000.000	474.494.622	86,27 %	12,33 %
			Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	74,84%	74,84%	190.000.000	111.621.500	58,75 %	41,47 %
			Penatagunaan tanah	100,00%	100,00%	359.998.650	230.856.800	64,13 %	10,87 %
			Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan	90,00%	90,00%	50.008.653.429	48.257.254.754	96,50 %	3,50 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengembangan perumahan	98,30%	98,30%	1.613.979.625	1.551.583.028	96,13 %	3,57 %
			Kawasan permukiman	0,02%	0,02%	547.628.850	435.486.250	79,52 %	20,48 %
			Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	99,14%	99,14%	3.051.712.000	2.919.472.384	95,67 %	1,57 %
			Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	506.998.854	492.513.150	97,14 %	2,86 %
			Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	67,77%	67,77%	240.631.750	235.612.603	97,91 %	10,07 %
			Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	8,20%	8,20%	6.393.898.980	6.181.509.053	96,68 %	21,73 %
			Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	48,48%	48,48%	4.999.632	2.463.192	49,27 %	117,34 %
			Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	50,00%	50,00%	22.500.000	19.134.700	85,04 %	15,28 %
			Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	25,00%	25,00%	37.900.000	37.573.550	99,14 %	1,77 %
			Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	50,00%	50,00%	257.825.000	254.250.692	98,61 %	10,03 %
Penanganan pengaduan lingkungan hidup	100,00%	100,00%	4.275.000	4.244.350	99,28 %	0,72 %			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan persampahan	72,00%	72,00%	7.076.376.000	6.963.909.147	98,41 %	16,95 %
			Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	0,48%	0,48%	15.000.000	15.000.000	100,00 %	2,76 %
			JUMLAH			2.612.456.474.406	2.381.965.814.078	91,18%	8,82%

Efisiensi penggunaan anggaran dapat kita lihat dengan memperbandingan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2023 Realisasi Anggaran sebesar 91,18%, dengan demikian maka katagori pelaksanaan anggaran adalah Efisien sebesar 8,82%. Dimana Capaian Kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas Realisasi anggaran.

Secara umum Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan Sangat tinggi (nilai 91% < 100%), Tinggi (nilai 76% < 90%), Sedang (nilai 66% < 75%), Rendah (nilai 51% < 65%) dan Sangat Rendang (nilai < 50%), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 9 sasaran strategis dimaksud, capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi sebanyak 6 sasaran dan dalam kategori tinggi sebanyak 3 sasaran.

Berkaitan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.26
Ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	97,74%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	76,86 %	Tinggi
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	105,91 %	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	104,65%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	145,45%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	86,99%	Tinggi
7.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	128,40%	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	102,03%	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	89,72%	Tinggi

PENGHARGAAN YANG DIRAIH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
1.	28 Feb 2023	Penghargaan Adipura 2022	Kementerian LH dan Kehutanan	
2.	14 Maret 2023	Penghargaan UHC (Universal Health Coverage)	Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri	
3.	19 Mei 2023	Opini WTP ke 11	BPK RI	
4.	29 Mei 2023	Anugerah Belajar merdeka kategori Pemda Trnasformatif subkategori Indonesia Pintar	Kemenristek	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
5	16 Juni 2023	Penghargaan hasil survey Ber Akhak tahun 2022 dengan indeks implementasi "Berorientasi Pelayanan"	ACT Consulting Internasional bekerjasama dengan KemenPAN RB	 BUPATI KUDUS TERIMA PENGHARGAAN BERORIENTASI PELAYANAN
6.	6 Oktober 2023	Penghargaan Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Bejaan Tahun 2023 sebesar 7,37 M	Pemerintah Pusat	 KOMITMEN TANGANI STUNTING, PEMKAB KUDUS RAHMAT PENGHARGAAN DARI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
7.	26 Oktober 2023	Penghargaan BKN Award kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Inforasi dan Sistem Computer Assisted Test (CAT)	BKN	 SUKSES KELOLA MANAJEMEN ASN, KUDUS SABET BKN AWARD 2023
8.	06 November 2023	Piagam Bhumandala Award	Badan Informasi Geospasial	 PJ BUPATI KUDUS TERIMA PENGHARGAAN BHUMANDALA AWARD 2023

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
9.	13 November 2023	Penghargaan Swasti Saba Padapa dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (Kep Menkes RI Nomor: MK.01.07/Menkes /2337/2023)	Kementerian Kesehatan	
10	5 Desember 2023	Penyelenggara Statistik Sektoral Terbaik se Jawa Tengah	Badan Pusat Statistik	
11	21 Desember 2023	Badan Publik kategori "Informatif"	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	
12	23 Desember 2023	Satria Leader Award kategori Satria Tangguh Bencana	Suara Merdeka Network	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kudus tidak mendapatkan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Kementerian) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (NIHIL), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2023

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
- NIHIL -											

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada Urusan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (27.722)	1 Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (127.597)	1 Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (4.201)	1 Tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi SPM Urusan Pendidikan

	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (27.722)	1 Tahun	93,62% (25.954)
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (127.597)	1 Tahun	99,91 % (127.487)
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (4.201)	1 Tahun	88,66% (3.548)

Pada Tahun 2023, capaian layanan Pendidikan Anak Usia Dini untuk usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD mencapai 93,62%. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 83,10%.

Capaian layanan Pendidikan Dasar untuk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) pada Tahun 2023 mencapai 99,91 % meningkat cukup signifikan dibandingkan Tahun 2022 yang berada di angka 98,34%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait Pendidikan Dasar sudah cukup baik dan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus berhasil mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Capaian layanan Pendidikan Kesetaraan pada usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2023 mencapai 84,46 %. Capaian ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 54,68 %.

Berdasarkan capaian-capaian di atas, disampaikan bahwa capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga bekerja sangat optimal. Disamping itu kesadaran masyarakat Kabupaten kudus terkait pentingnya pendidikan juga meningkat.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Prosentase Penerima Layanan Dasar (80%)	27.722	25.954	93,62 %	74,90 %
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				14,17 %
1	Angka partisipasi sekolah	100	93,62	93,62 %	20
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	62,31	62,31 %	
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100	92,06	92,06 %	
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	13,34	13,34 %	
5	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100 %	
6	Indeks distribusi guru	100	68,00	68,00 %	
7	Proporsi PTK bersertifikat	100	92,06	92,06 %	
8	Proporsi PTK Penggerak	100	18,29	18,29 %	
9	Pengalaman pelatihan guru	100	98,12	98,12 %	
CAPAIAN LAYANAN I					89,07 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Dasar				96,17 %
	Prosentase penerima layanan dasar (80%)	127.597	127.487	99,91 %	79,93%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				16,24 %
	SD				
1	Angka partisipasi kasar	100	103,26	100 %	
2	Angka partisipasi sekolah	100	99,24	99,24 %	
3	Angka partisipasi murni	100	92,47	92,47 %	
4	Kemampuan literasi	100	76,37	76,37 %	
5	Kemampuan numerasi	100	61,02	61,02 %	
6	Perbedaan Skor Literas	2,66	2,59	97,37 %	
7	Perbedaan Skor numerasi	1,04	0,95	91,35 %	
8	Indeks iklim keamanan	100	72,21	72,21 %	
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	71,3	71,30 %	
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	77,7	77,7 %	
11	Indeks distribusi guru	100	41	41 %	
12	Proporsi PTK bersertifikat	100	97,4	97,40 %	
13	Proporsi PTK penggerak	100	80	80 %	
14	Pengalaman pelatihan guru	100	100	100 %	
	SMP				
1	Angka partisipasi kasar	100	108,79	100 %	
2	Angka partisipasi sekolah	100	98,06	98,06 %	
3	Angka partisipasi murni	100	77,89	77,89 %	
4	Kemampuan literasi	100	79,56	79,56 %	
5	Kemampuan numerasi	100	61,9	61,9 %	
6	Perbedaan Skor Literas	2,86	4,49	100 %	
7	Perbedaan Skor numerasi	0,68	1,52	100 %	

8	Indeks iklim keamanan	100	68,41	68,41 %	
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	68,61	68,61 %	
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	76,6	76,6 %	
11	Indeks distribusi guru	100	34	34 %	
12	Proporsi PTK bersertifikat	100	90,5	90,5 %	
13	Proporsi PTK penggerak	100	60	60 %	
14	Pengalaman pelatihan guru	100	100	100 %	
CAPAIAN LAYANAN II					96,17 %
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Kesetaraan				85,30 %
	Jumlah yang harus dilayani (80%)	4.201	3.548	84,46 %	67,57 %
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
Prosentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan					17,73 %
1	APK	84,46	84,46	100 %	20
2	APS	84,46	84,46	100 %	
3	APM	100	77,73	77,73 %	
4	Kemampuan literasi	100	78,26	78,26 %	
5	Kemampuan numerasi	100	62,32	62,32 %	
6	Perbedaan Skor Literas	3,43	5,09	100 %	
7	Perbedaan Skor numerasi	2,92	35,49	100 %	
8	Indeks iklim keamanan	100	68,52	68,52 %	
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	66,11	66,11 %	
10	Kecukupan formasi guru ASN	-	-	-	
11	Indeks distribusi guru	99	99	100 %	
12	Proporsi PTK bersertifikat	-	-	-	
13	Proporsi PTK penggerak	-	-	-	
14	Pengalaman pelatihan guru	55	55	100 %	
CAPAIAN LAYANAN III					85,30 %
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar (I + II + III)					270,54
Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan (TOTAL IP : 3)					90,18 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah **90,18 %** masuk dalam Kategori **Tuntas Utama**.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan:

Tabel 4.3
Tabel Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan
Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pendidikan Anak Usia Dini	-	27.083.103.250	-
2	Pendidikan Dasar	-	151.813.918.425	-
3	Pendidikan Kesetaraan	-	3.892.459.990	-
4	Jumlah		182.847.480.475	

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan total mencapai Rp. 182.847.480.475,-

4.1.5 Dukungan Personil

Adapun dukungan personil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan diantaranya PAUD 2.750 org, pendidikan dasar 9.031 orang, dan Pendidikan Kesetaraan sebanyak 409 org

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dukungan dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 2.750 personil;
2. Pendidikan Dasar terdiri dari 9.031 personil;
3. Pendidikan Kesetaraan terdiri dari 409 personil.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan, ditemukan beberapa kendala permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan

- Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan, terdapat kendala permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:
- Dalam tahap pengumpulan data angka partisipasi sekolah PAUD terdapat kesulitan pendataan untuk lembaga yang belum memiliki izin pendirian/operasional.
- Tidak adanya guru ASN pada PKBM swasta pada tingkat pendidikan kesetaraan, sehingga capaian mutu kesetaraan pada bidang tersebut dinyatakan kosong.
- Belum ada guru TK yang memenuhi syarat menjadi Pengawas TK
- Minat Pendidik / Guru TK untuk mengikuti seleksi Guru Penggerak rendah, karena banyak Guru TK yang berstatus non ASN. Sedangkan Guru ASN sebagian besar mendekati usia pensiun.
- Jumlah Guru ASN TK melebihi kebutuhan

b) Solusi

- Penertiban PAUD Swasta dengan mendorong mereka agar segera mengurus izin pendirian /operasional.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus akan segera berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Kudus untuk mendorong peningkatan pemerataan penempatan dan kapasitas ASN khususnya tenaga pendidik di Kabupaten Kudus.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmonohadi, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus;

- i. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB;
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Target Capain SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (14.153)	1 Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (13.381)	1 Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (13.306)	1 Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (66.881)	1 Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (126.115)	1 Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia prduktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (575.509)	1 Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (102.285)	1 Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (236.225)	1 Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (18.329)	1 Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (2.177)	1 Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga tuberculosi yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (12.366)	1 Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (19.874)	1 tahun

4.2.3 Realisasi

Realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (14.153)	1 Tahun	100 % (14.153)
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (13.381)	1 Tahun	100 % (13.381)
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (13.306)	1 Tahun	100 % (13.306)
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (66.881)	1 Tahun	100 % (66.881)
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (126.115)	1 Tahun	100 % (126.115)
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (575.509)	1 Tahun	100 % (575.509)
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (102.285)	1 Tahun	100 % (102.285)
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (236.225)	1 Tahun	100 % (236.225)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (18.329)	1 Tahun	100 % (18.329)
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (2.177)	1 Tahun	100 % (2.177)
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (12.366)	1 Tahun	100 % (13.037)
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (19.874)	1 tahun	100 % (19.874)

Berdasarkan tabel target dan realisasi capaian SPM bidang kesehatan di atas, Kabupaten Kudus tahun 2023 telah melayani seluruh target penerima layanan bidang kesehatan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan capaian layanan sebesar 100% pada setiap jenis layanan dasar. Namun demikian terkait capaian mutu layanan kesehatan ibu hamil terdapat 124 ampul vaksin tetanus difteri, tablet tambah darah yang belum terdistribusi,

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Total Yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14,153	14,153	100%	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	14,153	13,866	98.48 %	19.70 %
2.	Tablet tambah darah	14,153	13,866	97.97 %	
3.	Alat Test Kehamilan	14,153	13,866	97.97 %	
4.	Alat Pemeriksaan HB	14,153	13,866	97.97 %	
5.	Alat Pemeriksaan Gol Darah	14,153	13,866	97.97 %	
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil Glukoprotein Urin	14,153	13,866	97.97 %	
7.	Kartu ibu/rekam medis ibu	14,153	13,866	97.97 %	
8.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14,153	13,866	97.97 %	
9.	Tenaga Kesehatan Dokter/ Dokter spesialis kebidanan	16	16	97.97 %	
10.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
11.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
12.	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	14,153	13,866	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN I					99.70 %
No	Jenis Layanan	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13,381	13,381	100	80 %

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/ Jasa Tersedia		
1.	Formulir Partograf	13,381	13,381	100.00 %	20 %
2.	Kartu ibu (rekam medis)	13,381	13,381	100.00 %	
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13,381	13,381	100.00 %	
4.	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	16	16	100.00 %	
5.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
6.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
Capaian Layanan II					100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml Total Yang Harus Dilayani (orang)	Jml Total Yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13,306	13,306	100%	80%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin Hepatitis B0	13,306	13,165	98.94 %	19.86 %
2.	Vitamin K1 injeksi	13,306	13,165	98.94 %	
3.	Salep/tetes mata antibiotik	13,306	13,165	98.94 %	
4.	Formulir bayi baru lahir	13,306	13,165	98.94 %	
5.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	13,306	13,165	98.94 %	
6.	Buku KIA	13,306	13,165	98.94 %	
7.	Nakes Dokter/Dokter Anak	16	16	100.00 %	
8.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
Capaian Layanan III					99,86 %

No	Jenis Layanan Dasar	Jml Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah l Yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Balita	66,881	66,881	100%	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	66,881	61,986	92.68 %	19,62 %
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	66,881	61,986	92.68 %	
3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	66,881	61,986	92.68 %	
4.	Vitamin A Biru	13,678	13,678	100.00 %	
5.	Vitamin A Merah	66,881	61,986	92.68 %	
6.	Vaksin imunisasi dasar: HBO	12,254	12,254	100.00 %	
7.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	12,254	12,254	100.00 %	
8.	Vaksin imunisasi dasar: Polio	12,254	12,254	100.00 %	
9.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	12,254	12,254	100.00 %	
10.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	12,254	12,254	100.00 %	
11.	Vaksin imunisasi dasar: Campak	12,254	12,254	100.00 %	
12.	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	12,254	12,254	100.00 %	
13.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	13,4	13,4	100.00 %	
14.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	13,4	13,4	100.00 %	
15.	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	13,4	13,4	100.00 %	
16.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	66,881	61,986	92.68 %	
17.	Peralatan Anafilaktik	66,881	61,986	92.68 %	
18.	Tenaga kesehatan : Dokter	360	360	100.00 %	
19.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
20.	Tenaga kesehatan :	1,905	1,905	100.00 %	

	Perawat				
21.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	67	67	100.00 %	
22.	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	3	3	100.00 %	
23.	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	80	80	100.00 %	
Capaian Layanan IV					99,62 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Total Yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	126,115	126,115	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku raport kesehatanku	126,115	125,205	99.28 %	19.95 %
2.	Buku pemantauan kesehatan	126,115	125,205	99.28 %	
3.	Kuesioner skrining kesehatan	126,115	125,205	99.28 %	
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	19	19	100.00 %	
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	126,115	125,205	99.28 %	
6.	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	60	60	100.00 %	
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	67	67	100.00 %	
10.	Nakes Masyarakat	70	70	100.00 %	
11.	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	3	3	100.00 %	
12.	Tenaga Non kesehatan : Guru	80	80	100.00 %	
Capaian Layanan V					99.95 %

NO	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penerima layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jml Total Yang Harus Dilayani (orang)	Jml Total Yang Terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	575,509	575,509	100%	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jml Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	575,509	480,31	83.46 %	18.83 %
2.	Alat ukur berat badan	832	832	100.00 %	
3.	Alat : Alat ukur tinggi badan	832	832	100.00 %	
4.	Alat : Alat ukur lingkaran perut	832	832	100.00 %	
5.	Alat : Tensimeter	832	832	100.00 %	
6.	Alat : Glukometer	832	832	100.00 %	
7.	Alat : Tes strip gula darah	575,509	480,31	83.46 %	
8.	Alat : Lancet	575,509	480,31	83.46 %	
9.	Alat : Kapas alkohol	575,509	480,31	83.46 %	
10.	Alat : KIT IVA Tes	575,509	480,31	83.46 %	
11.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	575,509	480,31	83.46 %	
12.	Tenaga kesehatan : Dokter	360	360	100.00 %	
13.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
14.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
15.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	67	67	100.00 %	
16.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	70	70	100.00 %	
17.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	22	22	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN VI					98.83 %

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	102,285	102,285	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	102,285	94,958	92.84 %	19.52 %
2.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	102,285	94,958	92.84 %	
3.	Buku kesehatan lansia	102,285	94,958	92.84 %	
4.	Tenaga kesehatan : Dokter	360	360	100.00 %	
5.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
6.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
7.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	67	67	100.00 %	
8.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	70	70	100.00 %	
9.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	80	80	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN VII					99.52 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)		
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	236,225	236,225	80

No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jml Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	236,225	195,374	82.71 %	18.27 %
2.	Tensimeter	236,225	195,374	82.71 %	
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	236,225	195,374	82.71 %	
4.	Tenaga kesehatan : Dokter	360	360	100.00 %	
5.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
6.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
7.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	70	70	100.00 %	
8.	Obat Hipertensi	236,225	195,374	82.71 %	
CAPAIAN LAYANAN VIII					98.27 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
1	2	Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)		
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18,329	18,329	100 %	80 %
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
1	2	Jml Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1.	Alat : Glukometer	18,329	16,4	89.48 %	18,77 %
2.	Alat : Strip Tes Gula Darah	18,329	16,4	89.48 %	
3.	Alat : Kapas Alkohol	18,329	16,4	89.48 %	
4.	Alat : Lancet	18,329	16,4	89.48 %	
5.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	18,329	16,4	89.48 %	

6.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	18,329	16,4	89.48 %	
7.	Tenaga kesehatan : Dokter	360	360	100.00 %	
8.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
10.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	67	67	100.00 %	
11.	Nakes Masyarakat	70	70	100.00 %	
12.	Obat Diabetes Melitus	18,329	16,4	89.48 %	
CAPAIAN LAYANAN IX					98.77 %
	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2,177	2,177	100%	80%
	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
No		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan	2,177	1,927	88.52 %	18.69 %
2.	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	2,177	1,927	88.52 %	
3.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2,177	1,927	88.52 %	
4.	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2,177	1,927	88.52 %	
5.	Tenaga kesehatan : Dokter	360	360	100.00 %	
6.	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	38	38	100.00 %	
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN X					98,69 %
	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
No		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		

1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,366	13,037	100 %	80 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	12,366	13,037	105.43 %	20 %
2.	Reagen Zn TB	12,366	13,037	105.43 %	
3.	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	12,366	13,037	105.43 %	
4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/ Lidi), Rak pengering	12,366	13,037	105.43 %	
5.	Catridge tes cepat molekuler	12,366	13,037	105.43 %	
6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	12,366	13,037	105.43 %	
7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	12,366	13,037	105.43 %	
8.	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	18	18	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
10.	Nakes : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	166	166	100.00 %	
11.	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	54	54	100.00 %	
12.	Tenaga kesehatan masyarakat	77	77	100.00 %	
13.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	22	22	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN XI					100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Human Immunodeficiency Virus	19,874	19,874	100%	80%

Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jml Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	19,874	19,511	98.17 %	19,85
2.	Tes cepat HIV (RDT) pertama	19,874	19,511	98.17 %	
3.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit	19,874	19,511	98.17 %	
4.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	19,874	19,511	98.17 %	
5.	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	5	5	100.00 %	
6.	Tenaga kesehatan : Perawat	1,905	1,905	100.00 %	
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	831	831	100.00 %	
8.	Nakes : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	147	147	100.00 %	
9.	Nakes masyarakat	77	77	100.00 %	
10.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	22	22	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN XII					99.85 %
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (I + II + III+IV+V+VI=VII+VIII+IX+X+XI+XII)					1.193,06
INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM KESEHATAN (TOTAL IP : 12)					99,42 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah **99,42 %** masuk dalam Kategori **Tuntas Utama**.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan.

Tabel Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan
Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	1.536.995.800,-	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	-	425.482.000,-	-
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	-	221.058.500,-	-
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	-	1.365.491.800,-	-
5.	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	-	848.177.900,-	-
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	670.457.000,-	-
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	113.062.898,-	-
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	-	286.321.400,-	-
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes militus	-	158.810.000,-	-
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	100.749.900,-	-
11.	Pelayanan Kesehatan Pada terduga TBC	-	1.754.570.000,-	-
12.	Pelayanan Kesehatan Orang resiko HIV	-	625.067.000,-	-
	Total Anggaran	-	8.106.243.198,-	

4.2.5 Dukungan Personil

Pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak akan optimal bila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya. Oleh karena itu sebagai upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah) adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	Struktural	Apoteker	Asisten Apoteker	Bidan	Dokter Gigi	Dokter	Entomolog kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan	Nutrisionis	Penyuluh kesehatan Masyarakat	Perawat	Perawat Gigi	Sanitarian	Adminkes	Staf	JML
1	DKK	7	3	3	3	0	1	2	5	0	4	3	4	0	2	6	23	66
2	LAB.KES	2	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	2	0	1	0	1	13
3	UPT PUSKESMAS BAE	0	0	1	13	1	2	0	1	0	1	0	5	1	0	0	1	26
4	UPT PUSKESMAS DAWE	0	0	1	24	1	2	0	1	0	1	0	10	1	0	0	1	42
5	UPT PUSKESMAS DERSALAM	0	0	1	10	1	2	0	1	1	1	0	5	1	0	0	1	24
6	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	0	0	1	12	1	2	0	0	0	1	0	7	1	1	0	1	27
7	UPT PUSKESMAS GRIBIG	0	1	1	16	1	3	1	0	1	1	0	10	0	0	0	2	37
8	UPT PUSKESMAS JATI	0	0	1	15	1	3	1	0	0	0	0	5	1	1	0	2	30
9	UPT PUSKESMAS JEKULO	0	1	0	17	1	4	0	0	2	1	0	8	1	1	0	1	37
10	UPT PUSKESMAS JEPANG	0	0	1	16	1	3	0	1	1	1	0	7	1	0	0	1	33
11	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	0	1	1	18	2	3	1	2	1	0	0	4	1	0	0	1	35
12	UPT PUSKESMAS MEJOBLO	0	1	1	19	1	3	1	1	1	1	0	8	1	0	0	1	39
13	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	0	0	1	11	1	2	0	0	0	1	1	4	1	0	0	3	25
14	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	0	0	1	11	1	3	0	0	0	1	0	6	0	0	0	1	24
15	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	0	0	1	13	1	3	1	0	0	1	1	4	1	1	0	2	29
16	UPT PUSKESMAS REJOSARI	0	1	2	19	1	3	1	0	1	1	0	8	1	0	0	2	40
17	UPT PUSKESMAS RENDENG	0	0	1	12	1	3	0	1	0	0	0	6	1	0	0	1	26
18	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	0	0	1	10	1	4	0	0	0	1	0	5	1	1	0	0	24
19	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	0	0	0	19	1	4	0	1	0	1	0	6	0	0	0	2	34
20	UPT PUSKESMAS UNDAAN	0	0	1	22	1	3	0	1	1	1	1	8	1	0	0	1	41
21	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	0	0	1	13	1	2	0	0	1	1	0	6	1	0	0	1	27
JUMLAH		9	8	21	293	20	56	8	15	16	20	6	128	16	8	6	49	679

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala permasalahan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan layanan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kudus, antara lain :

1. Tidak semua ibu hamil melakukan kunjungan sampai 4 kali (K4) dan melahirkan dengan status K4 disebabkan oleh kasus abortus, lahir sebelum waktunya, saat persalinan status akses (pemeriksaan pertama lebih dari kehamilan 16 minggu, datang langsung melahirkan
2. Pemanfaatan kelas ibu hamil belum maksimal
3. Proses pengumpulan data dari semua fasilitas kesehatan oleh petugas perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh lebih optimal..
4. Pemberdayaan/peran serta masyarakat dan peran lintas sektor masih belum optimal
5. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin masih perlu ditingkatkan
6. Proses pengumpulan data dari semua fasilitas kesehatan oleh petugas perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh lebih optimal
7. Masih terdapat Kader Kesehatan yang belum mendapat pelatihan teknis bidang kesehatan

8. Kedisiplinan petugas dalam pengisian data pada aplikasi pelaporan PTM serta layanan pada faskes swasta belum seluruhnya dilaporkan

Sedangkan solusi yang dilakukan dalam upaya peningkatan layanan SPM Urusan Kesehatan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA
2. Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas data terutama di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri). Dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.
4. Peningkatan kompetensi teknis pada SDM Kesehatan, baik bersumber dana APBD maupun dana BLUD Puskesmas.
5. Bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Kudus dan lembaga-lembaga pelatihan lainnya untuk meningkatkan kemampuan Kader Kesehatan yang terlatih melalui pelatihan teknis bidang kesehatan
6. Aktif berkolaborasi dengan pelayanan swasta terkait pelayanan pada usia produktif, usia lanjut, Diabetes, Hipertensi dan ODGJ

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

- a. Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten / kota
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target SPM pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (868.079 Jiwa)	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (868.079 Jiwa)	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.8
Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (868.079 Jiwa)	Setiap tahun	97,65 % (847.667 Jiwa)
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (868.079 Jiwa)	Setiap Tahun	92,75% (805.110 Jiwa)

Sebagaimana pada tabel di atas, pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus terdiri atas 2 jenis pelayanan dasar, yaitu Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional.

Capaian layanan SPM Kabupaten Kudus tahun 2023 terkait pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari untuk Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok sebanyak 847.667 Jiwa dari jumlah keseluruhan sebesar 868.079 Jiwa atau sekitar 97,65%. Kemudian, untuk capaian layanan Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebanyak 805.110 Jiwa dari jumlah keseluruhan sebesar 868.079 Jiwa atau sekitar 92,75%. Hal ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melayani dan mencukupi kebutuhan terkait akses air minum dan air limbah masyarakat di Kabuapten Kudus.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM
Pekerjaan Umum Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (Orang)	Jml yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	868.079	847.667	97,65	78,12
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rumah tangga mendapatkan akses air minum SPAM Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	87.543	85.744	97,95	19,69
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	87.543	85.744	97,95	

3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	152.301	150.743	98,98	
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	152.301	150.743	98,98	
CAPAIAN LAYANAN I					97,81%
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	868.079	805.110	92,75	74,20
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	80.915	73.939	91,38	12,40
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	63.633	58.214	91,48	
3	Sub-Sistem pengolahan setempat	176.211	5.551	3,15	
4	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	0	0	0	
5	Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	0	0	0	
CAPAIAN LAYANAN II					86,60%
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar (I + II)					184.4
Indeks Pencapaian (IP) SPM Pekerjaan Umum (TOTAL IP : 2)					92.20%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah **92,20 %** masuk dalam Kategori **Tuntas Utama**.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, oleh Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar di bidang tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan mutu layanan

Adapun alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	-	6.262.636.000,-	-
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	-	859.843.000,-	-
	Jumlah		7.122.479.000,-	

4.3.5 Dukungan Personil

Sedangkan dukungan personil untuk pelaksanaan dasar di bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 16 orang personil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pekerjaan Umum terdapat kendala permasalahan diantaranya adalah kurangnya jumlah anggaran dan personil dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum, termasuk terbatasnya anggaran pendampingan untuk kegiatan IBM (pamsimas).

Sedangkan salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan dengan pola sharing untuk beberapa wilayah sekaligus.

4.4 Urusan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.9
Target SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100% (132)	Tiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100% (12)	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.10
Realisasi SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100% (132)	Tiap Tahun	100% (132)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100% (12)	Setiap Tahun	100% (21)

Sebagaimana pada tabel di atas, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus terdiri atas 2 jenis pelayanan dasar, yaitu layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Capaian layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun 2023 telah optimal, mencapai 100%. Dengan demikian layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten sudah baik.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ Indeks Pencapaian (IP) SPM

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM
Perumahan Rakyat Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	132	132	100	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	3	3	100%	20 %
2.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	33	33	100%	
3.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	100%	
4.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	100%	
CAPAIAN LAYANAN I					100%
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12	12	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	100%	20 %

2.	Subsidi uang sewa	1	1	100%	
3.	Penyediaan rumah layak huni	3	3	100%	
CAPAIAN LAYANAN II					100 %
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (I + II)					200 %
INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM PERUMAHAN RAKYAT (TOTAL IP : 2)					100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah 100 % masuk dalam Kategori Tuntas Paripurna. Hal ini mencerminkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sudah mencapai kerja optimal dalam pemenuhan layanan dasar perumahan rakyat di Kabupaten Kudus

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diantaranya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Alokasi Anggaran Pemenuhan
SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			Jumlah Personil
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah	
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	-	15.823.500,-	-	9 (Sembilan) Orang
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	-	-	-	
	Jumlah		15.823.500,-		

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung 147 personil.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat permasalahan diantaranya dalam proses usulan perbaikan rumah tidak layak huni, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni :

1. Kendala pada saat dilakukan verifikasi dan validasi ternyata terdapat data calon penerima yang sudah meninggal dunia, ataupun kondisi rumah yang diperbaiki oleh pemiliknya sehingga sudah menjadi layak huni.
2. Keterbatasan dukungan personil pengampu urusan SPM perumahan rakyat.

Adapun upaya-upaya yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga setiap perubahan akan segera terpantau dan dilaporkan secara dini.
2. Mengusulkan untuk menambah Formasi ASN baik kuantitas maupun kualitas (kompetensi) di bidang teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kesehatan

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.12
Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% (259)	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100% (83.995)	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (84.995)	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100% (84.995)	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (97)	Setiap Tahun

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.13
Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% (259)	Setiap Tahun	100% (259)
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100% (83.995)	Setiap Tahun	100% (83.995)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (84.995)	Setiap Tahun	100% (84.995)
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100% (84.995)	Setiap Tahun	100% (84.995)
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (97)	Setiap Tahun	100% (97)

Target dan realisasi layanan pemenuhan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel di atas terdiri atas 5 jenis pelayanan dasar, yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran.

Pada tahun 2023, capaian 5 Layanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus sudah optimal, yakni masing-masing Layanan Dasar telah mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang Trantibumlinmas sudah dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam hal ini oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk layanan terkait kebencanaan.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Capaian Indeks Pencapaian (IP)
SPM Trantibum Linmas Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (orang)	Jml yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Trantibumlinmas	259	259	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Harus Dilayani	Jml Mutu Terlayani / Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	3	3	100 %	20%
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	13	13	100 %	
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	140	140	100 %	
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	100 %	
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1	1	100 %	

6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1	1	100 %	
CAPAIAN LAYANAN I					100
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang harus dilayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	84,995	84,995	100	80
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dlm bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100%	20 %
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	83,995	83,995	100%	
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	1	1	100%	
4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	122	122	100%	
CAPAIAN LAYANAN II					100 %

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang harus dilayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	84,995	84,995	100	80
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	330	330	100%	20 %
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	200	200	100%	
CAPAIAN LAYANAN III					100 %

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (orang)	Jml yang harus dilayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN):	84,995	84,995	100%	20 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani /	Jml Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (pusdalops penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana)	1	1	100%	20 %
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	10	10	100%	

3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	100%	
4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	1	100%	
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	402	402	100%	
CAPAAIAN LAYANANAN IV					100%

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang harus dilayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	97	97	100 %	80%
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/ redkar)	97	97	100%	20 %
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1	1	100%	

3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	4	4	100%	
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	30	30	100%	
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	2	2	100%	
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2	2	100%	
CAPAIAN LAYANAN V				100%	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (I + II+III+IV+V)				500 %	
INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM TRANTIBUM LINMAS (TOTAL IP : 2)				100 %	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM Trantibum linmas Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah 100 % masuk dalam Kategori Tuntas Paripurna. Hal ini mencerminkan bahwa Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kudus sudah mencapai kerja optimal dalam pemenuhan layanan dasar perumahan rakyat di Kabupaten Kudus

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang ini, diantaranya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Alokasi Anggaran Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	-	3.718.789.880,-	-
2	Pelayanan Informasi Rawan bencana	-	155.407.000,-	-
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	1.091.530.475,-	-
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	665.638.820,-	-
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	-	950.152.000,-	-
	Jumlah		6.626.708.475,-	

4.5.5 Dukungan Personil

Sedangkan dukungan personil untuk pelaksanaan dasar di bidang Trantibumlinmas : Personil Satpol PP = 58 Orang (terdiri dari 25 Orang personil trantib + 33 Orang personil damkar), Personil BPBD = 153 Orang (terdiri dari 21 ASN, 22 non ASN dan 110 relawan).

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menghambat dalam penyelenggaraan pelayanan SPM bidang Trantibumlinmas diantaranya adalah masih belum memadainya dukungan dana operasional, sarana prasarana penunjang kegiatan serta kualitas SDM yang belum mencukupi sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal. Sedangkan langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain dengan penambahan anggaran dan menutup kekurangan personil Satpol PP dari unsur P3K, sedangkan untuk mencapai jumlah PPNS yang ideal, maka dikirimkan anggota untuk mengikuti pelatihan dan bintek PPNS.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Sosial di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.15
Pencapaian SPM Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023 %	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (1.140)	Setiap Tahun	100 % (1.140)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (20)	Setiap Tahun	100 % (20)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	umlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (446)	Setiap Tahun	100 % (446)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (80)	Setiap Tahun	100 % (80)
5.	Linjamsos pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana	Jml linjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	100 % (1.450)	Setiap Tahun	100 % (1.450)

4.6.3 Realisasi

Tabel 4.16
Pencapaian SPM Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023 %	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (1.140)	Setiap Tahun	100 % (1.140)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (20)	Setiap Tahun	100 % (20)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (446)	Setiap Tahun	100 % (446)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (80)	Setiap Tahun	100 % (80)
5.	Linjamsos pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana	Jml linjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	100 % (1.450)	Setiap Tahun	100 % (1.450)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Sosial terdiri dari 5 layanan dasar, yakni Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota.

Capaian 5 layanan dasar Urusan Sosial di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sudah optimal, yakni masing-masing layanan dasar telah mencapai 100% (Kategori Tuntas Paripurna). Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Perangkat Daerah terkait dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada. Capaian ini perlu dipertahankan sebagai motivasi untuk pencapaian pada periode berikutnya.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
1	2	3	4	5	6
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	1140	1140	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Layanan Dasar (5 x 80%)
		JmlMutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jml Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	5	5	100 %	20%
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	29	29	100 %	
3.	Penyediaan permakanan	784	784	100 %	
4.	Penyediaan sandang	50	50	100 %	
5.	Penyediaan alat bantu	64	64	100 %	
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	4	4	100 %	
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	50	50	100 %	
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	118	118	100 %	
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	5	100 %	
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	100 %	

11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	100 %	
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	4	100 %	
13.	Layanan rujukan	25	25	100 %	
CAPAIAN LAYANAN I					100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
1	2	3	4	5	6
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	20	20	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani	Jml Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	2	2	100 %	20 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	2	2	100 %	
3.	Penyediaan permakanan	2	2	100 %	
4.	Penyediaan sandang	5	5	100 %	
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2	2	100 %	
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	2	100 %	
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	2	2	100 %	
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	2	2	100 %	
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	100 %	
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	100 %	

11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100 %	
12.	Layanan rujukan	2	2	100 %	
CAPAIAN LAYANAN II					100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
1	2	3	4	5	6
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	446	446	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	11	11	100 %	20%
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	11	11	100 %	
3.	Penyediaan permakanan	380	380	100 %	
4.	Penyediaan sandang	50	50	100 %	
5.	Penyediaan alat bantu	3	3	100 %	
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	3	100 %	
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2	2	100 %	
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	3	3	100 %	
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100 %	
10.	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	1	1	100 %	
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100 %	
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100 %	
13.	Layanan rujukan	2	2	100 %	
CAPAIAN LAYANAN III					100 %

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
1	2	3	4	5	6
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	80	80	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	8	8	100 %	20 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	8	8	100 %	
3.	Penyediaan permakanaan	20	20	100 %	
4.	Penyediaan sandang	5	5	100 %	
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	3	100 %	
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	52	52	100 %	
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	8	8	100 %	
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	8	8	100 %	
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	8	8	100 %	
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	12	12	100 %	
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	12	100 %	
12.	Layanan rujukan	9	9	100 %	
CAPAIAN LAYANAN IV					100 %

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
1	2	3	4	5	6
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1450	1450	100 %	80%
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan permakanan	1250	1250	100 %	20 %
2.	Penyediaan sandang	80	80	100 %	
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	9	9	100 %	
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20	20	100 %	
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	100	100	100 %	
CAPAIAN LAYANAN V					100 %
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (I + II+III+IV+V)					500%
INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM SOSIAL (TOTAL IP : 5)					100 %

4.6.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Sosial sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Sosial.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			Jumlah Personil
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah	
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	-	418.062.820,-	-	48

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			Jumlah Personil
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	-	-	-	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-	-	-	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-		-	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	-	219.687.730,-	-	
	Jumlah	-	637.750.550,-	-	

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial didukung 36 personil

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sos P3A P2KB Kabupaten Kudus selaku pengampu penerapan SPM urusan sosial adalah masalah klise yang dhadapi oleh hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yakni permasalahan pendataan target penerima layanan di setiap bidang layanan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab kendala ini menjadi kendala setiap tahun. Solusi yang dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Kudus terkait penambahan personil ASN. Disamping itu Dinas Sosial P3A P2KB juga aktif melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat secara berkala dengan melibatkan BPJS, Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait lainnya.

4.7 Program dan Kegiatan

Dalam upaya penyelenggaraan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Kudus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah, Pada Tahun Anggaran 2022 lalu Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran Program dan Kegiatan guna pencapaian pelayanan dasar, meliputi :

a. Urusan Pendidikan

Guna pelaksanaan layanan SPM pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui 3 (tiga) Program yang terbagi ke dalam 8 (delapan) Kegiatan.

Tabel Program Dan Kegiatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
	Urusan Pendidikan			182,847,480,475	173,206,116,365	94.73
1	Program Spm Pendidikan Anak Usia Dini			27,083,103,250	26,588,147,030	98.17
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD		13,937,889,820	13,925,913,800	99.91
	1	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	9,999,820	9,965,050	99.65
	2	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	13,927,890,000	13,915,948,750	99.91
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan		5,646,728,890	5,639,151,930	99.87
	1	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	399,999,890	392,422,930	98.11
	2	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	5,246,729,000	5,246,729,000	100
	3	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)		7,498,484,540	7,023,081,300	93.66
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	7,498,484,540	7,023,081,300	93.66
2	Program SPM Pendidikan Dasar			151,813,918,425	142,687,263,335	93.99

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%	
1	2		3	4	5	6	
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		98,135,124,974	90,546,416,303	92.27	
		1.	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	18,177,192,188	17,509,265,663	96.33
		2.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	699,999,820	568,350,562	81.19
		3.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	79,257,932,966	72,468,800,078	91.43
	2	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		46,841,153,251	46,459,398,582	99.19	
		1.	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	350,000,000	215,197,190	61.48
		2.	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	46,166,153,251	45,962,249,922	99.56
		3.	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun ajaran	Kegiatan	325,000,000	281,951,470	86.75
	3	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		6,837,640,200	5,681,448,450	83.09	
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi disyaratkan	Kegiatan	6,837,640,200	5,681,448,450	83.09
	3	Program Pendidikan Kesetaraan		3,950,458,800	3,930,706,000	99.50	
	1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)		3,892,459,990	3,886,600,000	99.85	
		1	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	24,999,990	20,690,000	82.76

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
	2	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	3,867,460,000	3,865,910,000	99.96
	2	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)		57,998,810	44,106,000	76.05
	1.	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	29,999,360	21,978,000	73.26
	2.	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	27,999,450	22,128,000	79.03

b. Urusan Kesehatan

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 12 (dua belas) sub-kegiatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.

Tabel Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
	KAB. KUDUS			6,533,373,898	6,144,569,761	94,15
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			6,533,373,898	6,144,569,761	94,15
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6,533,373,898	6,144,569,761	94,15
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,536,995,800	1,452,538,420	94.51
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	425,481,000	398,609,700	93.68
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	221,058,500	205,807,215	93.10
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1,365,491,800	1,333,052,380	97.62

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	848,177,900	781,151,616	92.10
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	670,457,000	619,036,000	92.33
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	113,062,898	102,103,950	90.31
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	286,321,400	269,604,400	94.16
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	158,810,000	146,190,000	92.05
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	100,749,900	95,449,900	94.74
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,754,570,000	162,580,50	92.70
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	625,067,000	578,445,680	92.54

c. Urusan Pekerjaan Umum

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan terkait dengan pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
	URUSAN PEKERJAAN UMUM			7,122,479,000	6,954,073,000	97.64
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			6,262,636,000	6,130,077,000	97.88
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638		6,262,636,000	6,130,077,000	97.88
		1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	300,000,000	297,307,000	99.10
		2. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		5,562,636,000	5,440,303,000	97.80

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
	3.	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masy.	400,000,000	392,467,000	98.12
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			859,843,000	823,996,000	95.83
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639		859,843,000	823,996,000	95.83
	1.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	242,049,000	206,996,000	85.52
	2.	Pembangunan/penyelesaian sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	617,794,000	617,000,000	99.87

d. Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan pelayanan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas PKPLH melaksanakan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Sub Kegiatan Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota. Data sebagaimana tabel berikut

Tabel Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
	KAB. KUDUS			15,823,500	15,562,500	98.35
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			15,823,500	15,562,500	98.35
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		823,500	562,500	68.31
	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	823,500	562,500	68.31
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		15,000,000	15,000,000	100
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	15,000,000	15,000,000	100

e. Urusan Trantibumlinmas

Penyelenggaraan pelayanan SPM pada Urusan Trantibumlinmas oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk penyelenggaraan Sub Urusan Ketentraman Ketertiban, dan Bencana Kebakaran, serta Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk layanan Sub Urusan Bencana. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023:

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1	2	3	4	5	6
	KAB. KUDUS		6,626,708,475	5,963,470,397	89.99 %
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)		3,718,789,880	3,196,501,754	85.96 %
	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2,298,789,880	2,261,328,304	98.37 %
	1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Kasus	2,146,747,000	2,111,969,804	98.38 %
	2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	25,700,000	25,693,500	99.97 %
	3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	71,800,000	71,758,000	99.94 %
	4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	42,476,410	42,390,000	99.80 %
	5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang	6,080,000	5,840,000	96.05 %

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1	2		3	4	5	6
		termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				
	6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	500,000	146,000	29.20 %
	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	3,100,000	3,100,000	100.00 %
	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	441,470	431,000	97.63 %
	9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1,945,000	0	0%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455		1,420,000,000	935,173,450	65.86 %
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	2,000,000	1,988,000	99.40 %
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	68,000,000	67,891,100	99.84 %
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	1,350,000,000	865,294,350	64.10 %
	2	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)		1,957,766,595	1,831,877,997	93.57 %
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456		155,407,000	145,723,150	93.77 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3,000,000	1,531,900	51.06 %
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kab/Kota (per jenis bencana)	Orang	152,407,000	144,191,250	94.61 %
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1,091,530,475	1,039,920,347	95.27 %
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kab/Kota	Dokumen	3,000,000	2,988,680	99.62 %
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab/Kota	Orang	52,830,800	52,830,600	100.00 %

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1	2		3	4	5	6
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	508,822,400	497,817,767	97.84 %
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	353,834,000	338,085,600	95.55 %
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	42,654,225	35,346,500	82.87 %
	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	65,826,050	48,364,500	73.47 %
	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	5,697,000	5,694,000	99.95 %
	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	18,866,000	18,866,000	100.00 %
	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	40,000,000	39,926,700	99.82 %
	JUMLAH INDIKATOR			1,091,530,475	1,039,920,347	95.27 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			665,638,820	615,123,600	92.41 %
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2,848,820	1,800,000	63.18 %
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	35,250,000	26,987,000	76.56 %
	4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	627,540,000	586,336,600	93.43 %
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446		45,190,300	31,110,900	68.84 %
		Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	45,190,300	31,110,900	68.84 %
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)			950,152,000	935,090,646	98.41 %
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		944,152,000	929,090,846	98.40 %
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	944,152,000	929,090,846	98.40 %
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		6,000,000	5,999,800	100.00 %
	1	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	6,000,000	5,999,800	100.00 %

f. URUSAN SOSIAL

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada Urusan Sosial, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial P3A P2KB melaksanakan 1 (satu) program yang terbagi menjadi 2 (dua) Kegiatan dan 12 Sub-Kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut

Tabel Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
1	2	3	4	5	6
	KAB. KUDUS		1,040,950,550	871,872,000	83.76 %
1	Program Rehabilitasi Sosial		637,750,550	468,672,000	73.49 %
	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		418,062,820	308,383,000	73.76 %
	1. Penyediaan permakanaan	Orang	217,000,000	213,550,000	98.41 %
	2. Penyediaan sandang	Orang	30,000,000	26,930,000	89.77 %
	3. Penyediaan alat bantu	Orang	60,000,000	30,459,000	50.77 %
	4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	35,000,000	2,222,000	6.35 %
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	20,000,000	7,489,000	37.45 %
	6. Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	10,000,000	6,040,000	60.40 %
	7. Pemberian layanan kedaruratan	Orang	31,062,820	14,222,000	45.78 %
	8. Pemberian layanan rujukan	Dokumen	15,000,000	7,471,000	49.81 %
	2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		219,687,730	160,289,000	72.96 %
	1. Penyediaan makanan	Orang	173,869,730	124,503,000	71.61 %
	2. Penyediaan sandang	Orang	21,400,000	17,668,000	82.56 %
	3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	16,618,000	16,618,000	100.00 %
	4. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	7,800,000	1,500,000	19.23 %

BAB V

PENUTUP

Capaian penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dilaporkan secara lengkap dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini. LPPD juga menyampaikan laporan mencakup akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan indikator kinerja *outcome* dan *output* yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh Urusan Wajib Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2023 lalu, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala terutama berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa Pemerintah Kabupaten Kudus untuk fokus dalam penanganan pandemi agar dampak kepada masyarakat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdapat satu bidang yang tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Kudus yaitu dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral mengingat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan tersebut adalah pengelolaan panas bumi, sedangkan di wilayah Kabupaten Kudus selama ini belum ditemukan sumber energi panas bumi.

Secara umum seluruh kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, LPPD ini dapat menjadi bahan dan materi bagi Pemerintah untuk memberikan evaluasi kebijakan yang bersifat konstruktif dan pembinaan bagi peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.

Sedangkan dalam implementasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya melaksanakan secara maksimal, dan diharapkan target yang dicapai senantiasa meningkat pada masa-masa mendatang.

LPPD juga memuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap masyarakat Kabupaten Kudus dalam pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya pada Tahun 2023 lalu. Dari LPPD ini dapat didapatkan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan. .

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD%	27.155	99,57
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		27.271	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar%	84.784	99,96
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		84.816	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama%	41.155	99,48
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		41.369	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan%	1.910	92,94
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		2.055	
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten		1.414	1,62
				Jumlah Penduduk kabupaten		873.431	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama%	18	100,00
				Jumlah RS kabupaten		18	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan%	13.866	95,54
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		14.513	
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan%	13.381	100,00
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten		13.381	
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	13.165	98,94
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten		13.306	
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai%	61.986	92,68
				Jumlah balita di kabupaten		66.881	
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	126.115	100,00
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten		126.115	
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%	524.021	91,05
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten		575.509	
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%	94.958	92,84
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten		102.285	
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%	220.256	93,24
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten		236.225	
15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%	17.476	95,35		
		Jumlah penderita DM di kabupaten		18.329			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%	2.010	92,33
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten		2.177	
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%	13.203	106,77
				Jumlah penderita TBC di kabupaten		12.366	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar%	19.874	100,00
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		19.874	
		19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)%	610,16	100,00
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)		610,16	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)%	tidak ada wilayah pantai	tidak ada wilayah pantai
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)			
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting%	9.294,90	90,28
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		10.295,40	
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.%	236.486	98,600		
		Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.		239.844			
23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di%	239.844	100,00		
		Jumlah rumah di Kabupaten		239.844			
24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya%	683	100,00		
		Jumlah IMB yang berlaku		683			
25	Tingkat kemantapan jalan Kabupeten	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap%	605,3450	94,69		
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		639,2620			
26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli%	34	100,00		
		Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah kabupaten		34			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi%	199	100,00	
				jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		199		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020%	1	0,00	
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020		1		
		28	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni%	Nihil	0	
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		Nihil		
		29	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani%	136,81	94,09	
				Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha		145,4		
		30	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni%	6.364	2,57	
				Jumlah total unit rumah Kabupaten		247.595		
		31	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU%	6137	100,00	
				Jumlah unit rumah kab/kota		6137		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan%	510	100,00	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		510		
		33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan%	55	98,21	
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		56		
		34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Orang	84.995	84.995
						Orang	73.170	73.170
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Orang	73.170	73.170
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Orang	87.596	87.596
		37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan%	84	95,45	
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten		88	88	
38	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			Menit	11,75	11,75		
6	Sosial	39	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan%	1144	98,79	
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		1.158		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		40	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran%	3.239	100,00
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		3.239	
7	Tenaga Kerja	41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD%	18	94,74
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		19	
		42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi%	86.541	70,11
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		123.436	
		43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		71.433.350.000.000	15092934564,43
				Jumlah tenaga kerja		473.290	
		44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Organisasi dan Birokrasi)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak%	1118	91,64
				Jumlah Perusahaan		1220	
45	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan%	2697	70,40		
		Jumlah pencaker yang terdaftar		3831			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD%	1.431.997.901.825	55,49
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD		2.580.511.409.364	
		47	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi%	19	100,00
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		19	
48	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	13	4,07		
		Jumlah penduduk perempuan		319.571			
9	Pangan	49	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan kabupaten%	17,34	22,22
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten		78,05	
10	Pertanahan	50	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi%	853406	100,00
				Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi		853406	
		51	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu%	11310	100,00
				Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum		11310	
		52	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi%	50,3	100,00
				Luas izin lokasi yang diterbitkan		50,3	
		53	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)%	tidak ada	0
				Jumlah penerima tanah obyek landreform			
		54	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah%	tidak ada	0
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		-	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		55	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan%%	2 2	100,00
11	Lingkungan Hidup	56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup%		60,80
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)	52,67	
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)	81,92	
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)	35,72	
		57	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpada di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani%	134.614,34	84,63
				Total vol timbunan sampah Kabupaten		159.061,34	
58	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan%	28	17,72		
		Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		158			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	59	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman%	640.878	99,66
				Jumlah penduduk wajib KTP-el		643.060	
		60	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA%	171.132	74,74
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		228.977	
		61	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran%	242.411	99,96
				Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun		242.506	
		62	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama%	11	33,33
				Jumlah PD		33	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks%		tdk ada desa tertinggal
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			
		64	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%	15	71,43
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		21	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$		2,11
		66	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern%	91.219	71,49
				Jumlah Pasangan Usia Subur		127.601	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani%	8.623	6,76
Jumlah Pasangan Usia Subur				127.604			
15	Perhubungan	68	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)		0,68	0,68
		69	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten		0,59	0,59
16	Komunikasi dan Informatika	70	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh%	33	100,00
				Jumlah PD		33	
		71	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi%	80	66,67
				Jumlah Layanan Publik		120	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		72	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)%	556.195 644.857	86,25
17	Koperasi dan UKM	73	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset%	113	71,52
				Jumlah seluruh koperasi		158	
		74	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha%	17072	100,00
				Jumlah usaha kecil keseluruhan		17072	
18	Penanaman Modal	75	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2022 - jumlah investasi tahun 2021) di kabupaten%	1506959,8	14,63
				Jumlah investasi tahun 2021 di kabupaten		10297852,1	
19	Kepemudaan dan Olahraga	76	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di kabupaten	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten%	1969	0,99
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		199.442	
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi%	145.784	73,10
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		199.442	
		78	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan	Medali	3	3,00
		20	Statistik	79	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah%
Jumlah PD						33	
80	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah%	33	100,00
				Jumlah PD		33	
21	Persandian	81	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi		324	50,23
				Jumlah area penilaian		645	
22	Kebudayaan	82	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan%	296	78,31
				Jumlah cagar budaya yang terdata		378	
23	Perpustakaan	83	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat%		51,19
		84	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)%		64,63
24	Kearsipan	85	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	$T = (a + i + s + j)/4$%		59,50
		86	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$%		33,30
	Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	87	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Ton	2763.59	2763.59

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
26	Pariwisata	88	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2022 – Jumlah wisatawan tahun 2021)%	173	1572,73
			Jumlah wisatawan tahun 2022		11		
		89	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2022 – Jumlah wisatawan tahun 2021)%	1.334.328	77,00
			Jumlah wisatawan tahun 2022		1.732.989		
		90	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual%	121.423	27,45
			Jumlah kamar yang tersedia		442.380		
91	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)%	Rp2.407.303	2407303,00		
		Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)		Rp32.167.335			
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2020%	Rp3.655.784.588	1,24		
		Realisasi PAD Tahun 2020		Rp293.950.758.703			
27	Pertanian	93	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	ton	136.865,00	660,42
				Luas Panen (ha)		20.724	
		94	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2023) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2022)%	0	0,00
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2022		1	
28	Kehutanan					Tidak Perlu Diisi	
29	ESDM	95	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin%	0	0,00
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		1	
30	Perdagangan	96	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan%	15349	100,00
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		15349	
		97	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi%	16.510	100,00
				RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		16.510	
		98	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan%	10.003	89,70
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		11.151	
99	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2021 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2020)%	19	0,44		
			Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020		4352		
			Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019		4352		
		100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Jumlah Target Jenis Industri Prioritas kabupaten yang ditetapkan%	96,12	
				Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
31	Perindustrian	101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauar%	55	100,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan		55	
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauar%	7	0,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan		7	
						0	
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauar	0,00%	0	0,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan		100	
104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	7 Informasi industri secara lengkap dan terkini			50,00		
32	Transmigrasi						
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)%	234.678.599.435,00	9,84
				Jumlah APBD (realisasi)		2.384.900.384.445,00	
		2	Persentase PAD	Jumlah PAD%	502.312.790.147,00	22,07
				Jumlah PDRB non migas		2.276.162.193.662,00	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	3,001
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan	Level	Level 3	3,020
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)%	369.425.691.876,00	15,49
Jumlah belanja APBD (realisasi)				2.384.900.384.445,00			
6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP		WTP	WTP	
			WTP		WTP	WTP	
			WTP		WTP	WTP	
			WTP		WTP	WTP	
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n%	0	0,00
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		51	
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif%	3778	71,06
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		5317	
		9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan%	1.209.372.604.918,00	46,13
				Total belanja langsung		2.621.703.387.466,00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2022 - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021		349.003.271.016,00	233,52
			Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021		149.455.637.020,00		
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)%	925	51,76
			Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1.787		
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)%	274	15,33
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1.787		
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi%	274	100,00
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		274		
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi%	2.384.900.384.445,00	-6,24
			Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		2.244.752.949.070,00		
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi%	502.312.790.147,00	-16,91
			Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		429.654.851.000,00		
		15	Assets management	Jumlah Asset Manaiemen	Jumlah		4
				Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya	ya	KIB A s/d KIB E
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya	ya	Permendagri No. 47 Tahun 2021
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	ya	ya	Rekon 1 th sekali
		16	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA%	280.938.539.131,00	12,59
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)		2.231.500.773.692,00	
37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda%	2.288.656.371.786	114,55
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		2.621.703.387.466		
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda%	9	37,50
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci		24		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
PENDIDIKAN PAUD							
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	310	310
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	370	370
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	484	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2.097	2097
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2.097	2097
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini,		Orang	1187	1187
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	357	357
PENDIDIKAN DASAR							
		1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi		Unit	397	397
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0
		3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	73.127	73127
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	3.395	3395
		5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	3.478	3478
		6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	506	506
		7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	776	776
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1563	1563
		9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	365	365
		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	336	336
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA							
		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi		Unit	27	27
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0
		3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	69.443	69443
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.555	1555

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
1	Pendidikan	5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.212	1212		
		6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	215	215		
		7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	266	266		
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	716	716		
		9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	42	42		
		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	184	184		
		PENDIDIKAN KESETARAAN							
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Orang	10	10		
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0		
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	230	230		
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	230	230		
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	152	152		
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	0	0		
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	18	18		
		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan							
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	8	8		
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	18	18		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil							
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			13381	13381				
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	3141	3141				
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan									
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			13381	13381				
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan, persalinan sesuai standar		Orang	3208	3208				
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir									
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			13306	13306				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
2	Kesehatan	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dokter :326, Dokter spesialis 32, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62	Orang	3208	3208	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				68881	16
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62			3176	16
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				126115	126115
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3214	3214
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				575509	575509
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan		Orang	3241	3241
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				94958	94958
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan		Orang	3241	3241
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				236225	236225
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3241	3241
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				18.329	18329
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3.241	3241
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				2.166	2166
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Perawat 1848		Orang	2.285	2285
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				12.366	12366
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Perawat 1848, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 121, tenaga kesehatan masyarakat 13, radiographer penata rontgen) 50		Orang	2.535	2535
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				19.874	19874
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, ATLM 121, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3.295	3295
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir						
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)			Ha	610,16	610,16
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)			M	17.702,00	17.702,00		
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS			Ha	Nihil	Nihil		
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)			M	Tidak ada wilayah pantai	Tidak ada wilayah pantai		
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota			Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota		Ada/Tidak	tidak ada	ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		Jumlah	Tidak ada	Tidak ada
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota							
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak ada	Tidak ada
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak ada	Tidak ada
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak ada	Tidak ada
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak ada	Tidak ada
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		Jumlah	Tidak ada	Tidak ada
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi							
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	%	157.99	90,28
				Panjang jaringan irigasi primer (m)		175	
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	%	256.835,33	90,28
				Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)		284.481	
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	%	18.011,27	90,28
				Panjang jaringan irigasi Tersier (m)		19.950	
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota							
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota		Ada/Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota		Ada/Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota		BUMD/UPTD	Tidak ada	Tidak ada
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	Tidak ada	Tidak ada
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah		Kerjasama	Tidak ada	Tidak ada
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik							
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan		Rumah	2.056	2.056
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	1.356	1.356
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	3.812	3.812
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	1336	1336

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	1336	1336
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	1356	1356
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	2556	31,18
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha		8197	
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	1336	15,66
				rumah di wilayah pengembangan IPLT		8533	
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T	%	1356	23,65
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T		5733	
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	1356	16,35
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		8294	
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	16	54,96
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota		29,11	
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	%	25	9,54
				jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota		262,03	
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	284877	100,00
				jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota		284877	
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	1336	16,11
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		8.294	
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota							
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	0	0,00
				Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana		1	
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	683	683
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	Ada/Tidak	ada	ada
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang	Keputusan Bupati Kudus No. 600/226/2021 tentang Pembentukan Tim Ahli	Ada/Tidak	ada	ada
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Keputusan Bupati Kudus No. 432/159/2020 tentang Penetapan Rumah Kapal	Bangunan	1	1
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kota		Bangunan	0	0
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota		Bangunan	3.714	3.714
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	152	152

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan							
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kota		M	639.262	639.262		
		2	Panjang jalan yang dibangun		M	Tidak ada	Tidak ada		
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	Tidak ada	Tidak ada		
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		M	26.592,90	26.592,90		
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	44,8	44,8		
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		M	61.214,83	61.214,83		
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	Tidak ada	Tidak ada		
		8	Panjang jalan yang dipelihara		M	11.109,00	11.109,00		
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	197	197		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli							
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota		Orang	0	0		
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota		Orang	177	177		
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kota		Orang	177	177		
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada/Tidak	-	-		
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Badan Usaha	66	66	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota		Badan Usaha	Tidak ada	Tidak ada	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	Tidak ada	Tidak ada	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	Tidak ada	Tidak ada	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		izin	Tidak ada	Tidak ada	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Tidak ada	Tidak ada	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	Tidak ada	Tidak ada	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Tidak ada	Tidak ada	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota						
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	22.433,00	22.433,00	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	32	32	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang	128	128	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana		Unit	1	1	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	Nihil	Nihil	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	NIHIL	NIHIL	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban		Unit	99	99	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang	3	3	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha	NIHIL	NIHIL	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota						
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	NIHIL	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	NIHIL	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	NIHIL
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	NIHIL
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	NIHIL
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	NIHIL	NIHIL
Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani							
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	8,589	8,589
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	409	409
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	136,814	136,814
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)							
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	247.595	247.595
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	409	409
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	6.365	6.365
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	7.428	7.428
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	%	290.953	117,51
				Jumlah total unit rumah		247.595	
		6	Jumlah rumah pembangunan baru				
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)							
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	23	23
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	6.137,00	6.137,00
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	6.137	6.137
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi(on site / off site)		Rumah	6.137,00	6.137,00
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	12	12
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	6.137	6.137
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	20	20
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengembang	20	20
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang	Nihil	Nihil
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan							
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang		Jumlah	510	510
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	4.244	4.244
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda&Perkada	44	44
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	3	3
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Orang	10	10
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		SOP	1	1
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana							
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	100	100
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan		1	1

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	84.995	100,00		
				Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		84.995			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	100	100,00		
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		1			
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	100	100		
				Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah		1			
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan	%	6212	9,33		
				Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan		66.598			
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	6212	9,33		
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		66.598			
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	11.387	17,10		
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		66.598			
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan	%	66.598	100,00		
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		66.598			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	1	100,00		
				Jumlah seluruh penetapan status KLB		1			
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	3	100,00		
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		3			
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	491	100,00		
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat		491			
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	87.596	100,00		
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		87.596			
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota		Layanan	167	167		
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	Nihil	Nihil		
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	Nihil	Nihil		
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa		Pos	Nihil	Nihil				
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	3	3				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	31	31
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	Nihil	Nihil
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	1	1
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki		layanan	4	4
		2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM		orang	37	37
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk		tim	1	1
		4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Dijangkau		orang	1121	1121
		5	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki		unit	1 unit mobil resque	1 unit mobil resque
		6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi		Orang	792	792
		7	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar		unit	1	1
		8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang		Orang	53	53
		9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu		Orang	64	64
		10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter		unit	1 kursi roda 2 kruk	1 kursi roda 2 kruk
		11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia		Paket	1	1
		12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan		Orang	5	5
		13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah			-	-
		14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan		Orang	1 orang Peksos 9 orang TKSK 77 orang PKH 23 orang Tagana	1 orang Peksos 9 orang TKSK 77 orang PKH 23 orang Tagana
		15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		Orang	198	198
6	Sosial	16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat			198 keluarga	198 keluarga
		17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan		orang	10	10

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		orang	20	20
		19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga		orang	5	5
		20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga		Orang	5	5
		21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dirujuk		Orang	27	27
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten							
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	3.239	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	80	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	132 desa/kel	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	20	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan		Orang	100	
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	110 orang terdiri : 1 orang Peksos 9 orang TKSK 23 orang Tagana 77 orang PKH	
7	Tenaga Kerja	Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kota		Ada/Tidak	ada	ada
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	99,91	99,91
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Perusahaan	5	5
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi							
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi	%	53	100,00
						53	
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2022	%	65	78,31
				jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2022		83	
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2022	%	83	3,33
				jumlah peserta pelatihan pada tahun 2022		2495	
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2022	%	7	17,07
				jumlah seluruh LPK pada tahun 2022		41	
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2022	%	41	100,00
				jumlah LPK yang terdata pada tahun 2022		41	
		6	Jumlah penganggur yang dilatih		Orang	2175	
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	%	2495	100,00
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2022		2495	
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2022	%	1597	64,01
				jumlah lulusan pada tahun 2020		2495	
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi	%	2495	100,00
				Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2020		2495	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
10			Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}}$	%	264	93,95
11			Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	pelatihan	4	4
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja							
1			Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun 2020}}$	%	409	33,52
2			Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		0,97	0,97
Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
1			Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020}}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau}}$	%	173	65,78
2			Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020}}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh}}$	%	92	100,00
3			Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	Konfederasi SPISB : 1 Federasi SPISB : 6 SPISB di perusahaan : 70 SP/SB diluar	Konfederasi SPISB : 1 Federasi SPISB : 6 SPISB di perusahaan : 70 SP/SB diluar
4			Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)}}$	%	245	100,00
5			Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}}$	%	1118	91,64
6			Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun 2020}}$	%	3	0,25
7			Jumlah Mogok Kerja		Mogok	0	0
8			Jumlah Penutupa Perusahaan		Perusahaan	0	0
9			Jumlah Perselisihan Kepentingan		Perselisihan	0	0
10			Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu)		Perselisihan	0	0
11			Jumlah Perselisihan PHK		Perselisihan	13	13
12			Jumlah Pekerja / Buruh yang Ter-PHK		Perselisihan	54	54
13			Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite		Perselisihan	41	41
14			Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan		LKS	1	1
15			Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}}$	%	9	69,23
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kota							
1			Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab		Lowongan Kerja	2.399	2.399
2			Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	3.831	3.831
3			Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab		BKK	26	26

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota		Orang	19	19
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	8	8
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab		Lembaga	0	0
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab		Perjanjian	264	264
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	2697	2697
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Orang	281	281
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	281	281
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Fasilitas Kepulangan	Σ fasilitasi PMI yang dipulangkan	%	2	100,00
				Σ PMI yang pulang		2	
		12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Σ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%	264	93,95
				Σ PMI/TKI		281	
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Σ PMLatau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%	23	100,00
				Σ PMI/TKI purna dan keluarganya		23	
		14	Jumlah Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Yang Dibentuk (layanan TKI / PMI)	Σ LTSA yang terbentuk	%	1	50,00
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI		2	
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab Yang Telah Dilatih PUG		Lembaga		
		2	Jumlah Program PUG di Pemda yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kab		Prog/Keg	sudah semua	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten					
		1	Jumlah Media Massa Yang Pernah Berkerjasama Untuk Melakukan "KIE" Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		Media Massa	5	5
		2	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Telah Memiliki SPM		Lembaga	13	13
		3	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	%	19	100,00
				jumlah korban kekerasan anak di tingkat kota		19	
		4	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Pelatihan		lembaga	6	6
		5	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan/ Fasilitas Oleh Pemkab/Kota (APBD Kab)		Lembaga	2	2
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan		orang	3	3
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	Perempuan Yang telah memperoleh sertifikat kader responsive gender	Orang	4	4
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaanperempuan yang mendapat pelatihan	(PPA Polres Kudus dan JPPA)	Lembaga	2	2
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	(JPPA dan forum Anak)	Lembaga	Nihil	Nihil
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	(JPPA)	Kebijakan/Program	Nihil	Nihil
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		Lembaga	2	2
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	%	13	13
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		13	13
Persentase Cadangan Pangan							
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	ada	ada
		2	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	ada	ada
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	tidak ada	tidak ada
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	ada	ada
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	ada	ada
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	ada	ada
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	ada	ada
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	ada	ada
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan							
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya	%	10	100,00
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		10	
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimumabsentee	%	tidak ada	tidak ada
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek			
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee	%	tidak ada	tidak ada
Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek							
4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya	%	tidak ada	tidak ada		
5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupatten	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	%	ada	ada		
		Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota							
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :				60,8
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)			52,67	
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)			81,92	
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			35,72	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
11	Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kota					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%		
				DUMP TRUCK		0,65	0,65
				ARM ROLL		0,41	0,41
				BECAK MOTOR SAMPAH		0,18	0,18
				BECAK SAMPAH		0,19	0,19
				COMPACTOR		1,03	1,03
				Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	m3		310.000
				Timbulan sampah TPA eeksisting		775.000,00	
				Daya tampung TPA eksisting		465.000,00	
				Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	%		0,053
				jumlah TPST		14	
				Jumlah sampah TPST		26.577,80	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota					
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab	%	28	96,55
				jumlah usulan permohonan yang teregstrasi		29	
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah PPLHD yang ada	%	1	0,32
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah kab		315	
3	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda	%	NIHIL	NIHIL		
		Jumlah usulan MHA		NIHIL			
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan	%	NIHIL	NIHIL		
		Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada		NIHIL			
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana	%	52	100,00		
		target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat		52			
6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani	%	10	100,00		
		Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi		10			
Perekaman KTP Elektronik							
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	%	73	100,00
				Peristiwa perkawinan yang diterbitkan		73	
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Perceraian yang diterbitkan	%	19	100,00
				Peristiwa Perceraian yang diterbitkan		19	
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	%	9094	100,00
				Peristiwa kematian yang diterbitkan		9094	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skalakabupaten dalam satu tahun 2 tahun	%	3 2	150,00	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama		Desa			
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun	TIDAK ADA DESA TERTINGGAL	Desa			
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga			
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Desa			
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama		Desa	4	4	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa			
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Posyandu : 835, PKK : 132, LPMD : 123, RT/RW : 716/3783, Karang Taruna : 132, LPMD : 123	Lembaga			
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	BUMDes : 111 BUMDesMA ; 2	Desa	113	113	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR						
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-		Ada/Tidak	ada	ada	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	Nilai Tengah	20-25	20-25	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		orang	0,47	0,47	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE	%	8.558,00 178.972,00	4,78	
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder	7	7	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP Jumlah faskes	%	57 57	100,00	
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah PUS	%	12.945 91.219	14,19	
		3	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		kampung KB	21	21	
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern) jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	%	3.698 9.353	39,54	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)									
		1	Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kabupaten	%	58	43,94		
				Jumlah desa/kelurahan dalam kabupaten		132			
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%	30.852	59,17		
				Jumlah Keluarga PBI		52.140			
Rasio konektivitas kota									
15	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%		2%		
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan					
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	%		0,68%		
				Jumlah kendaraan wajib uji					
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	%		78,30%		
				Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten					
		3	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota atau	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten	%		91,93%		
				Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten					
		V/C Ratio di Jalan kota							
				1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota atau	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten	%		91,93%
		Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten							
: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo									
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	33	100,00		
				Jumlah Perangkat Daerah		33			
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	33	100,00		
				Jumlah Perangkat Daerah		33			
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Ada/Tidak	ada	ada		
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi							
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah @yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	26	5,58		
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		466			
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	31	93,94		
				Jumlah Perangkat Daerah		33			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
16	Komunikasi dan Informatika	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	33	100,00
				Jumlah Perangkat Daerah			
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	117	69,64
				Jumlah layanan			
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	15	12,82
				Jumlah layanan			
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	58	64,44
				Jumlah sistem elektronik			
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	43	36,75
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi			
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	33	100,00
				Jumlah perangkat daerah			
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	33	100,00
				Jumlah perangkat daerah			
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	%	33	100,00		
		Jumlah perangkat daerah				33	
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	%	36	100,00		
		Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah				36	
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	26	78,79		
		Jumlah perangkat daerah				33	
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	%	8	100,00		
		Jumlah ASN Pengelola TIK				8	
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada/tidak	Ada	ada		
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kota							
1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	4	100,00		
		Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah kabupaten				4	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	214	100,00
				Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten		214	
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	%	12	60,00
				Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik		20	
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas							
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpanpinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	%	1	100,00
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		1	
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	7	100,00
				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		7	
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	158	100,00
				Jumlah koperasi yang ada		158	
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	86	100,00
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada		86	
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	134	84,81
				Jumlah koperasi yang ada		158	
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	240	35,82
				Jumlah anggota koperasi yang ada		670	
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	%	123	77,85
				Jumlah koperasi yang ada		158	
8			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			0	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk	%	158	100,00
				Jumlah koperasi yang ada		158	
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	%	95	60,13
				Jumlah koperasi yang ada		158	
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	95	60,13
				Jumlah koperasi yang ada		158	
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	146	92,41
				Jumlah koperasi yang ada		158	
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	%	95	60,13
				Jumlah koperasi yang ada		158	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha						
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	%	601	3,52	
				Jumlah wirausaha yang ada		17072		
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	%	1293	7,57	
				Jumlah usaha mikro yang ada		17072		
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	%	439	2,57	
				Jumlah usaha mikro yang ada		17072		
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	%	130	0,77	
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk		16942		
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	684	4,16	
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		16429		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	938	5,49	
				Jumlah usaha mikro yang ada		17072		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan	%	770	4,51	
		Jumlah usaha mikro yang ada		17072				
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kota						
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	3 fasilitas	Ada/Tidak	ada	ada	
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada	
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian	tahun 2021 baru dilaksanakan	Jumlah Laporan	0	0	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one		Jumlah	1	1	
		5	Kegiatan pameran penanaman modal		Jumlah	1	1	
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Jumlah	0	0	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah	1.929	1.929	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah	14.459	14.459	
		9	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah	1.693.083.360.000	1.693.083.360.000	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kota	ASN 21 org, PHD 1 org	Jumlah	22	22	
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	270 perusahaan	Jumlah	282	282	
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	umlah permintaan data dan informasi yg terpenuhi jml permintaan data dan informasi yg diterima	Ada/Tidak	19	19	
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	74	74	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	0	0	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Orang	200	200	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi		Orang	100	100	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		Peningkatan Prestasi Olahraga					
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Orang	161	161
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	25	25
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	Ada	Ada
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survey	6	6
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah	10	10
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah Survey	1	1
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Jumlah	2	2
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral Jumlah kegiatan statistik sektoral	%	16	100,00
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral jumlah indikator statistik sektoral	%	38	100,00
		Tingkat keamanan informasi pemerintah					
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	Jumlah kegiatan strategis teramankan Jumlah kegiatan strategis yang ada	%	0	0,00
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen	Jumlah SE yang menerapkan SMK1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian Jumlah SE yang ada	%	73	81,11
		3	Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Jumlah SE yang ada	%	6	6,67
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS)	Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS	%	28	84,85
		Terlestarikannya Cagar Budaya					
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	inventaris = 85 publikasi = 29	Obyek	115	115
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	penyebarluasan = 29 pengkajian = 8 penayaan keberagaman = 6	Obyek	48	48
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	membangun karakter bangsa = 63 meningkatkan ketahanan budaya = 17 meningkatkan kesejahteraan masy = 12	Obyek	92	92
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Orang	0	0
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemerinkatan, penghapusan)		Cagar Budaya	25	25
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Cagar Budaya	222	222
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data		Cagar Budaya	0	0
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),		Cagar Budaya	2	2

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Cagar Budaya	2	2	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Koleksi	224	224	
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		Orang	75415	75415	
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana					
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Tim	1	1	
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota		Tim	1	1	
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Tim	5	5	
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	41	41	
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	9	9	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Unit	12	12	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Kegiatan	26	26	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						
		1	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	%	1.578.751 867.205	182,05	
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite Jumlah penduduk di wilayahnya	%	122.726 867.205	14,15	
		3	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam jiwa) Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	%	495 867.205	0,06	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	%	28 495	5,66	
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		kali	160		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat						
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah Kuno	1	1	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno			
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di		Budaya Etnis	116 buku	116 buku	
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip aktif	%	1.303 1.303	100,00	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip inaktif	%	751 751	100,00	
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlah seluruh arsip Statis	%	52 269	19,33	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
24	Kearsipan	4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	78	4,96	
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten		1572		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat		Jumlah Arsip	0	0	
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota		Jumlah Arsip	0	0	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0	
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0	
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0			
Urusan Pilihan								
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)						
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		orang	560	560	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	%	0	0	
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten		0	0	
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan		Izin	0	0	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses jutek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		Pembudidaya	170	170	
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		Benih	117.669.750	117.669.750			
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan						
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			66	66	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			679	679	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota		TDUP	15	15	
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang	11	11	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Kegiatan	9	9	
		6	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang	11	11	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Industri	2	2	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	%	227	10,47	
				Jumlah tenaga kerja pariwisata		2169		
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	200	71,43			
		Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		280				
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan	28 desa wisata		Lokasi	28	28		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Irigasi tersier: 17 paket, jaringan tk usaha tani: 2 paket, Irigasi air tanah dangkal : 2 unit, Jalan usaha tani : 41 paket, embung : 1paket, cultivator : 5 unit, hand traktor : 2 unit, cobine : 5unit	Unit	97'	97'	
		2	Prasaran pertanian yang digunakan			97	97	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		Dokumen	160	160	
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	97	100,00	
				Jumlah prasarana yang dibangun		97		
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	Jumlah usulan yang difasilitasi	%	97	60,63			
		Jumlah usulan usaha pertanian		160				
28	Kehutanan	160						
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan		Dokumen	Blm ada	Blm ada	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			11 kelompok	11 kelompok	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura			2,5129 Ha	2,5129 Ha	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			Nihil	Nihil	
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota						
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas		ada/tidak			
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan	jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan <= 5 hari kerja	%	0	0	
				jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		0		
			b. Toko swalayan	jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan <= 5 hari kerja	%	1	100	
				jumlah permohonan izintoko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		1		
		2	presentas epenerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	%	11	91,66666667	
				Jumlah permohonan penerbitan TDG		12		
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG		33	10,37735849	
				Jumlah gudang yang ada di Kab kota		318		
		4a	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	0,00	
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		0		
4b	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	0,00			
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		0				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
30	Perdagangan	4c	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima	%	0	0,00		
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		0			
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten	%	0	0,00		
				Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer		0			
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam	%		0		
				Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar		0			
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$	%	0			
				K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	$(0,5 + 0,5) \times 100\% = 100\%$				
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		%				
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen			Pengaduan			
		2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi			Konsumen			
		Persentase kinerja realisasi pupuk							
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)				21595,477 / 22368	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku							
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	%	1003	6,56		
Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab				15300					
2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%	0	0,00				
		Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		0					
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota									
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	0	0,00				
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk							
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP									
1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		%	50	50				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
31	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (UI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	55	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		55	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	7	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		7	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di kab di SIINas	%	77	
				Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kab		77	
		31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi		Kawasan
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang				Pemukiman		
3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang				Pemukiman		